

## BAB II. LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pembangunan Berkelanjutan

Kleden (1992:xv), mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengacu pada sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal di satu pihak dan di pihak lain memelihara keseimbangan optimal diantara berbagai tuntutan terhadap sumber-sumber daya tersebut. Terdapat dua hal yang dipertaruhkan disini, yaitu daya dukung sumber-sumber tersebut dan solidaritas transgenerasi, artinya bagaimana kita dapat memelihara dan tidak merusak sumber-sumber daya yang ada. Sedangkan Salim (1992:3), melihatnya sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Mayling dan Peter (1992:111), melihatnya pembangunan berkelanjutan merupakan keseimbangan antara semua faktor produksi yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan dalam semua kelompok sosial ekonomi dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan fisik dan sosial.

Pertemuan Rio+20 berfokus pada dua perdebatan tentang pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) tentang ekonomi hijau (*green economies*) dan (2) upaya merumuskan kerangka institusi untuk pembangunan berkelanjutan. Perdebatan yang terjadi adalah bagaimana sesungguhnya transisi menuju ekonomi hijau dilakukan. Negara maju mengarahkan kebijakan ekonominya pada sebuah *road map* untuk mengarahkan pada transisi sebuah ekonomi hijau akan tetapi negara-negara berkembang khawatir bahwa hal tersebut menghambat pembangunan ekonomi (Mangunjaya, 2015:127-128).

Hubungannya dengan industrialisasi, model pembangunan berkelanjutan mencoba mencari suatu proses yang saling menopang di antara berbagai aspek kehidupan atau lingkungan masyarakat, agar industrialisasi tidak melahirkan dampak negatif bagi berbagai aspek kehidupan (Nasution, 1992:131).

Industrialisasi dilihat dari sudut pandang ekonomi adalah suatu proses transformasi kegiatan ekonomi dari yang tradisional menuju modern, yang pada intinya terjadi perubahan struktur ekonomi.

Purbo (1992:245-247), menekankan hubungan antara ekologi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai landasan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan ekonomi dikonsepsikan sebagai hasil dari kemampuan suatu sistem masyarakat untuk mengelola pemanfaatan dan mengelola sumber dayanya untuk menopang kehidupan dan penghidupannya secara agregatif. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya merupakan kegiatan yang menyangkut kepentingan dari para pelaku pembangunan, jadi yang dikelola adalah perilaku: bagaimana manusia memanfaatkan sumber dayanya untuk keperluan yang sifatnya normatif. Sedangkan pengelolaan sumber daya adalah cara bagaimana sumber daya ditangani untuk menunjang kepentingan tersebut.

Berkaitan dengan teknik budi daya pertanian, Sinaga (2009:108), mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu sistem budidaya terintegrasi yang lebih mengutamakan pengendalian hayati untuk mengatasi masalah hama dan penyakit, yang lebih mengelola lingkungan kehidupan dan minimum aplikasi senyawa kimia sebagai input sehingga hanya menimbulkan gangguan keseimbangan biologi yang minimum. Anas (2009:116-117) menandakan bahwa pemakaian bahan organik yang berkualitas merupakan salah satu keharusan untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berpijak dari konsepsi pembangunan berkelanjutan ini, penelitian ini akan mendeskripsikan lebih jauh terhadap program CSR yang dilakukan oleh Aqua kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Sulaeman (2009:305-306), mengidentifikasi ciri-ciri sistem pertanian berkelanjutan, yakni: (1) secara ekonomi menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Petani mampu menghasilkan keuntungan dalam tingkat produksi yang cukup dan stabil, pada tingkat resiko yang dapat ditolerir; (2) berwawasan ekologis, adalah sistem yang sehat dan mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap tekanan dan gangguan; (3) berkeadilan sosial; (4) manusiawi dan

menghargai budaya lokal. Dan (5) mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi yang selalu berubah.

Menurut Gumbira Said (2004:92) terdapat lima prasyarat teknologi dalam sistem pertanian yang berkelanjutan: (1) berbasis sumber daya lokal, sehingga keunggulan komparatif yang dimiliki dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk diubah menjadi keunggulan kompetitif; (2) melakukan orientasi pada pasar lokal, pasar domestik yang besar serta pada pasar ekspor yang potensial karena setelah diberlakukan AFTA, maka segmentasi pasar-pasar tersebut menjadi tidak toleran, sejauh mutu produknya memiliki daya saing global. Dalam hal ini penguasaan teknologi proses pengolahan, teknologi pengemasan, teknologi transportasi dan teknologi pergudangan serta teknologi informasi mutlak harus dimiliki; (3) menghasilkan keragaman usaha yang besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi; (4) memiliki sumber daya manusia unggulan yang mampu mengembangkan dan melakukan inovasi teknologi yang tepat terap dan tepat sasaran; (5) memiliki kelayakan ekonomi dan finansial usaha yang baik dan mampu berkompetisi.

Penggunaan teknologi baru oleh petani akan dipengaruhi oleh kemampuan berpikir dan bertindak para petani dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu pengembangan hasil pertanian tidak cukup hanya mempertimbangkan keserasian teknologi baru tersebut, tetapi harus disesuaikan dengan kapasitas petani. Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah produk atau buatan manusia melalui kegiatan penelitian. Faktor yang sangat menentukan adalah sumber daya manusia dalam bentuk keahlian, ketrampilan dan pengalaman (Sjafri Mangkuprawira, 1994). Ini berarti dalam mengembangkan TTG harus memperhatikan sumber daya manusia tersebut, tidak hanya sumber daya fisik saja.

Haris (dalam Fauzi, 2004), memetakan konsep keberlanjutan ke dalam tiga aspek pemahaman, yakni: (a) keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian

dan industri; (b) keberlanjutan lingkungan, sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi; (c) keberlanjutan sosial, dalam arti sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan gender, dan akuntabilitas politik.

Dari uraian di atas, dengan mempertimbangkan masalah yang berkembang di masyarakat, maka batasan TTG yang dapat diterapkan pada masyarakat adalah: a) dapat dioperasikan dengan mudah oleh anggota masyarakat yang masih rendah taraf ketrampilan teknologinya, b) dapat merangsang pertumbuhan ketrampilan teknologi masyarakat dengan mudah, c) prasarana dan sarana pendukung pengoperasian teknologi tersedia dengan mudah dan d) dalam penerapannya sangat memperhatikan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan, serta kemampuan ekonomi masyarakatnya.

## **2. Pembangunan yang Berpusat pada Manusia**

Pada dasarnya pembangunan nasional adalah pembangunan yang muncul dari, oleh dan untuk rakyat dalam semua aspek kehidupan bangsa meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap warga negara berhak atas kesejahteraan yang layak. Korten (1984:301-3012) menyatakan bahwa konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Oleh karenanya pembangunan yang berpusat pada manusia menjadi pilar utama di dalam memberdayakan masyarakat.

Istilah ‘pembangunan’, seperti halnya istilah ‘masyarakat’ memiliki beragam makna. ‘Pembangunan’ sendiri merupakan istilah yang bersifat umum, mengacu kepada perubahan secara umum, dan apabila diletakkan pada konteks sosial, pembangunan sering dilihat dalam kerangka kerja evolusi sosial. Kerangka

kerja evolusi sosial mengacu kepada arahan perubahan untuk menciptakan diferensiasi, kompleksitas dan integrasi berbagai bagian masyarakat agar mampu melakukan adaptasi aktivitas-aktivitas sosial untuk merubah kondisi sosial. Definisi pembangunan ini biasanya mengacu kepada ide kehidupan yang lebih baik (Kenny, 2006:10).

Dari berbagai pandangan mengenai pembangunan yang berkembang selama ini, Melkote (2002:420) menyimpulkan setidaknya ada empat perspektif atau cara pikir mengenai pembangunan. *Pertama*, perspektif modernisasi yang didasarkan atas teori ekonomi neo klasik dan dukungan pembangunan ekonomi kapitalis. Perspektif ini berasumsi bahwa model pertumbuhan ekonomi dari Barat dapat diaplikasikan oleh berbagai negara dimana introduksi teknologi modern merupakan syarat penting pembangunan. *Kedua*, perspektif kritis yang menentang ekspansi dan imperialisme ekonomi dan budaya oleh modernisasi. Perspektif ini memandang pentingnya restrukturisasi politik dan ekonomi untuk menghasilkan lebih banyak distribusi atas sumberdaya dan hasilnya, didalam dan diantara masyarakat. *Ketiga*, perspektif liberalisasi atau monastik, yang diturunkan dari perspektif teologi pembebasan, dimana kebebasan individu dan masyarakat dari penindasan merupakan kunci kemandirian, dan hal ini dipandang sebagai tujuan pembangunan. *Keempat*, adalah konsep pemberdayaan, yang mulai digunakan pada literatur komunikasi dan pembangunan pada tahun 1990-an, namun istilah, contoh, level analisis serta dampaknya belum diaplikasikan secara penuh. Lebih lanjut, pemberdayaan (*empowerment*) tidak dapat dipahami tanpa terlebih dahulu mendefinisikan kekuasaan (*power*).

Sejalan dengan perspektif pemberdayaan, Korten (1984:301-3012) mengemukakan tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu: (1) penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri; (2) mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pengorganisasian diri; (3) kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif



dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal. Berpijak dari tiga tema penting yang dikonsepsikan Korten tadi, maka pembangunan yang berpusat pada rakyat ditempuh melalui strategi pemberdayaan secara mendasar berbeda jauh dari pendekatan-pendekatan pembangunan lainnya. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Korten (1988:261-268) menegaskan bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang memihak rakyat perlunya mengutamakan bentuk-bentuk organisasi swadaya yang menonjolkan peranan individu dalam proses pengambilan keputusan yakni pembuatan keputusan harus benar-benar dikembalikan kepada rakyat, yang mempunyai kapasitas maupun hak untuk memasukkan ke dalam proses itu kekayaan termasuk subyektivitas nilai-nilai serta kebutuhan-kebutuhan mereka. Kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis adalah strategi penghidupan mereka dan kendala-kendala yang mereka hadapi dalam memperbaiki prestasi rumah tangga mereka. Mereka adalah individu-individu yang kreatif, rajin dan menunjang hidup mereka sendiri dalam keadaan-keadaan yang sulit.

Pokok pikiran yang terkandung dalam paradigma *people centered development* ini menjadi tumpuan sistem manajemen yang dikenal sebagai pengelolaan sumber daya lokal (*community-based resources management*). Tjokrowinoto (2004:220) menguraikan pokok-pokok pikiran tersebut, yakni: (1) keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat; (2) fokus utama memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada pada masyarakat setempat; (3) toleransi adanya variasi dan mengakui makna pilihan nilai individual dan mengakui proses pengambilan keputusan desentralistik; (4) untuk mencapai tujuan menggunakan teknik *social learning*; (5) budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi-organisasi otonom dan mandiri; (6) adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku dengan organisasi lokal menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan dan mengelola sumber-sumber setempat.

Menurut Arief (1993:49-50) pembangunan sangat menitikberatkan pada pembentukan suatu sistem sosial budaya yang mampu menghasilkan sumber daya manusia atau *human capital* yang berkualitas tinggi, tangguh, dan berwatak sosial. Lembaga-lembaga pendidikan bukan hanya menjadi pusat-pusat pembentukan manusia yang punya kemampuan teknis tetapi juga menjadi pusat-pusat pembentukan manusia yang berwatak yang menjunjung tinggi karya-karya yang bersifat manusiawi atas dasar kerakyatan.

Tjokrowinoto (2004:221) mendeskripsikan ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada manusia: (1) prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri; (2) fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka (3) pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya *fleksible* menyesuaikan dengan kondisi lokal; (4) di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar; (5) proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.

Kartasasmita (1996:6), menyatakan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat sehingga dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan lapisan masyarakat. Pada akhirnya segenap lapisan masyarakat dapat menikmati pembangunan tersebut. Tuntutan ini sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan oleh pembangunan dapat berkesinambungan apabila ekonomi rakyat berkembang. Pengembangan ekonomi rakyat merupakan pokok permasalahan

yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional menunjukkan adanya keterpaduan antara pemerataan dan pertumbuhan.

Tujuan pembangunan haruslah membasmi bentuk-bentuk terburuk kemiskinan. Sasaran pembangunan harus ditetapkan atas dasar tujuan mengurangi dan akhirnya melenyapkan kurang gizi, penyakit, buta huruf, hidup melarat, pengangguran, dan perbedaan. Dengan melenyapkan kemiskinan, maka GNP akan bertumbuh dengan sendirinya. Artinya, perhatian harus lebih dipusatkan pada isi GNP daripada laju pertumbuhannya (Haq, 1983:48). Dengan demikian untuk mencapai keadaan tersebut, diperlukan upaya perubahan sikap. Perubahannya, terutama menyangkut dimensi pengetahuan, keterampilan, dan afeksinya seluruh warga masyarakat ditujukan kearah sikap membangun. Hal ini dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal secara terpadu yang menyentuh cipta, rasa dan karsa manusia.

Manusia seutuhnya dalam masyarakat adalah manusia pembangun yang dapat ikut serta aktif dalam proses pembangunan dan menimbulkan hal yang positif. Menurut Soemardjan (1993:34-35), manusia pembangunan memiliki ciri-ciri:

1. Manusia harus memiliki kepercayaan atas dirinya sendiri. Dia tidak boleh dihindangi rasa rendah diri (*inferiority complex*) yang dapat menimbulkan sikap pasrah atau menyerah kepada nasib hidup, sehingga dia menjadi pasif atau apatis terhadap kemungkinan perbaikan nasibnya
2. Manusia pembangun harus memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasibnya. Rasa bahagia yang dapat menghidupkan semangatnya bukan karena dia puas menikmati hidup.
3. Terdorong oleh keinginan yang tak kunjung padam untuk memperbaiki nasib hidupnya maka manusia pembangun mempunyai watak yang dinamis, sehingga dia (a) pandai memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan baginya (b)mampu memecahkan setiap persoalan hidup yang dihadapi (c) selalu siap menghadapi perubahan-perubahan sosial-budaya yang terjadi di dalam masyarakat.



4. Karena didalam masyarakat tidak ada orang yang cukup kuat untuk memakai kekuatan pribadinya saja guna mencapai tujuan didalam pergaulan antar manusia maka manusia pembangun harus bersedia serta mampu bekerjasama dengan manusia-manusia lain atas dasar pengertian dan penghormatan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
5. Supaya usaha pembangunannya mendapat dukungan yang positif dari masyarakat maka manusia pembangunan diharapkan memiliki watak yang bermoral tinggi.

Mahbub Ul Haq (1998) menawarkan beberapa komponen penting dalam pembangunan manusia yaitu:

1. Kesetaraan dalam pemerolehan kesempatan (*Equal Access to Opportunity*). Penekannya adalah bahwa kesetaraan akses adalah kesempatan, dan tidak harus kesetaraan hasilnya. Selama akses kesempatannya sama, sekalipun hasilnya dapat berbeda, maka pembangunan manusia ini dianggap sudah berhasil.
2. Keberlanjutan (*sustainability*) ini dipahami bahwa generasi yang akan datang harus dapat menikmati kesempatan yang sama dengan generasi sekarang. Artinya, mereka mendapat jaminan bahwa mereka masih dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada secara memadai.
3. Produktivitas (*productivity*), dalam hal ini dibutuhkan investasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan *set-up* ekonomi makro untuk memfasilitasi pengembangan SDM. Target dari peningkatan produktifitas adalah peningkatan kualitas manusia, sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya menjadi salah satu bagian produktivitas (yang berbeda dengan teori neo-liberal).
4. Pemberdayaan (*empowerment*) yang diterjemahkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingannya sendiri, sehingga mereka harus dapat mempengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka.

Freire (1984:40) menggolongkan kesadaran manusia menjadi tiga, yaitu kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis. Tema pokok gagasan Freire

pada dasarnya mengacu pada suatu landasan bahwa pendidikan adalah “proses memanusiakan manusia”. Kesadaran magis, yaitu suatu keadaan kesadaran, suatu teori perubahan sosial yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya suatu teori yang percaya akan adanya masyarakat miskin yang tidak mampu, kaitan kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih mengarahkan penyebab masalah dan ketidakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor di luar manusia, baik natural maupun supernatural.

Kesadaran naif, keadaan yang digolongkan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat aspek manusia sebagai akar penyebab masalah masyarakat. Di dalam kesadaran ini masalah etika, kreativitas, *need for achievement* dianggap sebagai penentu dalam perubahan sosial. Jadi, dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin disebabkan oleh kesalahan masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki jiwa kewirausahaan atau tidak memiliki budaya pembangunan dan seterusnya. Tugas teori sosial ini adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut. Paradigma inilah yang dikategorikan sebagai paradigma yang bersifat reformatif dan bukanlah paham perubahan yang bersifat transformatif.

Kesadaran kritis, kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan bagaimana kaitan tersebut berakibat pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam teori perubahan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja serta bagaimana mentransformasikannya.

### 3. Penyuluhan Pembangunan

Margono Slamet (2003:18), mendefinisikan penyuluhan sebagai suatu sistem pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal) untuk para petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka mampu dan sanggup memerankan dirinya

sebagai warga negara yang baik sesuai bidang profesinya, serta mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki/meningkatkan kesejahteraannya sendiri dan masyarakatnya. Pada hakikatnya penyuluhan merupakan suatu langkah dalam usaha mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. Penyuluhan diartikan sebagai wahana penyebarluasan hal-hal baru agar masyarakat mau tertarik dan berminat untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan juga merupakan kegiatan mendidik masyarakat, pemberi pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan baru agar mereka dapat membentuk sikap dan perilaku hidup menurut apa yang seharusnya (Nasution, 2002:11). Maulid (2013:33) menyimpulkan bahwa penyuluhan adalah suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian itu maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal.

Penyuluhan pembangunan merupakan salah satu pendidikan non formal yang terdiri dari kegiatan transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh lapangan kepada petani dan keluarganya yang berlangsung melalui proses belajar mengajar. Penyuluhan pertanian harus dilakukan oleh ahli pertanian yang berkompeten, yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan petani sehingga dapat mendorong minat belajar petani dan berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh petani yang sesuai dengan kenyataan dan pemahaman mereka. Kegiatan penyuluhan merupakan proses komunikasi umpan balik dari pemberi dan penerima manfaat perubahan yang disertai evaluasi pada akhir pelaksanaannya. Seiring perjalanannya, kegiatan penyuluhan diartikan dengan berbagai pemahaman, seperti: penyebarluasan (informasi), penerangan atau penjelasan, pendidikan non formal, perubahan perilaku, rekayasa sosial, pemasaran inovasi (teknis dan sosial), perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan komunitas (Mardikanto, 2009:12).

Menurut UU No. 16 Tahun 2006, rumusan tentang pengertian penyuluhan pertanian adalah: proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya,

sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluhan pertanian merupakan lembaga yang penting dalam pembangunan masyarakat terutama dalam upaya mengubah sikap masyarakat serta penyebarluasan inovasi dan teknologi baru kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat berusaha lebih baik, lebih menguntungkan, dan dapat hidup lebih layak (Vitayala, *et al.*, 1994:39).

Visi penyuluhan pertanian diharapkan dapat mewujudkan masyarakat pertanian (di Indonesia) yang mandiri, inovatif, dan terus menerus mengembangkan profesionalisme dan kemitraan yang sinergis untuk memperbaiki usahatani yang semakin produktif dan efisien dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan (Mardikanto, 2009: 205).

Menurut Mardikanto (2009: 205-206), penyuluhan pertanian dilandasi oleh beberapa misi, yaitu:

- 1) Pemerataan pembangunan, agar semua *stakeholder* pertanian mendapat kesempatan untuk mengusahakan aset nasional yang berupa sumberdaya pertanian.
- 2) Desentralisasi, agar pemerintah di daerah benar-benar memiliki otonomi untuk memfasilitasi dan mengakomodasi kepentingan masyarakatnya, sesuai dengan kondisi alam dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat setempat.
- 3) Partisipatif, dalam bentuk adanya keterpanggilan moral untuk memberikan kesempatan dan memberikan kepercayaan kepada semua lapisan masyarakat bahwa mereka memiliki kemauan dan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakatnya.
- 4) Kemandirian, dalam bentuk memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk berswakarsa, swakarya dan swakelola, serta tidak terlalu banyak “dibina”, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah nasional maupun pemerintah kabupaten/kota setempat.

- 5) Profesional, dalam arti terus menerus mengembangkan keahlian, mencintai pekerjaannya dan berpegang teguh pada etika profesinya.
- 6) Kemitraan, yaitu pengembangan bentuk hubungan antara masyarakat setempat dengan “pihak luar” yang harus dilandasi oleh suasana kemitraan yang sinergis, saling bantu, saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling berbagi menanggung resiko.
- 7) Keberlanjutan (*sustainability*), yaitu terjaminnya kelangsungan kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan masyarakat untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Penyuluh pertanian berperan dalam mendidik suku yang terasing supaya dapat bercocok tanam secara menetap sehingga dapat berusaha dengan baik. Hal ini berdampak memberikan inovasi baru bagi suku terasing yang dimukimkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan mereka (Saragih, 2001:138). Menurut Suparta (2003:144), dalam konteks agribisnis, penyuluhan sistem agribisnis adalah jasa layanan dan informasi agribisnis yang dilakukan melalui proses pendidikan non formal untuk petani dan *stakeholder* agar kemampuannya berkembang secara dinamis untuk menyelesaikan sendiri setiap permasalahan yang dihadapinya dengan baik, menguntungkan dan memuaskan.

Lumintang (2003:123-124) mengemukakan bahwa kelembagaan penyuluhan dirancang sebagai sebuah organisasi marketing. Menurutnya penyuluhan harus berorientasi kepada klien. Konsekuensi logisnya, fungsi seorang penyuluh adalah: (1) dalam melaksanakan tugasnya harus ikut serta melibatkan petani dan melakukan kontak langsung agar dapat merubah perilakunya petani; (2) penyuluh harus memiliki kredibilitas yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan petani dan juga kreativitas untuk menciptakan kondisi bagi petani agar mengimplementasikan sasaran sehingga penyuluhan dapat efektif; (3) penyuluh harus membuat berbagai keputusan berdasarkan strategi penyuluhan dan aktif dalam operasionalnya; dan (4) penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh harus realistis dan bermanfaat bagi petani.



Peran lembaga penyuluhan pertanian dalam membangun sistem pertanian terpadu menitikberatkan pada peningkatan kemampuan petani dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan pertanian. Petani harus lebih berdaya dalam mengenali diri sendiri, memahami kebutuhan diri, dan mengidentifikasi potensi-potensi yang ada pada diri mereka sehingga dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan petani. Tujuan utama dari penyuluhan pertanian adalah mempengaruhi para petani dan keluarganya agar mengubah perilakunya menuju perbaikan mutu hidup yang lebih baik. Perubahan perilaku petani dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, antara lain: bertambahnya perbendaharaan informasi yang berguna bagi petani; meningkatnya keterampilan, kemampuan, dan kebiasaan baru petani yang lebih baik; timbulnya sikap mental dan motivasi petani yang lebih tinggi (Slamet, 2003:20).

Kegiatan penyuluhan pertanian memerlukan sumberdaya manusia yang handal untuk mencapai tujuan-tujuan penyuluhan. Maka perlu adanya perencanaan pengelolaan sumber daya penyuluh yang menjadi tugas dari pimpinan organisasi badan penyuluhan pertanian. Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) profesional diminta untuk mengambil kepemimpinan peran dalam mengubah organisasi dengan cara mendorong dan meningkatkan pembelajaran (Kontoghiorghes, *et al.*, 2005:19). Penyuluh pertanian adalah pegawai yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dan berfungsi sebagai penyebar informasi bagi petani, mengajarkan keterampilan kepada petani memberi saran dan rekomendasi, mengikhtiarkan sarana dan fasilitas serta mengembangkan swakarya dan swadaya petani.

Kegiatan penyuluhan pertanian sedikitnya melibatkan dua sistem yaitu sistem sasaran dan sistem penyuluhan pertanian. Pada dua sistem tersebut terjadi dua peristiwa yaitu aksi (stimulus) dan reaksi (respon). Terdapat berbagai hambatan dalam menjalin suasana saling mempercayai diantara penyuluh dengan sasaran. Hambatan tersebut yaitu pengaruh personal, struktur sosial, dan lingkungan kebudayaan yang mana semuanya harus diatasi untuk mencapai keberhasilan penyuluhan pertanian (Saragih, 2001:70).

Menurut Adjid (2001:94), sebagai lembaga pelayanan masyarakat khususnya petani, penyuluh memiliki tugas dan fungsi diantaranya:

1. Membuat program penyuluhan di awal kegiatan. Program penyuluhan adalah daftar acara kegiatan penyuluhan sebagai rencana kegiatan yang tersusun sistematis atas dasar urutan waktu pelaksanaannya pada program penyuluhan. Program penyuluhan yang intinya menyusun rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing lembaga penyuluhan mulai tingkat pusat sampai tingkat kecamatan (BPP). Jadi program penyuluhan berisi tentang beberapa hal yang umumnya berisi hal-hal sebagai berikut : (1) nama kegiatan, (2) output yang diharapkan, (3) sasaran, (4) volume/frekwensi, (5) lokasi, (6) waktu, (7) biaya, (8) pelaksana, (9) penanggungjawab, (10) pihak terkait lainnya. Perumusan hal-hal tersebut di atas didahului dengan menggambarkan keadaan umum wilayah (karakteristik wilayah, sumberdaya pertanian, data produksi, data keragaan tingkat penerapan teknologi, dan analisis kebutuhan penyuluhan pertanian) dan analisis masalah (aspek teknis, aspek sosial, dan aspek ekonomis). Pembuatan program penyuluhan akan memudahkan penyuluh dalam melaksanakan program-programnya selama satu tahun mendatang. Dikarenakan dalam program telah jelas disebutkan urutan waktu dan kegiatan yang akan dilaksanakan penyuluh. Penyuluh akan menggunakan program sebagai dasar dalam melakukan kegiatan agar sumber daya alam yang ada dapat didayagunakan secara maksimal dan diperoleh manfaat yang optimal bagi kehidupan masyarakat.
2. Mengawasi dan menginformasikan setiap program pembangunan pertanian dari tingkat pusat. Penyuluh merupakan kaki tangan pemerintah pusat dalam sosialisasi program-program barunya. Penyuluh akan menginformasikan program-program baru yang akan dilaksanakan pemerintah. Keberadaan penyuluh sangat efektif bagi pemerintah dalam hal penyebaran informasi dari pusat. Penyuluh juga wajib melakukan percontohan, penelitian, atau uji coba untuk mengetahui lebih dalam mengenai inovasi yang akan diberikan kepada

petani. Hal ini juga akan membuat penyuluh lebih tahu mengenai batasan-batasan pelaksanaan inovasi.

3. Melakukan transformasi ilmu kepada masyarakat sasaran agar dapat diaplikasikan untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan pendapatan. Selain sebagai informan, penyuluh juga merupakan transformator pendidikan yang bergerak di segala bidang kehidupan yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Penyuluh akan memberikan ide, inovasi, solusi masalah, dan ilmunya untuk menunjang kemampuan petani dalam meningkatkan kemandirian. Kemandirian akan membuat petani lebih agresif dalam memperbaiki kehidupan dan meningkatkan pendapatan.

Selain tugas dan fungsi, penyuluh juga memiliki program-program yang akan dilaksanakan. Program penyuluhan yang berkaitan dengan pembangunan sistem pertanian terpadu yang akan dilakukan, misalnya: (1) meningkatkan produksi tanaman pangan dengan komoditas prioritas yakni padi, jagung, kedelai, dan hortikultura; (2) melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Tanaman Terpadu (SLPTT) dari Dinas Pertanian. Dan (3) melakukan intensifikasi pekarangan dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam penanganan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Moenir (1992:75) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Perlengkapan penyuluhan merupakan alat bantu penyuluhan yang dapat membantu dalam proses penyuluhan karena dengan adanya alat bantu akan memperlancar proses penyuluhan. Menurut Suradisastira (2006:22-31), terdapat dua alat bantu dalam proses penyuluhan pertanian yaitu alat bantu yang berhubungan dengan tempat (kursi, tikar, penerangan dan lain-lain) serta alat bantu yang berhubungan dengan penyajian pelajaran seperti visual, audio, audiovisual dan lain-lain.

Pendampingan terhadap petani dilakukan untuk meningkatkan *bargaining position* petani, baik dalam kualitas kerja maupun kemampuan manajemen organisasi dan usahanya. Koperasi dapat dijadikan sebagai wadah

usaha bersama petani karena memiliki budaya dan nilai-nilai kerja sama yang sesuai dengan budaya pertanian Indonesia dan mengakar di masyarakat.

Mardikanto (2009:145-146) menegaskan bahwa pengorganisasian penyuluhan pertanian harus selalu memperhatikan pentingnya keterlibatan masyarakat sasaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian, sejak di dalam perumusan masalah, tujuan kegiatan, dan pengambil keputusan tentang perencanaan program penyuluhan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan kegiatan, maupun evaluasi kegiatannya. Hal ini, disebabkan karena: (1) hanya masyarakat petani yang tahu pasti tentang masalah yang dihadapi, dan kegiatan yang perlu dilakukan sesuai dengan pandangan dan pola pikir mereka sendiri; (2) hanya petani sendiri yang mampu memberikan umpan balik yang terpercaya, tentang sebab-sebab kelambanan adopsi inovasi yang ditawarkan oleh penyuluhnya; dan (3) mereka sendirilah yang seharusnya menilai, apakah seorang penyuluh itu dinilai andal/tidak, serta apakah program penyuluhan itu dinilai berhasil atau tidak.

*Penyuluhan Sebagai Proses Penyebarluasan Inovasi.* Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan yang dalam hal ini merupakan penyebarluasan informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ke dalam praktek atau kegiatan praktis (Mardikanto, 2009:12). Fungsi utama dari penyuluhan pertanian adalah diambil alihnya teknologi oleh petani. Maksud dari penyuluhan pertanian berlandaskan asumsi ini adalah membantu petani meningkatkan produksinya, maka negara akan lebih sejahtera, dan keluarga tani juga akan lebih sejahtera (Saragih, 2001: 55).

*Penyuluhan Sebagai Proses Pengembangan Kapasitas.* Penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakatnya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya guna (efisien) secara berkelanjutan (Mardikanto, 2009: 19). Kapasitas adalah kemampuan (individu, kelompok,

organisasi, dan kelembagaan yang lain) untuk menunjukkan/ memerankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kapasitas bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan proses yang berkelanjutan. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas (Mardikanto, 2009: 119).

UNDP (1998) dalam Mardikanto, (2009:20) menyatakan bahwa penguatan masyarakat di sini memiliki makna ganda yang bersifat timbal balik. Di satu pihak, penguatan diarahkan untuk melebihi mampu individu agar lebih mampu berperan di dalam kelompok dan masyarakat global, di tengah-tengah ancaman yang dihadapi baik dalam kehidupan pribadi, kelompok, dan masyarakat global. Sebaliknya, penguatan masyarakat diarahkan untuk melihat peluang yang berkembang di lingkungan kelompok dan masyarakat global agar dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan pribadi, kelompok, dan masyarakat global.

Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Sosial. Mardikanto, (2009:17) menyatakan bahwa penyuluhan tidak sekedar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Perubahan sosial adalah proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Revolusi nasional, pembentukan suatu lembaga pembangunan desa, pengadopsian metode keluarga berencana oleh suatu keluarga, adalah merupakan contoh-contoh perubahan sosial. Perubahan, baik pada fungsi maupun struktur sosial adalah terjadi sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Struktur suatu sistem terdiri dari berbagai status individu dan status kelompok-kelompok yang teratur. Berfungsinya struktur status-status itu merupakan seperangkat peranan atau perilaku nyata seseorang dalam status tertentu. Status dan peranan saling mempengaruhi satu sama lain (Hanafi, 1987:16-17).

Peyuluh pertanian berperan dalam mendidik suku yang terasing supaya dapat bercocok tanam secara menetap sehingga dapat berusaha dengan baik.



Sehingga dapat memberikan inovasi baru bagi suku terasing yang dimukimkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan mereka (Saragih, 2001: 138). Perubahan sosial adalah suatu proses terjadinya perubahan struktur atau perubahan fungsi suatu sistem sosial. Negara, lembaga kerja, marga, desa, dan keluarga masing-masing merupakan suatu satuan sistem sosial. Undang-undang baru, peraturan baru, gagasan baru, ataupun teknologi baru dapat menjadi kondisi terjadinya perubahan stuktur dan/ atau fungsi dari suatu sistem sosial. Status individu dan kelompok dalam suatu sistem sosial membantu menciptakan suatu struktur sosial. Peranan atau perbuatan-perbuatan anggota dari suatu sistem sosial membantu menciptakan suatu fungsi sosial (Muhadjir, 2001:14).

Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Perilaku. Pengertian tentang penyuluhan tidak sekedar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (*one way*) dan pasif. Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan “perilaku” (*behaviour*) yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/ pihak lain, baik secara langsung (berupa ucapan, tindakan, bahasa tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya) (Mardikanto, 2009:14).

Penyuluhan merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus, sekuat tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan (*beneficiaries*) (Mardikanto, 2009:14). Perubahan perilaku yang terjadi, tidak terbatas atau berhenti setelah masyarakat/ klien mengadopsi (menerima, menerapkan, mengikuti) informasi/ inovasi yang disampaikan, tetapi juga termasuk untuk selalu siap melakukan perubahan-perubahan terhadap inovasi yang sudah diyakininya, manakala ada informasi/ inovasi/ kebijakan baru yang lebih bermanfaat bagi perbaikan kesejahterannya. (Mardikanto, 2009:15). Pendekatan penyuluhan yang dilakukan adalah petani dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa (Abbas, dkk., 2007: 36)

Penyuluhan sebagai proses pendidikan orang dewasa. Pendidikan Orang Dewasa (POD) lebih mengacu pada pandangan bahwa individu (orang dewasa) dipandang mampu mengembangkan kesadarannya untuk memahami dan menguasai lingkungannya. Orang dewasa sebagai siswa dalam kegiatan belajar tidak dapat diperlakukan seperti anak-anak didik biasa yang sedang duduk di bangku sekolah tradisional. Oleh sebab itu, harus dipahami bahwa, orang dewasa yang tumbuh sebagai pribadi dan memiliki kematangan konsep diri bergerak dari ketergantungan seperti yang terjadi pada masa kanak-kanak menuju ke arah kemandirian atau pengarahan diri sendiri. Kematangan psikologi orang dewasa sebagai pribadi yang mampu mengarahkan diri sendiri ini mendorong timbulnya kebutuhan psikologi yang sangat dalam yaitu keinginan dipandang dan diperlakukan orang lain sebagai pribadi yang mengarahkan dirinya sendiri, bukan diarahkan, dipaksa dan dimanipulasi oleh orang lain. Dengan begitu apabila orang dewasa menghadapi situasi yang tidak memungkinkan dirinya menjadi dirinya sendiri maka dia akan merasa dirinya tertekan dan merasa tidak senang. Orang dewasa bukanlah anak kecil, maka pendidikan bagi orang dewasa tidak dapat disamakan dengan pendidikan anak sekolah. Perlu dipahami apa pendorong bagi orang dewasa belajar, apa hambatan yang dialaminya, apa yang diharapkannya, bagaimana ia dapat belajar paling baik dan sebagainya (Lunandi, 1987).

Pendidikan Orang Dewasa (POD) juga disebut sebagai pendidikan kritis atau pendidikan yang membebaskan karena yang dihadapi sebenarnya adalah masyarakat (orang dewasa) juga sebagai subyek itu sendiri. Freire (1970) dalam bukunya "*Pedagogy of the Oppressed*" menegaskan bahwa tugas teori sosial adalah *Conscientizaso* atau proses penyadaran terhadap sistem dan struktur yang menindas. Langkah awal yang paling menentukan dalam upaya pendidikan pembebasannya Freire yakni suatu proses yang terus menerus, suatu "*commencement*," yang selalu "mulai dan mulai lagi", maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang sehati (*inherent*) dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Maka, proses penyadaran merupakan proses inti atau hakekat dari proses pendidikan itu sendiri. Dunia kesadaran seseorang

memang tidak boleh berhenti, ia senantiasa harus berproses, berkembang dan meluas, dari tahap ke tahap berikutnya.

Asumsi-asumsi yang melandasi teori andragogi adalah bahwa: (1) orang dewasa mengarahkan tujuan belajarnya sendiri; (2) pengetahuan yang telah dimiliki merupakan sumber belajar untuk pembelajaran selanjutnya; (3) orang dewasa belajar setelah ia sendiri merasa ingin belajar dan kegiatan belajar merupakan kebutuhan hidupnya; (4) orang dewasa belajar karena mencari kompetensi untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi. Ada perbedaan mendasar mengenai asumsi yang digunakan oleh andragogi dan pedagogi terutama dari aspek konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar dan orientasi terhadap belajar (Knowles, 1975).

*Konsep Diri.* Dalam pendekatan pedagogi peranan peserta didik bergantung pada guru. Dalam hal ini guru diharapkan oleh masyarakat memegang tanggungjawab penuh untuk menentukan apa yang akan dipelajari oleh pada peserta didik, kapan waktunya belajar, bagaimana cara mempelajarinya, dan apakah suatu bahan telah selesai dipelajari atau belum. Sedangkan dalam pendekatan andragogi, proses pematangan manusia merupakan kewajiban bagi seorang individu untuk bergerak dari ketergantungan ke arah kemandirian. Perpindahan ini secara bertahap dan dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan orang dan dimensi kehidupannya. Para guru orang dewasa bertanggungjawab untuk menggalakkan dan memelihara gerakan ini. Orang dewasa mempunyai kebutuhan psikologis yang dalam untuk mandiri, meskipun dalam situasi-situasi tertentu bergantung pada pihak lain untuk diselesaikan. Konsep diri terbentuk dan dapat berubah karena interaksi dengan lingkungannya. Konsep diri merupakan penentu sikap individu dalam bertindak laku, artinya apabila individu cenderung berpikir akan berhasil, maka hal ini merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat individu menuju kesuksesan. Sebaliknya jika individu berpikir akan gagal, maka hal ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya.

*Aspek pengalaman.* Dalam pedagogi, peranan pengalaman yang dibawa peserta didik ke situasi belajar kurang bernilai, pengalaman sering hanya

digunakan sebagai titik tolak. Pengalaman yang akan menjadi sumber belajar yang utama bagi peserta didik adalah pengalaman para guru, penulis buku, dan para ahli atau penemu suatu ilmu, teori, teknologi. Sedangkan dalam andragogi, manusia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang menyimpan banyak pengalaman dan akan menjadi sumber yang tak habis-habisnya untuk belajar, baik untuk dirinya maupun orang lain. Pengalaman diri adalah kecakapan orang dewasa pada masa kini dengan berbagai situasi masa lalu. Implikasi praktis dalam pembelajaran, orang dewasa akan mampu berurung rembug berdasarkan pengalaman yang telah dimilikinya. Pengalaman biasa dapat dijadikan sumber yang kaya untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Orang dewasa mempelajari sesuatu yang baru cenderung dimaknai dengan menggunakan pengalaman lama. Sejalan dengan itu, peserta didik orang dewasa perlu dilibatkan sebagai sumber pembelajaran. Pengenalan dan penerapan konsep-konsep baru akan lebih mudah apabila berangkat dari pengalaman yang dimiliki orang dewasa.

Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dianggap lebih berarti daripada pengetahuan yang diperoleh secara pasif. Teknik pembelajaran yang digunakan adalah teknik pengalaman (eksperimen, laboratorium, diskusi, pemecahan persoalan, pengalaman lapangan dan sebagainya). Setiap orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda akibat kehidupan masa mudanya. Beberapa implikasi adanya perbedaan pengalaman orang dewasa dengan anak-anak dalam proses belajar: (1) lebih menekankan pada metode yang sifatnya memanfaatkan pengalaman mereka; (2) penekanan proses belajar pada aplikasi praktis; dan (3) penekanan dalam proses belajar ialah belajar dari pengalaman.

*Aspek Kesiapan Belajar.* Dalam pedagogi, anak didik dikatakan siap mempelajari apapun yang dikehendaki sekolah untuk mereka pelajari, asalkan tekanan ini cukup berat bagi mereka. Pelajaran diatur ke dalam suatu kurikulum yang baku, dengan suatu penjenjangan. Dalam andragogi, orang menjadi siap untuk mempelajari sesuatu bila mereka merasakan kebutuhan untuk mempelajarinya dengan tujuan agar dapat menyelesaikan tugas atau persoalan hidup mereka. Pendidik memegang tanggungjawab menciptakan kondisi dan

menyediakan alat-alat serta prosedur untuk membantu para peserta didik menemukan kebutuhan atau keingintahuan mereka. Dengan demikian program belajar hendaknya disusun menurut kategori penerapan hidup dan diurutkan sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik.

*Aspek Orientasi Terhadap Belajar.* Pada pedagogi, peserta didik melihat pendidikan sebagai suatu proses untuk memperoleh bahan pelajaran yang sebagian besar berguna di kemudian hari. Kurikulum seharusnya diatur menjadi satuan-satuan pelajaran yang mengikuti urutan logika mata pelajaran bersangkutan. Jadi orientasi mereka berpusat pada mata pelajaran. Sebaliknya dalam andragogi, para peserta didik memandang pendidikan sebagai suatu proses pengembangan kemampuan untuk mencapai potensi kehidupan yang paripurna. Mereka ingin dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan apapun yang mereka peroleh saat ini untuk kehidupan esok yang lebih efektif. Karena itu, pengalaman belajar seharusnya disusun menurut kategori-kategori pengembangan kemampuan sehingga orientasi mereka terhadap belajar berpusat pada karya atau prestasi.

Implikasinya dalam proses belajar orang dewasa adalah: (1) pengajar berperan sebagai pemberi bantuan kepada orang yang belajar; (2) kurikulum pendidikan berorientasikan kepada masalah; dan (3) pengalaman belajar yang dirancang berdasarkan masalah atau perhatian yang ada pada benak mereka. Berdasarkan asumsi dasar tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa: (1) orang dewasa mempunyai konsep diri, yaitu suatu pribadi yang tidak tergantung kepada orang lain yang mempunyai kemampuan mengarahkan dirinya sendiri dan kemampuan mengambil keputusan, (2) orang dewasa mempunyai kekayaan pengalaman yang merupakan sumber yang penting dalam belajar, (3) kesiapan belajar orang dewasa berorientasi kepada tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan peranan sosialnya, dan (4) orang dewasa mempunyai perspektif waktu dalam belajar, dalam arti secepatnya mengaplikasikan apa yang dipelajarinya.

Pendekatan POD menurut Knowles (1975) berasal dari asumsi-asumsi Humanistik. Perhatian dasar dari humanistik adalah "Manusia Seutuhnya (*Man in his Wholeness*)". Belajar adalah proses melibatkan diri dalam interaksi antara



dirinya sendiri dengan perkembangan diluar dirinya. Belajar adalah aktifitas psikologi normal yang tidak memerlukan tekanan dari luar atau dorongan. Dengan demikian, masalah dasar yang dihadapi pendidik orang dewasa adalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana memberi motivasi belajar orang dewasa dan bahan/materi semacam apa yang tidak menimbulkan salah motivasi. Pendidik dapat memacu belajar dengan menambah faktor eksternal positif yang mempengaruhi dan memperkuat belajar. *Kedua*, belajar terkait dengan seluruh kehidupan seseorang, sehingga belajar terjadi sepanjang kehidupan seseorang sebagai respons terhadap pengalaman untuk mendorong perkembangan lebih lanjut. Belajar pada masa lalu akan berpengaruh dan terintegrasi ke dalam belajar pada tahap sekarang. Inilah dasar yang melandasi orang dewasa belajar dengan penuh perhatian, pikiran dan seluruh tenaganya.

Dalam teori belajar humanistik proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal dari pada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang dapat kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk “memanusiakan manusia” (mencapai aktualisasi diri dan sebagainya) dapat tercapai.

Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. (Uno, 2006).

Manusia sebagai organisme yang memiliki dorongan untuk berkembang yang pada akhirnya menyebabkan ia sadar akan keberadaan dirinya. Perkembangan yang berlangsung tersebut kemudian membantu pembentukan konsep diri individu yang bersangkutan. Perasaan individu bahwa ia tidak mempunyai kemampuan yang ia miliki. Padahal segala keberhasilan banyak

bergantung kepada cara individu memandang kualitas kemampuan yang dimiliki. Pandangan dan sikap negatif terhadap kualitas kemampuan yang dimiliki mengakibatkan individu memandang seluruh tugas sebagai suatu hal yang sulit untuk diselesaikan. Sebaliknya pandangan positif terhadap kualitas kemampuan yang dimiliki mengakibatkan seseorang individu memandang seluruh tugas sebagai suatu hal yang mudah

Mardikanto, (2009:65) menyatakan bahwa proses belajar yang seharusnya berlangsung dalam kegiatan penyuluhan adalah proses pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan orang dewasa (*adult education/ andragogie*), yaitu proses belajar mengajar yang berlangsung secara lateral/horizontal, sebagai proses belajar bersama yang partisipatif di mana semua yang terlibat saling *sharing*/ bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Proses *sharing* tersebut, tidak hanya berlangsung antar peserta penyuluhan, tetapi juga antara penyuluh/ fasilitator dengan masyarakat yang menjadi kliennya. Kedudukan penyuluh tidak berada di atas atau lebih tinggi dibanding petaninya, melainkan dalam posisi yang sejajar.

Penyuluh pertanian harus selalu menyadari pentingnya peranannya dalam memainkan situasi belajar. Penyuluh pertanian tidak dapat menghindarkan dari situasi belajar. Hal tersebut karena peranan utamanya adalah sebagai pendidik orang dewasa (Saragih, 2001:73). Freire dalam Mardikanto (2009:298) menyatakan bahwa pendidikan (terutama pendidikan orang dewasa, penyuluhan) merupakan proses penyadaran menuju kepada pembebasan. Oleh sebab itu, proses pendidikan harus dibebaskan dari upaya-upaya menciptakan ketergantungan atau bentuk-bentuk penindasan “baru”. Artinya melalui pendidikan, penerima manfaat didik harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pengalaman dan mengembangkan daya nalarinya, sehingga di dalam proses pendidikan tersebut kedudukan pendidik dan yang dididik sama derajatnya.

Keberhasilan pendidikan tidak tergantung pada seberapa banyak materi yang diajarkan, atau seberapa jauh tingkat pemahaman warga terdidik terhadap materi yang diajarkan, tetapi lebih dicirikan pada seberapa jauh program

pendidikan tersebut mampu mengembangkan dialog antara pendidik dan yang dididik (Mardikanto, 2009: 298).

Beberapa syarat penting untuk dapat terjadinya proses belajar pada orang dewasa sekaligus sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan pertanian, antara lain:

1. Petani akan belajar dengan baik apabila mereka memang mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar. Keinginan muncul bila mereka percaya dengan belajar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi.
2. Petani akan belajar dengan baik apabila mereka mempunyai tujuan-tujuan yang jelas untuk apa mereka belajar.
3. Petani akan belajar dengan baik apabila mereka mempraktekkan segala apa yang sedang dipelajarinya. Belajar sambil bekerja akan melahirkan kepuasan pada diri petani karena sebagian kebutuhan dasarnya terpenuhi (Slamet, 2003:22)

Pendidikan terhadap orang dewasa tidak sebatas hanya bahasa tetapi juga teknologi. Orang desa itu tidak bodoh. Paling tidak orang desa memiliki pandangan yang lebih dalam mengenai hidup dan ini menjadi dasar yang membantu untuk menerima perubahan. Memang ia dapat menolak perubahan apalagi perubahan kecil-kecilan yang tidak membuahkan hasil. Maka agar berhasil, eksperimen harus berskala luas (Sumawinata, 1992:98).

### **Kedudukan Penyuluhan Dalam Pembangunan Pertanian**

Timmer (1983) menyebutkan kedudukan penyuluhan sebagai “perantara” atau jembatan penghubung, yaitu penghubung antara:

- 1) Teori dan praktek, terutama bagi kelompok sasaran (penerima manfaat) yang belum memahami “bahasa ilmu pengetahuan/teknologi”.
- 2) Pengalaman dan kebutuhan, yaitu antar dua kelompok yang setara seperti sesama praktisi, sesama tokoh masyarakat, dll.
- 3) Penguasa dan masyarakat, terutama menyangkut pemecahan masalah dan atau kebijakan-kebijakan pembangunan.
- 4) Produsen dan pelanggan, terutama menyangkut produk-produk (sarana produksi, mesin/ peralatan), dll.

- 5) Sumber informasi dan penggunaannya, terutama terhadap masyarakat yang relatif masih tertutup atau kurang memiliki aksesibilitas terhadap informasi.
- 6) Antar sesama *stakeholder* agribisnis, dalam pengembangan jejaring dan kemitraan kerja, terutama dalam pertukaran informasi.
- 7) Antara masyarakat (di dalam) dan “pihak luar”, kaitannya dengan kegiatan agribisnis dan atau pengembangan masyarakat dalam arti yang lebih luas (Mardikanto, 2009:25).

Pada hakikatnya penyuluhan merupakan suatu langkah dalam usaha mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. Penyuluhan diartikan sebagai wahana penyebarluasan hal-hal baru agar masyarakat mau tertarik dan berminat untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan juga merupakan kegiatan mendidik masyarakat, pemberi pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan baru agar mereka dapat membentuk sikap dan perilaku hidup menurut apa yang seharusnya (Nasution, 2002: 11).

Pembangunan pertanian pada dasarnya ialah karya manusia, artinya pembangunan pertanian secara filosofis yang menempatkan petani sebagai subyek. Karena itu pengembangan “kapasitas” manusia menjadi fokus perhatian yang bertumpu pada upaya membangun keberdayaan dan kemandirian petani (Abdul, 2001: 45). Penyuluh pertanian pada dasarnya merupakan aparat yang membangun pertanian, pendidik yang mengabdikan untuk kepentingan keluarga petani atau nelayan. Pekerjaan penyuluh pertanian tidak hanya mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan saja, tetapi juga memotivasi, membimbing dan memberikan dorongan untuk mengembangkan swadaya dan kemandiriannya berusahatani yang lebih menguntungkan sehingga hidup lebih bahagia dan sejahtera. Disini penyuluh pertanian merupakan agen pembangunan pertanian dan mitra dari keluarga petani dan nelayan. Penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada berlangsungnya perubahan yang menyangkut perilaku, kehidupan dan nasib petani. Sehingga seorang penyuluh

pertanian dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam membantu petani menolong dirinya sendiri untuk kehidupan yang lebih baik (Saragih, 2001: 90).

*Paradigma Lama Penyuluhan Pertanian.* Fasilitator selalu bertindak sebagai pembicara (yang di atas) dan Penerima manfaatnya hanya diminta sebagai pendengar (di bawah) yang setia. Cara ini dilakukan supaya masyarakat mau memperhatikan setiap inovasi dan melaksanakan perintah fasilitatornya (Mardikanto, 2010: 211). Pengalaman penyuluhan masa lalu menunjukkan adanya pasang surut. Pasang surutnya bila pendekatan *top down* lebih menonjol, sehingga petani sebagai pelaku utama pembangunan tidak bebas menentukan sendiri pengelolaan usahatani. Sehingga mereka kurang berswadaya dan mandiri (Abbas, dkk., 2007: 54).

Paradigma lama pertanian menyatakan bahwa pertanian primer adalah kegiatan ekonomi produksi yang mengawinkan sejumlah faktor produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu. Faktor produksi tersebut antara lain sumber daya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia (Sitorus, dkk., 2007: 312). Secara tidak sadar banyak orang mempersepsikan bahwa penyuluhan adalah alat atau usaha untuk meningkatkan produksi, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kesalahan ini harus dikoreksi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyuluhan pertanian harus menyadari kesalahan itu (Slamet, 2003: 58).

*Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian.* Program revitalisasi difokuskan pada beberapa sub program, yaitu penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan pengembangan kerjasama antara sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis (Sumardjo et al., 2010: 17).

Pola penyuluhan mengutamakan pendekatan pembangunan dari bawah yang menserasikan antara keinginan petani dengan para penguasa daerah serta disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan Pemerintah untuk menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi petani yang bersangkutan (Suryana, 1990: 259).



Acuan “dari rakyat” membuka perspektif baru, tidak saja bagi para praktisi tetapi juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi hal penting untuk dipahami di sini adalah, bahwa acuan “untuk rakyat.” Pengabaian hal yang pertama dapat membelokkan pola kegiatan dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang sama sekali bukan untuk rakyat (Rahardjo, 1988: xviii).

Paradigma yang memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses kehidupannya. Pembangunan ini berpusat pada rakyat dengan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat (Mardikanto, 2010: 28). Penyuluhan pertanian spesifik lokasi merupakan proses rekonstruksi belum sampai pada proses konstruksi, sehingga hasilnya masih potongan-potongan dan ide-ide pokok yang dapat digunakan untuk membangun penyuluhan pertanian ke depan (Puspadi, dkk., 2007: 68-69).

Paradigma baru pertanian asli terbentuk dari tiga unsur dasar yaitu benih, tanah, dan budaya. Ketiganya bersifat setara. Salah satu dari ketiganya tidak boleh bernilai nol, karena jika ada maka hasilnya menjadi nol juga. Artinya, tidak ada realisasi kegiatan pertanian, jika misalnya unsur budaya tidak ada, walaupun benih dan tanah tersedia. Perlu digaris bawahi bahwa unsur budayalah yang memberi bentuk atau pola pada interaksi unsur benih dan tanah. Saat ini, pola terbaru dari pertanian asli adalah pertanian organik (Sitorus, 2007: 315).

Paradigma baru penyuluhan pertanian menurut Slamet, (2003: 60), antara lain: (1) jasa informasi; (2) lokalitas; (3) berorientasi agribisnis; (4) pendekatan kelompok; (5) fokus pada kepentingan petani; (6) pendekatan humanistik-egaliter; (7) profesionalisme; (8) akuntabilitas; dan (9) memuaskan petani. *Pergeseran Paradigma Penyuluhan Pertanian Dalam Pembangunan*. Dasar evaluasi petani dalam pengambilan keputusan bukan hanya berasal dari diri sendiri tetapi juga dari strategi rekan-rekannya sehampan atau diluar hampan mereka. Variasi strategi di lapangan menjadi sarana utama petani dalam melakukan perbandingan. Perbandingan merupakan mekanisme penting dalam mengevaluasi, mengabsahkan, dan meningkatkan pengetahuan. Sikap petani terbentuk dari pengalaman melalui proses belajar, seperti proses belajar *conditioning klasik*,

proses belajar sosial, dan proses belajar menangani langsung (Abbas, dkk., 2007: 69-70).

Strategi Revolusi Hijau Lestari secara prinsip berbeda dengan strategi Revolusi Hijau generasi pertama. Hal-hal yang diabaikan pada Revolusi Hijau generasi pertama justru diperhatikan pada Revolusi Hijau Lestari. Perubahan strategi ini diartikan sebagai pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang diharapkan dapat merevitalisasi pedesaan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian dan ekonomi (M. Fagi, dkk., 2007: 239).

Paradigma pembangunan saat ini telah mengalami pergeseran. Dewasa ini paradigma pembangunan lebih menekankan pada pemberdayaan (*people centered development*), pembangunan berbasis sumberdaya lokal (*resource based development*), dan pembangunan kelembagaan (*institutional development*). Pembangunan dapat berjalan dengan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama, kebiasaan partisipatif, dan kerjasama (Abdul, 2001: 153). Berubahnya paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralistik menjadi desentralistik menjadikan daerah mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahannya sendiri termasuk dalam merestrukturisasi atau mereorganisasi suatu instansi/lembaga pemerintahan. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai dengan otonomi daerah yang menyangkut aspek-aspek perencanaan, kelembagaan, ketenagaan, program, manajemen dan pembiayaan menjadi kewenangan bersama Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Petani, dan Swasta. Hal ini memberi kewenangan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan lokalita, sedangkan Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pergeseran paradigma pembangunan muncul dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K). Pergeseran paradigma dimaksud menggantikan pendekatan *top down* dengan mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi

masyarakat, utamanya dalam kegiatan penyuluhan pertanian (Siata, dkk., 2012:225).

### **Peran Penyuluh Pertanian Pada Pembangunan Pertanian**

*Peran Penyuluh Sebagai Fasilitator.* Fasilitasi atau pendampingan yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh *client*-nya. Fungsi fasilitasi tidak harus selalu dapat mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan atau memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhan klien, tetapi seringkali justru hanya sebagai penengah/ mediator (Mardikanto, 2009:29). Fasilitator adalah seseorang yang membangkitkan motivasi dan rangsangan dengan memprakarsai pengenalan isu yang berkembang dan keinginan masyarakat, agar masyarakat bergerak, serta mempengaruhi mereka melalui *advis* dan petunjuk-petunjuk (Nasution, 2002: 130).

Sistem penyuluhan yang terkesan menggurui dengan menempatkan penyuluh sebagai pihak yang serba tahu tidak akan efektif. Pendekatan persuasif dengan menempatkan penyuluh sebagai fasilitator untuk mewujudkan keinginan masyarakat akan lebih berhasil (Ismail, 2000: 52). Fasilitator tidak hanya berperan dalam penyampaian inovasi dan membantu dalam proses pengambilan keputusan tetapi juga mengorganisasikan, memotivasi, dan menggerakkannya serta mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat (Mardikanto, 2010: 85).

Penyuluh sebagai fasilitator dituntut untuk selalu berusaha: (1) meningkatkan ketrampilan berkomunikasi, Bersikap positif, baik pada materi, saluran, dan mitra komunikasinya (sumber/ penerima manfaatnya); (2) mengembangkan pengetahuannya, terutama terkait materi atau inovasi yang akan disampaikan; dan (3) memahami, mengikuti, atau tidak menyinggung nilai-nilai sosial dan budaya penerima manfaat (Mardikanto, 2010: 39).

*Peran Penyuluh Sebagai Komunikator.* Komunikator adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan pesan, baik pesan pembangunan secara umum maupun pembangunan pertanian kepada komunikan agar dapat diterima dan dilaksanakan oleh komunikan dalam tugasnya sehari-hari (Soekartawi, 1988:12).

Pada tahap pengenalan dimana pemimpin organisasi mengetahui adanya inovasi yang mungkin dapat dikaitkan dengan kemajuan organisasinya, agen pembaru dapat membantu pemimpin itu dengan informasi-informasi yang berkenaan dengan ide baru itu. Mungkin pula justru agen pembarulah yang menjadi sumber informasi atau yang membawa inovasi itu kepada pemimpin. Atau mungkin pula pada tahap ini agen pembaru menginformasikan kondisi organisasi yang memerlukan adanya pembaruan. Misalnya sebuah pabrik perlu mengadakan pembaruan mesin produksi, karena yang ada sudah ketinggalan jaman dan tidak dapat lagi memenuhi permintaan pasar. Terdorong oleh kebutuhan itu pemimpin akan berusaha mencari tahu inovasi-inovasi (mesin-mesin baru) yang cocok untuk pabriknya

Penyuluhan pertanian memainkan peranan dalam membangun masyarakat desa yang dinamik, karenanya teknologi maju dapat sampai kepada petani dalam bentuk siap untuk diadopsi oleh petani. Selanjutnya peranannya sebagai penggalang sikap, motivasi dan kepemimpinan petani, serta pengungkap penemuan dan pengalaman petani atau anggota masyarakat lain yang berhasil mengembangkan karya unggul dalam berusahatani dan berorganisasi, menempatkan penyuluhan menjadi lembaga yang mendampingi petani dalam penampilannya sebagai subyek yang mandiri (Suryana, et al., 1990: 116). Semua orang yang bekerja untuk memelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial adalah termasuk agen-agen perubahan (Nasution, 2002: 128).

#### **4. Konsepsi dan Teori tentang Perubahan Sosial**

Menurut Zaltman dan Duncan (1977:10-12) semua perubahan dibedakan menjadi terencana dan tidak terencana. telah mengidentifikasikan dua dimensi tambahan untuk mengkategorisasikan perubahan sosial. Perubahan sosial dapat dikategorisasikan berdasarkan dimensi waktu dan tingkat sosial masyarakat yang menjadi sasaran perubahan sosial. Dimensi waktu dapat membedakannya menjadi jangka pendek yang relatif hanya beberapa hari atau bulan dan jangka panjang yang dapat beberapa bulan atau tahun. Dengan menggunakan dua dimensi tersebut

maka perubahan sosial dikaitkan dengan jangka waktu perubahan dan tingkatan sosial masyarakat, yakni:

Tabel 2.1. Type Perubahan Menurut Dimensi Waktu dan Tingkatan Sosial Masyarakat

Dimensi Waktu	Tingkatan Masyarakat		
	Individu	Kelompok	Organisasi/lembaga
Jangka Pendek	Type 1 Perubahan sikap Perubahan perilaku	Type 3 Perubahan normatif Perubahan administratif	Type 5 Invensi-inovasi Revolusi
Jangka Panjang	Type 2 Perubahan Siklus Hidup	Type 4 Perubahan Organisasi	Type 6 Evolusi sosial cultural

Sumber Data: Zaltman dan Duncan (1977:11)

Pada level mikro atau individu, dapat terjadi perubahan sikap atau perilaku dalam jangka pendek (tipe 1). Contoh untuk perubahan tipe 1 akan menjadi alat dalam melatih kepekaan untuk merubah sikap individu tentang bagaimana cara berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam hubungan interpersonal. Proses ini akan menjadikan seseorang atau sebuah kelompok untuk mencobanya selama satu atau dua minggu, dengan harapan bahwa dengan merubah sikapnya akan menjaga hubungan antar personal, dan menjadikan agar perilaku antar personal juga akan dirubah.

Sebuah contoh untuk perubahan jangka panjang pada level mikro (tipe 2) akan menjadi latihan dan proses sosialisasi rekrutmen baru sebuah lembaga. Sebagai contoh, ketika fasilitator memulai program pelatihannya, mereka mempelajari sikap dan perilaku yang baru yang mempengaruhi seluruh siklus hidupnya. Perilaku yang baru ini ditunjukkan selama kehidupannya pada waktu mereka mengembangkan orientasi baru yang menyeluruh terhadap masyarakat.

Pada level kelompok atau *intermediate* perubahan jangka pendek, dapat terjadi perubahan normatif maupun administratif (tipe 3). Perubahan normatif dapat muncul ketika sebuah kelompok merubah norma-normanya secara bertahap



dan bereksperimen dengan inovasi. Roger dan Shoemaker dalam Zaltman, 1977) menyatakan bahwa cara efektif bagi sebuah kelompok untuk mengadopsi sebuah praktik baru adalah dengan secara bertahap merubah norma dan nilainya. Strategi agen perubahan disini adalah dengan mengusahan agar kelompok menunda penilaiannya untuk beberapa periode terhadap kenyataan dan untuk bereksperimen dengannya. Sekali mereka mencobanya akan ditemukan bahwa hal tersebut berguna, dan harapannya, mereka akan mengembangkan sikap positif yang lebih permanen pada penerapannya.

Sebuah contoh perubahan jangka panjang (tipe 4) pada tingkatan kelompok akan terjadi ketika kelompok telah memutuskan untuk melembagakan perubahan yang sudah muncul. Pada tipe 4, perubahan terfokus pada struktur kelompok yang didalamnya menciptakan sebuah harapan peran pada sebagian anggota kelompok yang mendukung perubahan. Ketika sebuah peranan individu menginginkan agar dia membuat modifikasi pada peranannya, orang yang berada di sekitar individu baik yang diberikan oleh individu maupun sudah ada pada individu tersebut dalam menjalankan perannya lebih diinginkan untuk mendukung dan memaksa terjadinya perilaku perubahan.

Pada perubahan tingkat masyarakat atau makro, perubahan jangka pendek (tipe 5) seringkali dikarakterisasi oleh inovasi dan *invention*. Sebagai contoh, pengenalan program pengendalian kelahiran dan keluarga berencana diterapkan pada masyarakat yang dapat menerima, dapat mempercepat perubahan rata-rata tingkat kelahiran dan ukuran populasi. Dalam jangka waktu yang lama perubahan ini akan menghasilkan perubahan yang lebih besar pada struktur sosial masyarakat.

Percabangan perubahan jangka pendek adalah tipe 6 atau perubahan sosial budaya. Artinya, keberhasilan jangka pendek program pengendalian jumlah penduduk dapat dihasilkan dengan merubah struktur kedudukan partisipasi perempuan pada gerakan buruh, atau hal tersebut dapat mendukung proses modernisasi pada negara yang sedang berkembang.

Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu gejala umum yang berlaku di manapun selama hidup

manusia. Masyarakat sendiri selalu mengalami perubahan walaupun dalam taraf yang paling kecil sekalipun. Perubahan ini dapat berupa perubahan yang kecil sampai pada taraf perubahan yang besar yang mampu memberikan pengaruh yang besar bagi aktivitas perilaku manusia. Masyarakat awalnya bergerak dari masyarakat nomaden menuju masyarakat yang tinggal/menetap pada suatu wilayah tertentu.

Karl Marx pada dasarnya melihat perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang terus terjadi antara kelompok pemilik modal atau alat-alat produksi dengan kelompok pekerja. Dilain pihak Emile Durkheim melihat perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis, yang merubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik.

Sementara itu Max Weber melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan masyarakat Eropa yang sekian lama terbelenggu oleh nilai Katolikisme Ortodox, kemudian berkembang pesat kehidupan sosial ekonominya atas dorongan dari nilai Protestanisme yang dirasakan lebih rasional dan lebih sesuai dengan tuntutan kehidupan modern.

Perubahan menciptakan resiko, ketidakpastian serta biaya, baik biaya ekonomis maupun psikologis. Agar komitmen perubahan dapat ditumbuhkan, perlu dilahirkan visi bersama (*shared vision*) tentang bagaimana memperbaiki situasi dan tujuan bersama (*shared aim*) menuju masa depan. Jika dirasa satu cara tidak efektif, maka kita harus dapat memvisualisasikan cara yang lebih baik dan melahirkan langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan mendorong kemajuan menuju visi tersebut (Sulaksana, 2004:157).

Perubahan sosial adalah suatu proses terjadinya perubahan struktur atau perubahan fungsi suatu sistem sosial. Negara, lembaga kerja, marga, desa, dan keluarga masing-masing merupakan suatu satuan sistem sosial. Undang-undang baru, peraturan baru, gagasan baru, ataupun teknologi baru dapat menjadi kondisi

terjadinya perubahan stuktur dan/atau fungsi dari suatu sistem sosial. Status individu dan kelompok dalam suatu sistem sosial membantu menciptakan suatu struktur sosial. Peranan atau perbuatan-perbuatan anggota dari suatu sistem sosial membantu menciptakan suatu fungsi sosial (Muhadjir, 2001:14).

Proses perubahan sosial terdiri dari tiga tahap berurutan: (1) invensi yaitu proses dimana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan, (2) difusi, ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sisitem sosial, dan (3) konsekuensi yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengabdopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial (Hanafi, 1987:16).

Ada tujuh peranan seorang agen pembaru dalam memperkenalkan inovasi kepada kliennya, yaitu:

- 1) Membangkitkan kebutuhan untuk berubah. Agen pembaru bertindak sebagai katalisator (pembuka kran) bagi kebutuhan kliennya. Dalam memulai proses perubahan agen pembaru dapat mengemukakan alternatif-alternatif baru untuk mengatasi problem yang ada, mendramatisasi permasalahan mereka dan meyakinkan kliennya bahwa mereka dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Dia tidak hanya menaksir kebutuhan klien tetapi juga membantu timbulnya kebutuhan ini dengan cara konsultatif dan persuasif.
- 2) Mengadakan hubungan untuk berubah., Begitu kebutuhan untuk berubah telah tumbuh, agen pembaru harus membina keakraban dengan kliennya. Dia dapat meningkatkan keakraban itu dengan menciptakan kesan dapat dipercaya, jujur dan empati dengan kebutuhan dan masalah-masalah kliennya. Klien harus lebih dulu dapat menerima agen pembaru secara fisik dan sosial sebelum mereka diminta menerima inovasi yang dipromosikan.
- 3) Mendiagnosis masalah. Agen pembaru harus menganalisa situasi problematis kliennya untuk menentukan mengapa cara yang ada tidak lagi memnuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai/ memperoleh kesimpulan diagnostiknya, agen pembaru harus memahami situasi dari sudut pandangan

klien. Secara psikologis dia harus terjun ke dalam situasi klien agar dapat melihat dunia klien menurut pandangan klien itu sendiri.

- 4) Mendorong atau menciptakan motivasi untuk berubah pada diri klien. Setelah agen pembaru menggali berbagai jalan yang memungkinkan klien dapat mencapai tujuan mereka, dia harus membangkitkan motivasi untuk mengadakan perubahan, menimbulkan dorongan untuk menerima (atau setidaknya tidaknya menaruh minat) inovasi. Tetapi agen pembaru harus berorientasi pada kebutuhan klien.
- 5) Merencanakan tindakan pembaruan. Agen pembaru hendaknya berusaha mempromosikan pelaksanaan program pembaruan yang ia sarankan. Ini berarti klien diharapkan lebih dari sekedar menyetujui atau menaruh minat terhadap inovasi melainkan termasuk merencanakan pengadopsian dan tindakan-tindakan termasuk merencanakan tindakan-tindakan sebagai pelaksanaan pembaruan, menerima inovasi.
- 6) Memelihara program pembaruan dan mencegahnya dari kemacetan. Agen pembaru dapat menjaga penerimaan ide baru itu secara efektif dengan memberikan informasi atau pesan-pesan yang menunjang, sehingga klien merasa aman dan tetap “terasa segar” melaksanakan pembaruan itu. Bantuan semacam ini penting sekali diberikan terutama klien sedang dalam tahap percobaan sebelum mengambil keputusan dan tahap konfirmasi setelah keputusan diambil.
- 7) Mencapai hubungan terminal. Agen pembaru harus berusaha mengembangkan kemampuan klien untuk menjadikan dirinya sebagai agen pembaru (setidaknya untuk dirinya sendiri), yakni dapat mengenali dan memilih inovasi-inovasi yang cocok untuk kebutuhannya sendiri (Hanafi, 1987: 104).

Perubahan sosial terdiri dari dua macam yaitu perubahan *imanen* dan perubahan kontak. Perubahan *imanen* terjadi jika anggota sistem sosial menciptakan dan mengembangkan ide baru dengan sedikit atau tanpa pengaruh sama sekali dari pihak luar dan kemudian ide baru itu menyebar ke seluruh sistem sosial. Seorang petani di Iowa menemukan alat sederhana untuk pengumpul

jagung. Penemuan itu memudahkan pekerjaan dan tidak banyak memakan waktu, dalam waktu singkat banyak tetangga penemu itu yang menggunakan alat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan imanen adalah suatu gejala “dari dalam sistem”.

Perubahan kontak terjadi jika sumber dari luar sistem sosial memperkenalkan ide baru. Perubahan kontak adalah gejala “antar sistem”. Terdapat dua macam perubahan kontak, yaitu perubahan selektif dan perubahan kontak terarah. Perbedaan perubahan ini tergantung dari mana kita mengamati datangnya kebutuhan untuk berubah itu, dari dalamkah atau dari luar sistem (Hanafi, 1987:18-19).

Perubahan kontak selektif terjadi jika anggota sistem sosial terbuka pada pengaruh dari luar dan menerima atau menolak ide baru itu berdasarkan kebutuhan yang mereka rasakan sendiri. Tersajinya inovasi itu sendiri secara spontan atau kebetulan; penerima bebas memilih, menafsir atau menolak ide baru itu. Suatu ilustrasi mengenai perubahan kontak selektif ialah ketika para guru sekolah tertentu mengunjungi sekolah lain yang telah mengadopsi inovasi. Setelah mereka kembali ke sekolahnya sendiri, mungkin mereka menerapkan metode mengajar yang baru, tetapi tindakannya itu hanya dilakukan tanpa adanya paksaan atau kesengajaan dari kepala sekolah untuk mencari atau menerima inovasi itu. Perubahan kontak terarah atau perubahan terencana adalah perubahan yang disengaja dengan adanya orang luar atau sebagian anggota sistem yang bertindak sebagai agen pembaru yang secara intensif berusaha memperkenalkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga luar (Hanafi, 1987:19).

Perubahan sosial yang berlangsung secara mendadak dan tidak diperkirakan sebelumnya dan diikuti oleh lompatan mobilitas sosial vertikal secara tiba-tiba akan membawa berbagai beban kultural (*cultural burden*) pada yang mengalaminya, seperti ketika seorang anak petani secara tiba-tiba beralih status menjadi pegawai negeri. Begitu mengalami mobilitas sosial vertikal secara tiba-tiba seperti itu, beban kultural akan melekat padanya. Victor dalam Sairin mengemukakan bahwa masyarakat yang mengalami proses perpindahan seperti itu akan berada pada suatu fase yang disebut dengan istilah *liminality*. Dalam fase



ini, masyarakat yang mengalami perubahan sebenarnya belum beranjak dari status lamanya secara keseluruhan dan belum pula menginjak status barunya dengan seutuhnya. Mereka diibaratkan sedang berdiri di pintu gerbang, tidak berada dalam budaya lama dan tidak pula berada dalam budaya baru yang sedang dijejakinya (Sairin. 2002:205-206).

Tidak semua perubahan sosial adalah yang diharapkan dan tidak semua orang bertindak dalam keadaan terisolasi. Perubahan spontan yang dihasilkan individu, melahirkan gagasan tentang perubahan yang direncanakan dan konsep tindakan kolektif individu. Melalui konsep ini, agen perubahan menemukan wujud akhirnya dalam bentuk agen perubahan kolektif. Sebagian agen perubahan kolektif ini, bertindak berdasarkan perintah dari atas melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemerintah, badan legislatif, perusahaan, badan administrasi dan sebagainya. Sebagian lagi, bertindak dari bawah yang menimbulkan perubahan bertahap. Agen perubahan yang saling mempengaruhi dapat menyiapkan tahap politik masyarakat kontemporer (Sztompka, 1993:225-226).

Soemardjan (1981) mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya perubahan sosial dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah: (1) bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Masalah bertambah atau berkurangnya penduduk akan mempunyai pengaruh besar pada terjadinya perubahan sosial; (2) penemuan-penemuan budaya baru, baik berupa *discovery* (penemuan baru yang sebelumnya belum ditemukan, baik berupa fisik atau non fisik), maupun *Invention* (penemuan budaya baru yang telah diakui oleh masyarakat, penemuan ini umumnya dari suatu hasil penelitian ilmiah); (3) konflik atau pertentangan antar individu atau kelompok dalam masyarakat itu sendiri, dalam berbagai bidang kehidupan; dan (4) terjadinya pemberontakan atau revolusi didalam masyarakatnya. Sedangkan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial yang berasal dari luar (eksternal) masyarakat adalah: (1) terjadinya perubahan atau bencana alam dari lingkungan fisik, misalnya gempa bumi, banjir, tanah longsor, musim kemarau; (2) pengaruh kontak atau hubungan antar budaya masyarakat lain; dan (3) peperangan yang terjadi antar negara, akan mempengaruhi perubahan sosial pada masyarakat di negara lain.

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat adalah: (1) kontak sosial budaya dengan masyarakat luar, (2) sistem pendidikan masyarakat yang maju, (3) sikap mental menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju, (4) toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak menyangkut delik, (5) sistem lapisan masyarakat yang terbuka, (6) kondisi penduduk yang heterogen, (7) sikap mental tidak puas terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, (8) mentalitas berorientasi kedepan, (9) pandangan yang menilai upah harus sesuai dengan karyanya. Demikian juga paling tidak ada sembilan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial di masyarakat, yaitu: (1) kurangnya hubungan dan kontak budaya dengan masyarakat lain, (2) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat, (3) sikap mental masyarakat yang tradisionalistik, (4) sikap mental vested interest (adanya kepentingan tertentu yang tertanam kuat pada diri individu), (5) rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kelompok apabila ada perubahan, (6) sikap mental prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru atau asing, (7) adanya hambatan yang bersifat ideologis (tidak ingin maju), (8) sikap mental pasrah pada nasib, (9) sikap mental berorientasi pada masa lampau (Soekanto, 1999).

Berkaitan dengan bagaimana mengelola perubahan, agen perubahan merupakan *stakeholder* yang harus ditingkatkan keberdayaannya. Agen pembaharu seperti LSM, Ormas, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi lokal perpanjangan tangan pemerintah seperti posyandu, PKK, LMD, dan sebagainya merupakan organisasi yang dekat dan berhubungan langsung dengan komunitas yang akan diberdayakan. Agen pembaharu lebih memahami *social mapping* dalam masyarakat yang akan diberdayakan (Sulistiyani, 2004:114).

Teori agen perubahan memusatkan perhatian pada pertentangan antara tindakan dan struktur, serta mencoba menjembatani pemikiran yang telah dikembangkan dan diperkaya. Realitas sosial mulai dipahami sebagai sejenis koefisien agen. Teori agen perubahan dapat diringkas menjadi enam asumsi ontologis: (1) Masyarakat merupakan sebuah proses dan mengalami perubahan

terus-menerus; (2) Perubahan kebanyakan dari dalam, berbentuk transformasi dirinya sendiri; (3) Motor penggerak perubahan adalah kekuatan agen individual dan kolektif; (4) Arah, tujuan dan kecepatan perubahan dipertentangkan di kalangan agen dan menjadi medan konflik dan perjuangan; (5) Tindakan terjadi dalam suasana menghadapi struktur, tindakan ini menghasilkan kualitas dualitas struktur (yang membentuk dan yang dibentuk) dan dualitas kualitas aktor (yang menghasilkan maupun yang dihasilkan); dan (6) Pertukaran tindakan dan struktur terjadi secara pelan-pelan dengan cara menukar fase-fase kreativitas agen dan kemantapan struktur (Sztompka, 1993:234-235).

Terdapat dua kriteria cara agen perubahan dalam menggerakkan perubahan sosial. Kriteria pertama, perubahan berasal dari bawah, yakni melalui aktivitas yang dilakukan oleh massa rakyat biasa dengan derajat kebersamaan yang berbeda-beda. Perubahan lain mungkin berasal dari atas, melalui aktivitas elite yang berkuasa (penguasa, pemerintah, manajer, administrator, dan lain-lain) mampu memaksakan kehendaknya kepada anggota masyarakat yang lain. Kriteria kedua, perubahan mungkin diinginkan oleh agen yang dilaksanakan sebagai realisasi proyek yang mereka rencanakan sebelumnya. Perubahan lain mungkin muncul sebagai efek samping tak diharapkan, efek samping dari tindakan yang tujuannya sama sekali berlainan (Sztompka, 1993:323-324). Penelitian ini akan melihat lebih jauh peran Lembaga Swadaya Masyarakat (lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan) memainkan peran sebagai agen perubahan dalam penerapan program CSR.

Proses perkembangan dan pembangunan masyarakat bukan hanya semata-mata bersandar pada perubahan spontan yang berlangsung secara alami melainkan juga melalui perubahan yang diinduksi. Relevansi pemahaman proses perubahan dalam rangka pembangunan masyarakat melalui perubahan spontan dan perubahan yang diinduksi tersebut juga dapat dikembangkan dari dua asumsi dasar. Pertama, asumsi bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Kedua, asumsi yang menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat menghendaki agar kondisi yang akan datang lebih baik dibandingkan kondisi kehidupan sekarang dan masa lalu. Berdasarkan pemikiran ini, muncul anggapan bahwa

pembangunan masyarakat terutama yang dijalankan di negara-negara sedang berkembang merupakan suatu proses kelola perubahan sosial. Hal itu disebabkan karena pembangunan masyarakat dapat pula dianggap sebagai usaha sadar dan terencana untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akan lebih cenderung menuju kepada kondisi yang lebih baik (Soetomo, 2009:66-68).

Proses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat pada umumnya berlangsung secara: wajar (*naturally*), *gradual*, bertahap, evolusi, dan jarang terjadi secara radikal atau revolusioner. Proses perubahan sosial dapat meliputi:

1. Proses Reproduksi, yaitu proses mengulang-ulang, menghasilkan kembali segala hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyangnya, secara mentradisi. Warisan budaya ini dapat berbentuk fisik (peralatan) dan non fisik (kepercayaan).
2. Proses Transformasi, yaitu suatu proses penciptaan hal yang baru (*something new*) yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui suatu penelitian ilmiah, dalam hal ini yang banyak berubah adalah aspek budaya material, sedangkan yang bersifat non material (nilai) sulit berubah (Salim, 2002).

Terjadinya suatu perubahan sosial akan memunculkan dua kemungkinan perubahan yaitu : (1) perubahan sosial yang membawa kemajuan (*progress of change*), atau (2) perubahan sosial dapat membawa kemunduran kehidupan masyarakat (*regress of change*). Perubahan sosial apabila dilihat dari segi proses, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan secara evolusi atau secara revolusi, dan apabila dilihat dari segi dampaknya, maka ada perubahan yang berdampak besar dan berdampak kecil. Dampak perubahan ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) dampak perubahan pada aspek nilai dan norma yang berkembang di masyarakat, (2) dampak perubahan pada aspek struktur sosial, dan (3) dampak perubahan pada aspek fungsi kelembagaan.

Disamping kelima ruang lingkup kajian perubahan sosial di atas, ada tiga hal yang juga patut diperhatikan peneliti dalam mengkaji tentang perubahan sosial

yaitu : (1) harus memahami sumber-sumber penyebab terjadinya perubahan sosial, (2) harus memahami proses terjadinya perubahan sosial, dan (3) harus memahami dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perubahan sosial, baik yang merupakan akibat langsung (*out put*) maupun akibat tidak langsung (*out come*). Terdapat empat macam pendekatan dalam studi tentang perubahan sosial, yaitu:

Pertama, pendekatan sistem. Pendekatan Sistem, artinya suatu studi tentang perubahan sosial di masyarakat harus melihat bahwa, suatu masyarakat terdapat bagian-bagian dari sistem (sub sistem). Sub sistem itu terbagi dua, yaitu sub sistem didalam (*intern*) dan sub sistem diluar (*ekstern*). Sub sistem intern antara lain sumber daya alam, lembaga, nilai norma sosial yang berlaku dan penduduk. Sedangkan sub sistem *ekstern* adalah lingkungan ekonomi, politik, hukum, teknologi, dsb. Apabila menggunakan pendekatan sistem, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kajian tentang perubahan sosial yaitu: (a) bagaimana keterkaitan atau hubungan antar sub sistem (*intern*) dalam sistem sosial tersebut?; (b) bagaimana hubungan atau keterkaitan antar sub sistem luar (*ekstern*) dalam sistem tersebut?; (c) bagaimana ruang lingkup kajian perubahan sosial?. Satu hal yang perlu diingat dalam kajian perubahan sosial dengan pendekatan sistem adalah perlu dibatasi ruang lingkup kajian secara jelas, sebab sangat sulit apabila semua sub sistem baik intern maupun ekstern dikaji secara bersama-sama secara utuh.

Kedua, pendekatan model pengambilan keputusan. Apabila menggunakan pendekatan ini maka fokus kajian perubahan sosial adalah menyangkut: (a) bagaimana keputusan itu dapat menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang ada?; (b) bagaimana peran pelopor atau tokoh penggerak perubahan sosial atau mendorong terjadinya inovasi?; (c) bagaimana cara mengetahui respon anggota masyarakat terhadap perubahan sosial?.

Ketiga, pendekatan struktur dan sejarah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah adanya perubahan, dan bagaimana struktur sosial masyarakatnya. Dilihat dari pendekatan sejarah, Marx menawarkan perkembangan masyarakat dilihat dari dimensi tata cara produksi, yaitu dari tahap *Primitive Communism Mode of Production*



(PCMoP) sampai ke *Scientific Communism Mode of Production (SCMoP)*. Pandangan Marx ini dikenal dengan aliran *Historis Materialism*. Kematangan masyarakat Komunis, digambarkan oleh Karl Marx sebagai bentuk linear yang mengacu kepada hubungan “*mode of production*” (MoP) atau tata cara produksi, yang perkembangannya secara berurutan sebagai berikut: (1) *Primitive Communism Mode of Production (PCMoP)*, (2) *Ancient MoP*, (3) *Feodal MoP*, (4) *Borgeois MoP* dan tahap paling akhir adalah (5) *Scientific Communism MoP* (Masyarakat tidak berkelas/ sama rata sama rasa) (Salim, 2002).

Keempat, pendekatan mikro atau pendekatan makro. Pendekatan ini lebih menekankan dari aspek skala atau lingkup kajian terhadap realitas sosial. Pendekatan Mikro lebih menekankan pada kajian realitas sosial yang lingkupnya sangat kecil atau sempit, yaitu tentang pola pikiran dan perilaku individu dalam kelompok, misalnya: Proses pengambilan keputusan oleh para hakim dalam lembaga peradilan; Hubungan *face to face* antar anggota dalam kelompok; Berbagai gaya komunikasi verbal dan non verbal individu dalam kelompok; Pengaruh keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok terhadap pandangan dunianya. Pendekatan Makro lebih menekankan pada kajian realitas sosial yang lingkupnya sangat luas dan besar, yaitu mengkaji tentang struktur-struktur sosial dan pranata atau institusi sosial dalam masyarakat dan negara, misalnya kajian tentang sistem ekonomi masyarakat atau negara, sistem politik negara, sistem hukum, agama, mengkaji tentang jaringan kerja dunia dari berbagai masyarakat yang saling berinteraksi (Sanderson, 2000).

Pada dasarnya yang membedakan pendekatan sosiologi mikro dan makro hanyalah skala atau lingkup kajiannya, mikro lebih khusus pada skala interaksi individu dalam kelompok kecil, sedangkan makro skala kajiannya lebih luas dan besar. Oleh karena itu pendekatan mikro akan lebih menarik apabila digunakan untuk mendukung suatu kajian yang lebih luas (makro), dengan demikian, sebaiknya pendekatan mikro dan makro dalam kegiatan analisis kajian atas fenomena empirik tidak perlu dipertentangkan secara *deskrit* (Salim, 2002).

Pendekatan Mikro dan Makro menurut Ritzer dalam bukunya “*Modern Sociological Theory* (1996), masing-masing mempunyai lingkup obyektif dan

subyektif, yaitu: *Macroscope* (lingkup makro) terbagi dua yaitu: (a) Makro-Obyektif, contohnya: masyarakat, hukum, birokrasi, arsitektur, teknologi. (b) Makro-Subyektif, contohnya: budaya, nilai-nilai dan norma masyarakat. Sedangkan *Microscope* (lingkup mikro) juga terbagi dua yaitu: (a) Mikro-Obyektif, contohnya: pola perilaku individu, tindakan dan interaksi individu dalam kelompok, (b) Mikro-Subyektif, contohnya: persepsi, keyakinan atau kepercayaan dan beragam konstruksi pikiran individu atas realitas sosial. Menurut Ritzer keempat bagian pendekatan makro-mikro tersebut (*Macro-Obyective*, *Macro-Subyective*, *Mikro-Obyective*, *Micro-Subyektive*) saling berhubungan secara timbal balik (Salim, 2002)

Perubahan sosial yang terjadi terus-menerus tanpa kita rencanakan disebut *unplanned social change* (perubahan sosial yang tidak terencana). Perubahan sosial yang demikian disebabkan oleh perubahan dalam bidang teknologi atau globalisasi. Terdapat juga perubahan sosial yang direncanakan, didesain, ditetapkan tujuan dan strateginya. Inilah perubahan sosial yang disebut *planned social change* (perubahan sosial yang terencana). Perubahan sosial yang direncanakan ini disebut dengan berbagai istilah. Ada yang menyebutnya *social engineering* (rekayasa sosial), *social planning* (perencanaan sosial), atau *change management* (manajemen perubahan) (Rakhmat, 1999:45-46). Teori *planed social change* dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat perubahan yang terjadi dalam penerapan program CSR,

## 5. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu prinsip pengembangan masyarakat adalah *empowerment* atau pemberdayaan. Pemberdayaan berarti membantu komunitas dengan sumber daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas (Ife, 1995:182-183). Prinsip ini digunakan sebagai acuan peneliti di dalam melihat program pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berwujud CSR di dalam mengembangkan potensi lokal yang ada.

Menurut Ife (1995:61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan sebagai penguasaan klien atas: (1) pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup; (2) pendefinisian kebutuhan; (3) ide atau gagasan: kemampuan menyumbangkan gagasan; (4) lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat; (5) sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan; (6) aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa; (7) reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Secara konseptual *empowerment* berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol, dengan demikian kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pengertian kekuasaan yang tidak statis melainkan dinamis (Suharto, 2005:58). Berpijak dari teori ini, maka penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana kekuasaan itu dinamis dan berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini akan mendeskripsikan secara jelas dan melakukan pemetaan kelembagaan-kelembagaan lokal yang memegang peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soetomo (2011:71-88), pemberdayaan masyarakat yang merupakan derivasi dari perpektif *people centered development* merupakan anti tesis dari pendekatan pertumbuhan dalam pembangunan. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah: (1) sentralisasi menjadi desentralisasi; (2) *top down* menjadi *bottom up*; (3) *uniformity* menjadi variasi lokal; (4) sistem komando menjadi proses belajar; (5) ketergantungan menjadi keberlanjutan; (6)

*social exlusion* menjadi *social inclusion*; (7) *improvement* menjadi *transformation*.

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai: (1) upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu, (2) upaya untuk memberi daya atau kekuatan kepada masyarakat, dan (3) upaya membangun daya dengan mendorong, memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Mubiyarto, 1994:199; Kartasasmita, 1995:18; dan Gunawan Sumodinigrat,1997:165).

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat (untuk berpartisipasi, berbagi pengontrolan, dan mempengaruhi) kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:112-113).

Menurut Basoko, dkk (2008:1), aspek penting dalam suatu program pemberdayaan antara lain: (1) program yang disusun sendiri oleh masyarakat; (2) menjawab keperluan dasar masyarakat; (3) mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya; (4) dibangun dari sumber daya lokal; (5) sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat; (6) memperlihatkan dampak lingkungan; (7) tidak menciptakan ketergantungan; (8) berbagai pihak terkait saling terlibat; dan (9) berkelanjutan.

Pada konteks masyarakat marginal, yakni pada masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya difasilitasi agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, suatu lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi pelaku dan penentu kegiatan pembangunan. Usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan baik lokal maupun regional, bahkan semestinya menjadi titik tolak bagi program nasional.

Menurut Mukerji (1961:50), tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangun kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai anggota komunitasnya dengan cara mengembangkan pandangan yang progresif, kemandirian, dedikasi terhadap tujuan komunitas dan kerja sama. Sedangkan Sumaryadi (2005:115), menguraikan tujuan pemberdayaan masyarakat dalam dua hal, yakni: membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah dan (2) memberdayakan kelompok masyarakat lemah tersebut sehingga mereka mandiri.

Terdapat suatu istilah yang berkembang di masyarakat, yakni energi sosial budaya, atau lazim disebut sebagai energi sosial, yang merupakan suatu daya internal yang menunjukkan pada mekanisme dalam mengatasi masalahnya sendiri. Sayogyo (1994:154) memberikan batasan bahwa energi sosial tersebut bersumber pada tiga unsur, pertama, gagasan (*ideas*) yaitu buah pikiran progresif yang trampil dan dapat diterima bersama. Kedua, idaman (*ideals*) atau harapan bagi kepentingan bersama, yaitu wujud kesejahteraan bersama sebagai buah realisasi gagasan sebelumnya. Dalam hal ini berlaku suatu norma dasar “berbuatlah bagi orang lain sebagaimana orang lain berbuat bagimu”. Ketiga, persaudaraan (*friendship*) yaitu wujud solidaritas dalam suatu satuan sosial sebagai daya utama dalam proses mencapai idaman yang telah dikukuhkan. Energi sosial ini terwujud dalam ragam kelembagaan lokal dalam masyarakat. Lembaga di sini dipahami sebagai ‘pola perilaku yang matang’ berupa aktivitas-aktivitas, baik yang terorganisasi maupun yang tidak.

Sumodiningrat (1997:164) menyatakan bahwa keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Secara tersirat pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal.

Selanjutnya Usman (2015:58-66), memetakan empat elemen dalam pemberdayaan masyarakat, yakni: pertama, akses pada informasi, yakni



memberikan penjelasan berbagai kegiatan yang diintroduksi kepada masyarakat. Kedua, inklusi dan partisipasi. Inklusi adalah kondisi yang memungkinkan masyarakat melakukan interaksi sosial yang menembus batas wilayah, sektor, modernitas, kelas, status dan ideologi sedangkan partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan dalam melakukan perubahan. Ketiga, akuntabilitas, artinya berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan perubahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Keempat adalah kapasitas organisasi lokal, hal ini dikaitkan dengan kemauan dan kemampuan masyarakat bekerja bersama-sama, *organisme itself*, serta memobilisasi sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003:43). Pemberdayaan berarti membantu komunitas dengan sumber daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Pada tahun 1995, dalam Jakarta Declaration for the Advancement of Women in Asia and the Pasific terdapat Mission Statement Plan of Action dimana dinyatakan bahwa tujuan untuk mencapai kedudukan setara (equal status) perempuan sebagai peserta, pengambil keputusan dan penikmat dalam kehidupan politik, ekonomi, social dan budaya. Selain itu juga dinyatakan untuk memberdayakan (empower) wanita dan pria, perlu kerja sama sebagai mitra setara dan memberi inspirasi suatu generasi baru kaum wanita dan pria untuk bekerja sama demi kesetaraan, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian (Onny S Prijono, 1996).

Menurut Ife (1995) *empowerment* atau pemberdayaan adalah salah satu prinsip pengembangan masyarakat. Pemberdayaan berarti membantu komunitas dengan sumber daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas

komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomis tetapi juga nilai tambah sosial budaya (Korten dan Corner dalam Harry Hikmat, 2001).

Dalam mengkaji pemberdayaan, sebagian literatur mengakui pentingnya rumah tangga sebagai sumber utama pemberdayaan. Rumah tangga disini diartikan sebagai sekelompok penduduk yang hidup dibawah satu atap, makan dari panci yang sama dan bersama-sama terlibat dalam proses pembuatan keputusan sehari-hari (Pranarka V. M., 1996). Menurut Friedmann (1992), rumah tangga menempatkan tiga macam kekuatan, yaitu sosial, politik dan psikologis. Kekuatan sosial menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga, misalnya informasi, pengetahuan dan ketrampilan, partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber-sumber keuangan. Bila ekonomi rumah tangga tersebut meningkatkan aksesnya pada dasar-dasar produksi di atas, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuannya juga meningkat. Peningkatan kekuatan sosial dapat dimengerti sebagai suatu peningkatan akses rumah tangga terhadap dasar-dasar kekayaan produktif mereka.

Kekuatan politik, meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Kekuatan politik bukan hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga merupakan kekuatan untuk menjadi vokal dan bertindak secara kolektif. Pengaruh politik yang efektif akan tampak tidak hanya pada waktu suara-suara individu “meninggi” sebagai pengaruh dari partisipasi individu terhadap basis lokal maupun personal, melainkan juga pada saat suara tersebut didengungkan bersama-sama dengan suara asosiasi-asosiasi politik yang lebih luas, misalnya partai, gerakan sosial atau kelompok yang berkepentingan seperti kelompok petani atau buruh.

Kekuatan psikologis, digambarkan sebagai rasa potensi individu (individual sense of potency) yang menunjukkan perilaku percaya diri. Pemberdayaan psikologis seringkali tambak sebagai suatu keberhasilan dalam

domain sosial politi. Rasa potensi ribadi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif dan kursif terhadap perjuangan rumah tangga yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya.

Karl dalam (Pranarka V. M., 1996), memandang pemberdayaan wanita sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan *capasitas* (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara wanita dan pria. Masyarakat Samin menyimpan banyak potensi yang selama ini belum dikembangkan dan bahkan semakin terpinggirkan sejalan dengan kebijakan pembangunan selama ini. Pembangunan yang berpusat pada rakyat berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya Korten dan Corner dalam Harry Hikmat (2001) menyatakan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Lebih lanjut mereka mengemukakan tiga tema penting dalam perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu :

- 1) Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka.
- 2) Kedasaran bahwa kendatipun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.
- 3) Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Dengan mengacu tiga tema penting yang dikonsepsikan Korten dan Carner tadi, maka pembangunan yang berpusat pada rakyat ditempuh melalui strategi pemberdayaan secara mendasar berbeda jauh dari pendekatan-pendekatan

pembangunan lainnya. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Prinsip ini diterapkan baik secara formal maupun informal. Hal ini menunjukkan lebih dari sekedar membawa orang-orang menjadi bersama, tetapi melibatkan proses, mendorong orang-orang untuk bekerja sama, lebih bergantung satu sama lain dalam menyelesaikan sesuatu. Prinsip ini mencari cara di mana setiap orang dapat memberikan kontribusi dan menjadi dihargai oleh yang lain. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat mencakup penguatan interaksi sosial di tingkat komunitas, mengajak kebersamaan, menterjemahkan melalui dialog, pemahaman dan tindakan sosial. Pemberdayaan masyarakat membawa warga komunitas ke dalam kegiatan bersama, penyelesaian masalah bersama dan memperkuat interaksi yang bersifat formal dan informal.

Untuk itu tujuan pemberdayaan komunitas adalah membangun kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai anggota komunitasnya dengan cara mengembangkan pandangan yang progresif, kemandirian, dedikasi terhadap tujuan komunitas dan kerja sama (Mukerji, 1961). Lebih lanjut di dalam pemberdayaan masyarakat, strategi yang ditetapkan harus diarahkan kepada terwujudnya "*Pembangunan yang dikelola sendiri oleh masyarakat*" (*community managed development*). Namun di dalam penerapannya akan senantiasa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungannya.

Sejalan dengan itu maka pendekatan yang tepat di dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan di mana masyarakat yang menjadi sasaran selain dipandang sebagai kelompok manusia perlu dituntun ke arah jalan yang tepat, juga diberikan kesempatan yang luas untuk memikirkan dan merancang program pengembangan potensi mereka sendiri (Sjafri Sairin, 2002).

Dengan demikian di dalam program pemberdayaan masyarakat sudah tentu diupayakan suatu perubahan yang terencana. Perubahan terencana yang dimaksud disini adalah sebuah usaha yang dipertimbangkan dengan tujuan pada bagian agen perubahan untuk menciptakan modifikasi struktur dan proses sistem

sosial seperti yang diharapkan oleh anggota sistem tersebut agar dapat mempelajari kembali bagaimana mereka menjalankan peranannya (Bennis dalam Zaltman, 1977).

Ginjar Kartasmita dalam Gunawan Sumodiningrat (1997), menegaskan upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan. **Pertama**, menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. **Kedua**, memperkuat daya dan potensi yang dimiliki masyarakat. Ini berarti Masyarakat Samin diberikan akses untuk memanfaatkan peluang yang ada. **Ketiga**, memberdayakan mengandung arti pula melindungi.

Anwar W dan Haryadi (2004) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat, terutama yang miskin dan terpinggirkan, menuju keswadayaan dan kemandirian. Proses pemberdayaan bertumpu pada upaya penyadaran (*conscientization*), peningkatan kapasitas (*capacity building*) *self organization* akses kepada sumber daya serta pengembangan kemampuan advokasi, yang diharapkan secara bertahap mampu menginisiasi perubahan yang mendasar dalam tata kehidupan masyarakat. Buku ini menjadi inspirasi peneliti untuk melihat bagaimana fasilitator program CSR mengembangkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan program CSR.

Selanjutnya Freire (1985:18-20), seorang pakar pendidikan berkebangsaan Brasil memperkenalkan istilah konsientisasi (*conscientization*) dalam bukunya yang berjudul *Pedagogy of The Oppressed*. Proses konsientisasi diartikan sebagai proses pemberdayaan kolektif untuk menentang pemegang kekuasaan melalui kesadaran berpolitik. Konsientisasi merupakan proses pemaknaan situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan hubungan-hubungan politis, ekonomi dan sosial. Pendidikan kaum tertindas adalah sebuah perangkat agar mereka mengetahui secara kritis bahwa baik diri mereka sendiri maupun kaum



penindasnya adalah pengejawantahan dari dehumanisasi. Seseorang menganalisis sendiri masalah yang dihadapinya, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan skala prioritasnya dan memperoleh pengetahuan baru darinya. Konsientisasi merupakan sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang (*inner space*) yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Teori ini nanti akan menjadi pisau analisis di dalam menganalisis peran kelembagaan lokal yang ada.

Pemberdayaan masyarakat yang dalam kiprahnya berorientasi pada *collective self empowerment* mempunyai sasaran ganda, yakni: (1) peningkatan keswadayaan masyarakat untuk keluar dari belenggu rantai kemiskinan (*poverty circle*); (2) mendorong perubahan institusi dan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat yang dibarengi dengan *good governance* inilah yang diharapkan berperan strategis dalam menggempur kemiskinan struktural (Anwar W dan Haryadi, 2004). Berdasarkan rujukan buku ini, maka penelitian ini nanti akan mendeskripsikan secara detail bagaimana *performance* kelembagaan lokal menjadi elemen penting dalam mendesain model sinergisitas kelembagaan lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan dalam penerapan CSR.

Selain sebagai proses, pemberdayaan juga sebagai tujuan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005:60).

Selanjutnya Suharto (2005:67-68) memaparkan lima strategi di dalam melakukan pemberdayaan, yakni: pemungkinan; penguatan; perlindungan; penyokongan; dan pemeliharaan. Berdasarkan itu di dalam program pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan suatu perubahan yang terencana. Perubahan terencana yang terlihat disini adalah sebuah usaha yang dipertimbangkan dengan tujuan pada bagian agen perubahan untuk menciptakan

modifikasi struktur dan proses sistem sosial seperti yang diharapkan oleh anggota sistem tersebut agar dapat mempelajari kembali bagaimana mereka menjalankan peranannya (Bennis dalam Zaltman dan Duncan, 1977:19).

United Nations (1956), mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: (1) *getting to know the local community*; (2) *gathering knowledge about the local community*; (3) *identifying the local leaders*; (4) *stimulating the community to realize that it has problems*; (5) *helping people to discuss their problem*; (6) *helping people to identify their most pressing problems*; (7) *fostering self-confidence*; (8) *deciding on a program action*; (9) *recognition of strengths and resources*; (10) *helping people to continue to work on solving their problems*; dan (11) *increasing people's ability for self-help*.

Karsidi (2003:177-178) menandakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya petani, yakni: (1) pengembangan organisasi/kelompok-kelompok masyarakat dalam mendinamisir kegiatan produktif di masyarakat; (2) pengembangan jejaring strategis antar organisasi/kelompok; (3) kemampuan organisasi/kelompok dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pemberdayaan mereka; dan (4) pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial organisasi/kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Keempat aspek ini akan dijadikan sebagai dasar peneliti di dalam melihat keberdayaan peran kelembagaan lokal yang ada hubungannya dengan penerapan program CSR.

Selanjutnya tentang bagaimana caranya memberdayakan masyarakat, Kartasasmita (1996:159-160) mengemukakan tiga cara yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat. Pertama, adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*). Kedua, adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif dalam peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik seperti jaringan jalan, irigasi, listrik maupun sosial seperti fasilitas

pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran hasil produksi. Ketiga, adalah memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah agar tidak menjadi semakin lemah. Melindungi, juga diartikan dalam hal upaya untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang.

Prospek pembangunan ekonomi di masa depan semakin penuh masalah dan kendala yang merupakan tantangan dalam menuju ekonomi kerakyatan. Kondisi tersebut menuntut kebijakan dan strategi pengembangan yang untuk mengarah pada pencapaian efisiensi dan produktivitas seoptimal mungkin. Untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas tersebut diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja dan lahan. Sinergi itu dinamakan dengan istilah kemitraan.

Secara umum ada tujuh kebijaksanaan pokok didalam mengembangkan kemitraan dimasa mendatang: (1) kebijaksanaan ekonomi makro yang memberi ruang gerak kepada usaha besar untuk mengoptimalkan usahanya; (2) kebijaksanaan ekonomi makro yang berpihak kepada usaha kecil dan koperasi; (3) kebijaksanaan agribisnis dan agroindustri di pedesaan; (4) kebijaksanaan investasi dan permodalan; (5) kebijaksanaan membangun kelembagaan usaha kecil dan koperasi; (6) kebijaksanaan mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha besar dan kecil/koperasi; (7) kebijaksanaan menyusun, melahirkan dan membangun undang-undang dan peraturan yang mendukung kemitraan usaha (Hafsah,2003:163-168).

1. Kebijakan ekonomi makro yang memberi ruang gerak kepada usaha besar untuk mengoptimalkan usahanya.

Kebijaksanaan yang dimaksud disini adalah menciptakan iklim kondusif yang memudahkan pengusaha dapat mengembangkan usahanya sebesar-besarnya, seluas-luasnya dengan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan riil yang mendukung, memangkas biaya ekonomi tinggi, memberikan berbagai insentif sebagai perangsang dan imbalan yang setimpal bagi yang berprestasi

2. Kebijakan ekonomi makro yang berpihak kepada usaha kecil dan koperasi.

Kebijakan ini diharapkan akan memperlihatkan keberpihakan pemerintah kepada usaha kecil dan koperasi. Kebijakan yang dimaksud adalah bagaimana usaha kecil dan koperasi dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat menjadi usaha kecil yang tangguh dan kuat serta berkorporasi sehingga dapat menjadi kesatuan kekuatan ekonomi yang handal.

3. Kebijakan agribisnis dan agroindustri di pedesaan.

Dalam struktur perekonomian nasional, agribisnis memiliki jangkauan dan ruang gerak yang sangat luas, yaitu dari skala usahatani yang dikelola keluarga sampai dengan skala korporasi multinasional. Selain itu agribisnis, juga mencakup keterkaitan antara sektor pertanian dengan sector industri yang menangani pengorganisasian produksi hingga pendistribusian hasilnya (Adjid, 2001:45-48)

Menurut konsepnya, agribisnis adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tumbuhan dan hewan (komoditas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang berorientasi pasar (bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pengusaha sendiri) dan perolehan nilai tambah (Saragih, Bungaran., dkk., 1998:3)

Terdapat dua konsep pokok dalam agribisnis. *Pertama*, agribisnis merupakan konsep dari suatu *sistem yang integratif* dan terdiri dari beberapa sub-sistem, yaitu : (a) sub-sistem pengadaan sarana produksi pertanian; (b) sub-sistem budidaya usaha-tani; (c) sub-sistem pengolahan dan industri hasil pertanian (agroindustri); (d) sub-sistem pemasaran hasil pertanian, dan (e) sub-sistem kelembagaan penunjang kegiatan pertanian., yang terdiri dari: penelitian, penyuluhan, pembiayaan, konstruksi, trans-portasi, dan jasa lainnya. *Kedua*, agribisnis merupakan suatu konsep yang menempatkan kegiatan pertanian sebagai suatu kegiatan yang utuh dan komprehensif, sekaligus sebagai suatu konsep untuk dapat menelaah dan menjawab berbagai masalah tantangan, dan kendala yang dihadapi pembangunan pertanian sekaligus juga untuk dapat menilai keberhasilan

pembangunan pertanian serta pengaruhnya terhadap pemba-ngunan nasional secara lebih tepat. merupakan *off-farm agribusiness* (Kusnandar, 2010:16)

Menurut Austin (1992), agroindustri hasil pertanian mampu memberikan sumbangan yang sangat nyata bagi pembangunan di kebanyakan Negara berkembang karena empat alasan, yaitu: *Pertama*, agroindustri hasil pertanian adalah pintu untuk sektor pertanian. Agroindustri melakukan transformasi bahan mentah dari pertanian termasuk transformasi produk subsisten menjadi produk akhir untuk konsumen. *Kedua*, agroindustri hasil pertanian sebagai dasar sektor manufaktur. Transformasi penting lainnya dalam agroindustri kemudian terjadi karena permintaan terhadap makanan olahan semakin beragam seiring dengan pendapatan masyarakat dan urbanisasi yang meningkat. *Ketiga*, agroindustri pengolahan hasil pertanian menghasilkan komoditas ekspor penting. Produk agroindustri, termasuk produk dari proses sederhana seperti pengeringan, mendomonasi ekspor kebanyakan negara berkembang sehingga menambah perolehan devisa. *Keempat*, agroindustri pangan merupakan sumber penting nutrisi. Agroindustri dapat menghemat biaya dengan mengurangi kehilangan produksi pasca panen dan menjadikan mata rantai pemasaran bahan makanan juga dapat memberikan keuntungan nutrisi dan kesehatan dari makanan yang dipasok kalau pengolahan tersebut dirancang dengan baik.

#### 4. Kebijakan investasi dan permodalan

Investasi di sektor pertanian sebagian besar bersumber dari peran serta masyarakat baik badan usaha/pengusaha besar/swasta (berupa PMA, PMDN, non fasilitas) maupun masyarakat perorangan berupa usaha kecil, rumah tangga petani dan nelayan, atau usaha yang berbentuk badan hukum yang berupa perusahaan swasta, BUMN dan BUMD serta koperasi.

Dilihat dari aspek skala, sifat usaha dan karakter dari usaha kecil dan usaha besar yang berbeda, maka pola pengembangan investasi agribisnis untuk masing-masing kelompok usaha itu akan berbeda Untuk usaha kecil dan rumah tangga, beberapa usaha yang dikembangkan adalah: (a) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pertanian dalam memanfaatkan peluang



investasi dan melaksanakan usaha berorientasi agribisnis, antara lain melalui: pelatihan, penyuluhan, magang, temu usaha, inkubator, pendampingan dll; (b) meningkatkan aksesibilitas usaha agribisnis skala kecil terhadap peluang-peluang investasi beserta penunjangnya, seperti teknologi, modal, pelancar dll (Adjid, 2001:122).

#### 5. Kebijakan membangun kelembagaan usaha kecil dan koperasi

Fenomena yang terjadi pada usaha kecil adalah lemah dalam aspek kelembagaan permodalan, sumber daya manusia, teknologi, manajemen, akses pasar, sehingga usaha kecil tersebut rapuh tidak dapat bekerja efisien dan produknya tidak dapat memenuhi tiga”tas”, kualitas, kuantitas dan kuantitas sehingga sulit untuk bersaing dengan usaha lain baik besar maupun kecil dan termasuk sulit bermitra dengan usaha besar. Oleh karena itu perlu kebijakan membangun kelembagaan usaha kecil dan koperasi dalam mengatasi dan memecahkan masalah keterbatasan yang dimiliki oleh usaha kecil dan koperasi (Hafsah, 2003:167).

Konsep UMKM sangat berbeda dari suatu negara dengan negara lain. UMKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan dibina pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UMKM. Kementrian tersebut mengelompokkan UMKM menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset, total penjualan tahunan dan status usaha dengan kriteria sebagai berikut (Manurung, 2008:7-9).

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp 100 juta rupiah.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (b) usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Miliar; (c) usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar; dan (d) berbentuk usaha

yang dimiliki oleh orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (a) usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp 200 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; (b) usaha yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar; dan (c) berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Titik fokus konsep pemberdayaan adalah lokalitas, sebab *civil society* menurut Friedmann (1992:31) masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal, dengan tidak mengabaikan kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur di luar *civil society* tersebut. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar yang kuat secara nasional maupun internasional. Target dari konsep pemberdayaan ini adalah ingin mengubah kondisi yang serba sentralistik menjadi situasi yang lebih otonom dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri. Masyarakat miskin juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak luar.

Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi) demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Friedmann dalam hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokus dari pemberdayaan ini adalah aspek lokalitas, sebab *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Friedmann

mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society* diabaikan. Sedangkan proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui individu maupun kelompok, namun pemberdayaan melalui kelompok mempunyai keunggulan yang lebih baik, karena mereka dapat saling memberikan masukan satu sama lainnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

## **6. Dinamika Kelompok**

Masyarakat penerima program CSR yang tergabung dalam kelompok usaha ekonomi produktif ataupun kelompok tani secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha melalui pengelolaan usaha secara bersamaan. Kelompok-kelompok yang dibentuk sejalan dengan implementasi program CSR ini dapat dijadikan sebagai media belajar organisasi dan kerjasama antar pelaku usaha. Keberadaan kelompok, menjadikan para pelaku usaha dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi, teknis produksi dan pemasaran hasil.

Keberadaan kelompok sebagai wadah organisasi dan bekerja sama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. Melihat potensi tersebut, maka keberadaan kelompok-kelompok usaha masyarakat perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal.

Pentingnya pembinaan petani dan pelaku usaha ekonomi produktif dengan pendekatan kelompok tani juga dikemukakan oleh Mosher (1968) bahwa salah satu syarat pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kegiatan petani yang tergabung dalam kelompok tani. Mengembangkan kelompok tani adalah berarti membangun kemauan, dan kepercayaan pada diri sendiri agar dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan. Disamping itu agar mereka dapat bergerak secara metodis, berdayaguna, dan terorganisir. Suatu gerakan kelompok tani yang tidak

teroganisir dan tidak mengikuti kerjasama menurut pola-pola yang maju, tidak akan memecahkan problem-problem yang dihadapi petani.

Kriteria kelompok menurut Cartwright dan Zander (1968) adalah: (1) adanya interaksi untuk mencapai tujuan; (2) interaksi anggota menentukan individu sebagai anggota kelompok; dan (3) Interaksi individu ditentukan oleh anggota yang lain termasuk anggota kelompok lain. Selanjutnya kelompok sendiri memiliki ciri-ciri yang menurut Mardikanto (1996) dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) memiliki ikatan yang nyata; (2) memiliki interaksi dan interelasi sesama anggotanya; (3) memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas; (4) memiliki kaidah- kaidah atau norma tertentu yang disepakati bersama; dan (5) memiliki keinginan dan tujuan bersama. Selanjutnya menurut Hariadi (2011) kelompok dapat dipandang dari segi persepsi, motivasi, dan tujuan, interdependensi, dan juga dari segi interaksi. Berarti komunikasi kelompok adalah menyamakan suatu makna didalam suatu kelompok

Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani itu, antara lain diungkapkan oleh Torres (Wong, 1997) dalam Mardikanto (1996) sebagai berikut: (1) semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok; (2) semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani; (3) semakin cepatnya proses difusi penerapan inovasi atau teknologi baru; (4) semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang petani; (5) semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) atau produk yang dihasilkannya; (6) semakin dapat membantu efesiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri. Sedangkan alasan utama dibentuknya kelompok tani adalah: (1) untuk memanfaatkan secara lebih baik (optimal) semua sumber daya yang tersedia; (2) dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan; dan (3) adanya alasan ideologis yang “mewajibkan” para petani untuk terikat oleh suatu amanat suci yang harus mereka amalkan melalui kelompok taninya (Sajogyo, 1978 dalam Mardikanto, 1996).

Dinamika kelompok merupakan studi tentang interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain atau

keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis antar individu sebagai anggota kelompok dengan memiliki tujuan tertentu (Rusmana, 2005). Menurut Johnson dan Johnson dalam Andarwati, dkk (2012) dinamika kelompok merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku kelompok untuk kemajuan pengetahuan tentang sifat kelompok, perkembangan kelompok, interaksi diantara kelompok dan individu, antara kelompok dengan kelompok lain. Dinamika kelompok merupakan kumpulan dua individu atau lebih yang melakukan suatu interaksi antara satu dengan yang lainnya, dimana antar anggota kelompok akan saling mempengaruhi, dan keadaan kelompok dari waktu ke waktu sering berubah. (Zulkarnain, 2013).

Menurut Hariadi (2011) dinamika kelompok merupakan gerak kelompok karena kekuatan-kekuatan, baik yang terjadi di dalam maupun luar kelompok, saling mempengaruhi dalam proses mencapai tujuan kelompok. Menurut Lewin (Schultz & Schultz, 1992) menyatakan bahwa perilaku (B) orang merupakan fungsi dari person (P) itu sendiri dan lingkungannya (E) yang dirumuskan  $B = f(P, E)$ , kemudian Lewin mengaplikasikan pada kelompok yang selanjutnya dikenal teori dinamika kelompok.

Dikemukakan oleh Jetkins dalam Mardikanto (1993) bahwa dinamika kelompok merupakan kekuatan-kekuatan yang terdapat didalam kelompok yang akan menentukan perilaku anggota-anggota kelompok dan perilaku kelompok yang bersangkutan, untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok tersebut. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah sebagai berikut.

(a) Tujuan kelompok (*group goal*)

Tujuan kelompok merupakan gambaran tentang sesuatu hasil yang diharapkan dicapai oleh kelompok. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukan bermacam-macam usaha kelompok. Anggota kelompok berbuat sesuai tujuan kelompok karena kelompok mempunyai tujuan yang jelas dan anggota kelompok mengetahui arah kelompok. Akibatnya tujuan kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok menjadi kuat karena kegiatan anggota kelompok. Anggota



kelompok yang berorientasi kepada kelompoknya menggambarkan kesetiaan atas kelompok sehingga dengan tercapainya tujuan kelompok mengakibatkan masing-masing anggota kelompok merasa puas. Tujuan kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin lemah jika tujuan kelompok tidak mendukung tujuan anggota kelompok.

Tujuan kelompok harus mampu menunjang tercapainya tujuan individu anggota kelompok. Dinamika kelompok dapat menjadi kuat apabila tujuan kelompok sesuai dengan tujuan individu yang menjadi anggota kelompok tersebut. Begitupun sebaliknya, dinamika kelompok akan lemah apabila kelompok tidak mendukung atau tidak sesuai dengan tujuan anggota kelompok (Ismadi, 2012).

(b) Struktur kelompok (*group structure*)

Struktur kelompok yaitu hubungan antara individu-individu di dalam kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan peranan masing-masing individu. Kelompok yang telah memiliki struktur yaitu kelompok yang telah memiliki hubungan yang stabil antar anggota kelompok. Struktur kelompok berhubungan dengan struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan, tugas dan pembagian kerja. Struktur komunikasi dan bagaimana aliran komunikasi terjadi dalam kelompok serta sarana bagi kelompok untuk berinteraksi. Struktur kelompok sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin lemah jika pengambilan keputusan kelompok semakin didominasi oleh orang-orang tertentu. Struktur tugas semakin baik jika masing-masing anggota semakin terlibat dalam tugas-tugas kelompok. Semakin baik struktur tugas maka struktur kelompok semakin baik. Dalam struktur komunikasi, anggota semakin puas jika komunikasi di dalam kelompok lancar dan struktur kelompok menjadi kuat, sedangkan dalam proses interaksi, struktur kelompok semakin kuat jika semakin besar kemungkinan interaksi.

Struktur kelompok mengakibatkan dinamika kelompok kuat apabila pengambilan keputusan sesuai dengan persetujuan seluruh anggota kelompok. Hal tersebut berkaitan dengan pembagian struktur tugas kelompok dalam mencapai

tujuan. Kekuatan dinamika kelompok juga dipengaruhi oleh struktur tugas. Struktur tugas dapat menjadi baik apabila setiap individu anggota kelompok terlibat dalam pembagian tugas anggota. (Ismadi, 2012).

(c) Fungsi tugas (*task function of group*)

Fungsi tugas kelompok berkaitan dengan segala sesuatu yang wajib dikerjakan oleh anggota kelompok antara lain yakni penyebarluasan informasi, aturan yang jelas, koordinasi, komunikasi yang baik, serta kekompakan kepuasan anggota (Zulkarnain, 2012). Fungsi tugas adalah segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok sehingga tujuannya tercapai. Kriteria yang digunakan untuk melihat fungsi tugas adalah fungsi memberi informasi, fungsi memuaskan anggota, fungsi menyelenggarakan koordinasi, fungsi menghasilkan inisiasi, fungsi mengajak berperan serta dan fungsi menjelaskan. Fungsi memberi informasi adalah dengan kelancaran arus informasi menunjukkan fungsi tugas berjalan dengan baik sehingga fungsi tugas sebagai salah satu unsur dinamika kelompok semakin kuat. Semakin kuat fungsi memuaskan anggota, fungsi tugas, penyelenggaraan koordinasi, semakin tinggi tinggi fungsi inisiasi dan fungsi menjelaskan, maka dinamika kelompok semakin kuat.

Hariadi (2011), menguraikan fungsi kelompok tani sebagai berikut: pertama, kelompok tani sebagai kelas belajar-mengajar atau unit belajar, pengetahuan, artinya kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupannya lebih sejahtera. Kedua, kelompok tani sebagai wahana atau unit kerjasama. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antara kelompok serta pihak lain, melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ketiga, kelompok tani sebagai unit produksi, usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat

dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Hariadi (2011) yang menyatakan bahwa faktor yang sangat signifikan mempengaruhi keberhasilan fungsi kelompok tani adalah interaksi. Sementara untuk fungsi kerjasama dan pembelajaran selain dipengaruhi oleh interaksi juga dipengaruhi oleh kegiatan penyuluhan pertanian. Seperti yang disampaikan oleh Sumardjo (2012) fokus utama penyuluhan adalah pengembangan kapital manusia (*human capital*) sebagai bagian dari sistem sosial dan kelembagaan, sehingga menjadi modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat pertanian.

(d) Pembinaan dan pemeliharaan kelompok (*group building and maintenance*)

Pembinaan kelompok merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mempertahankan serta mengembangkan kelompok (Ismadi, 2012). Segala usaha guna mempertahankan maupun mengembangkan kelompok dapat dilakukan dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan kelompok, partisipasi dari seluruh anggota kelompok, kegiatan yang memungkinkan seluruh anggota berpartisipasi dalam menjalankannya, sosialisasi, serta menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan (Lestari, 2012).

Pembinaan kelompok dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan kehidupan kelompok. Usaha mempertahankan kelompok, adanya fasilitas dalam pelaksanaan pembinaan kelompok, adanya kegiatan kelompok, adanya kesempatan anggota baru, dan adanya sosialisasi sebagai proses pendidikan yang membuat anggota kelompok mengetahui norma, tujuan dan lain-lainnya di dalam kelompok. Apabila semua ciri tersebut ada dalam kelompok, maka pembinaan kelompok sebagai salah unsur dinamika kelompok semakin kuat.

(e) Kekompakan kelompok (*group unity*)

Menurut Kusai, (2013) Kekompakan kelompok merupakan rasa keterkaitan atau saling membutuhkan anggota terhadap kelompoknya. Kekompakan kelompok dapat meningkatkan potensi kelompok serta rasa saling

membutuhkan dan melengkapi pada anggotanya. Anggota kelompok yang mempunyai rasa kekompakan yang kuat akan lebih aktif dalam mencapai kelompok dibandingkan dengan anggota yang memiliki tingkat kekompakan yang lemah. (Ismadi, 2012). Semakin tinggi rasa kekompakan suatu kelompok maka akan semakin besar rasa keterkaitan, ketertiban dan loyalitas. Intensitas interaksi antar anggota akan semakin tinggi sehingga mempermudah pelaksanaan tugas dalam kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan (Zulkarnain, 2013).

Anggota kelompok yang tingkat kekompakannya tinggi lebih terangsang untuk aktif mencapai tujuan kelompok. Kekompakan kelompok yaitu keterikatan anggota kelompok terhadap kelompoknya. Tingkat rasa keterikatan yang berbeda-beda menyebabkan adanya perbedaan kekompakan. Faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok yaitu: kepemimpinan kelompok yang dapat menumbuhkan kebersamaan diantara anggota kelompok, anggota kelompok menunjukkan kemauan dan saling memiliki sehingga kelompok terasa sebagai milik bersama, anggota kelompok memiliki penilaian yang tinggi terhadap tujuan kelompok, rasa kesamaan diantara anggota kelompok dan jumlah anggota kelompok semakin sedikit.

(f) Suasana kelompok (*group atmosphere*)

Menurut Kusai (2013) suasana kelompok merupakan sikap maupun perasaan-perasaan yang terdapat dalam suatu kelompok. Suasana tersebut dapat berupa keramahtamahan sesama anggota, kesetiakawanan, suasana fisik, kebebasan berpendapat dan berkreasi. Suasana kelompok dapat mempengaruhi kedinamisan suatu kelompok apabila anggota kelompok semakin berhasrat untuk menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan kelompok (Lestari, 2011).

Kelompok sebagai suasana yang menentukan reaksi anggota terhadap kelompoknya. Suasana kelompok yang dimaksud yaitu rasa hangat dan setia kawan, rasa takut dan saling mencurigai, sikap saling menerima dan sebagainya. Kelompok yang menarik yaitu kelompok yang memiliki suasana dimana anggotanya merasa saling diterima dan dihargai. Demikian halnya jika suasana kelompok penuh rasa persahabatan maka kelompok menjadi menarik. Faktor yang

mempengaruhi suasana kelompok yaitu: hubungan antar anggota kelompok, kebebasan berperan serta dan lingkungan fisik.

(g) Tekanan kelompok (*group pressure*)

Tekanan kelompok adalah tekanan-tekanan dalam kelompok yang bertujuan membantu anggota kelompok memperkuat pendapatnya, menetapkan hubungan dengan lingkungan sosial, dan mempertahankan status dirinya sebagai anggota kelompok dengan demikian tidak menciptakan tekanan pada kelompok akan mendinamiskan kelompok (Lestari, 2011).

Tekanan pada kelompok ialah segala sesuatu yang menimbulkan ketegangan pada kelompok untuk menumbuhkan dorongan berbuat sesuatu dan tercapainya tujuan kelompok. Sistem penghargaan maupun hukuman bagi anggota kelompok merupakan salah satu tekanan kelompok. Memberi penghargaan kepada anggota kelompok yang berbuat baik dan menghukum anggota yang berbuat salah terhadap kelompok menimbulkan ketegangan psikologis sehingga mempengaruhi dorongan berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan kelompok.

(h) Keefektifan kelompok (*group effectiveness*)

Menurut Ismadi (2012) keefektifan kelompok merupakan keberhasilan kelompok dalam melaksanakan tugas-tugas dengan tepat serta memuaskan setiap anggotanya dalam rangka mencapai tujuan berikutnya. Keefektifan kelompok merupakan salah satu faktor kunci dalam dinamika kelompok. Menurut Sudjarwo (2011) keefektifan kelompok dapat dinilai berdasarkan keberhasilan anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok, semangat berpendapat dan berkreasi dalam mencapai tujuan, seberapa konsistennya kelompok dalam menghadapi tekanan dalam kelompok. Keberhasilan yang dicapai suatu kelompok merupakan hasil kerjasama anggotanya maka dari itu efektivitas kelompok juga dapat diukur dengan tercapainya tujuan kelompok serta perasaan setian anggota kelompok (Kusai, 2013).

Efektivitas kelompok mempunyai pengaruh timbal balik dengan kedinamisan kelompok. Kelompok yang dinamis meningkatkan efektivitas



kelompok, yang dapat dilihat dari segi produktivitas, moral dan kepuasan anggota. Tercapainya tujuan kelompok dapat dipakai untuk mengukur produktivitas kelompok. Semangat dan sikap anggota dipakai untuk mengukur moral anggota, misalnya anggota merasa bahagia dan bangga berada dalam kelompoknya. Keberhasilan anggota mencapai tujuan dipakai untuk mengukur kepuasan anggota.

(i) Rencana Terselubung

Rencana terselubung merupakan program tugas atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok namun tidak dinyatakan kepada khalayak dan secara formal. Sumber maksud terselubung dapat dari pemimpin kelompok, anggota kelompok, maupun berasal dari kelompok sendiri (Lestari, 2011). Menurut Mardikanto (1993) agenda atau maksud tersembunyi merupakan emosional berupa perasaan, konflik, motif, harapan, aspirasi, dan pandangan yang tidak diungkapkan yang dimiliki oleh anggota kelompok.

## 7. Lokal dan Global

Globalisasi sebagai fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses kehidupan manusia (Suneki, 2012). Menurut Maharsi (2000) dalam era bisnis global, pengaruh kemajuan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan lagi, seperti penggunaan telepon, faksimili, komputer, dan satelit dalam berbagai aktivitas sarana berkomunikasi perusahaan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk memperoleh informasi dari tempat yang berjauhan dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang murah.

Terbukanya pintu lebar yang diawali dengan kemunculan kemajuan di bidang teknologi transportasi dan informasi pada abad ke-18 dan 19, faktanya telah meloloskan ekspansi kekuatan negara-negara Eropa di luar negeri yang memberikan inovasi baru dalam membentuk globalisasi kultur yang menyatukan dan mengubah konteks kultur di berbagai wilayah di dunia (Held 2003, 31). Dalam teori Pieterse, salah satu konsep yang diusungnya yakni *cultural*

*hybridization* juga menunjukkan bahwa kultur di era globalisasi semakin tidak murni, pengaruh dalam kultur di dunia muncul dari lokal maupun global (Susanto 2013). Adanya arus kultur global ini, kaum globalis mengindikasikan munculnya *sense of global belonging* yang terbentuk akibat perubahan identitas nasional dan politik yang sekaligus menghapuskan kesetiaan terhadap *nation-state* sedikit demi sedikit. Hal itu secara pasti menunjukkan adanya krisis identitas yang terjadi dalam arus globalisasi (Susanto 2013).

Menurut Ritzer (2012) dalam Suyanto (2013) sebagai sebuah realitas sosial, globalisasi ini harus diakui adalah proses perubahan yang tidak terhindarkan, yang dengan sangat cepat merambah ke berbagai sendi kehidupan masyarakat di berbagai negara. Menurut Suyanto (2013) sebagai suatu proses hibridisasi yang unik, perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat adanya proses global sebetulnya terjadi hanya dipandang berlangsung di wilayah permukaan, sebab yang sesungguhnya terjadi adalah penyatuan proses global dan realitas lokal untuk memproduksi bentuk-bentuk hibrida baru yang khas dan heterogen.

Globalisasi menjadi fenomena luar biasa di era modern. Pembahasan globalisasi akan sangat berkaitan dengan fenomena glokalisasi. Globalisasi menjadi suatu proses yang dapat menciptakan homogenitas melalui persaingan yang dilaksanakan banyak negara. Keberadaan kapitalisme menjadi realisasi nyata keberadaan globalisasi. Globalisasi tidak selalu diartikan sebagai fenomena persaingan negatif yang menciptakan berbagai cara untuk dapat meraih modal dan keuntungan. Namun sebaliknya, keberadaan globalisasi dapat dijadikan sebagai alat bagi masyarakat Indonesia untuk menciptakan inovasi produk maupun gagasan yang dikemas untuk dapat dikenalkan di kancah internasional.

Menghubungkan global dan lokal kemudian menjadi tantangan besar bagi pengembangan masyarakat. Globalisasi yang berjalan saat ini dicirikan sebagai globalisasi 'dari atas'. Globalisasi ini memihak kepentingan kapitalis global dan bukan memihak kepentingan masyarakat bawah. Globalisasi yang menekankan pada ekonomi menafikan pranata sosial dan lingkungan yang telah eksis sejak dulu di masyarakat. Ini berarti bahwa banyak hal yang secara langsung

mempengaruhi kehidupan masyarakat tidak diakomodir. Hal ini tentu tidak demokratis dan partisipatif. Sebaliknya, demokratisasi terjadi pada globalisasi dari bawah yang menerapkan sebuah bentuk globalisasi yang demokratis dan partisipatif, yang selanjutnya disebut glokalisasi secara langsung bersentuhan dengan masyarakat termasuk keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial budaya, keadilan sosial dan hak asasi manusia serta keberlanjutan lingkungan yang memberdayakan potensi lokal yang ada di masyarakat untuk kepentingan bersama masyarakat.

Glokalisasi yang melibatkan interaksi kebudayaan lokal dan global menciptakan heterogenitas dalam kehidupan. Glokalisasi lahir untuk membendung budaya yang semakin homogen agar tidak masuk secara luas di masing-masing negara. Berdasarkan pemikiran kaum *postmodern*, glokalisasi memiliki dua sisi pengaruh timbal-balik antara budaya global dan budaya lokal, yaitu satu sisi kuatnya identitas budaya lokal (tradisi), sehingga budaya global tidak sampai menghilangkan budaya lokal, namun di sisi lain budaya global menyerap unsur budaya lokal. Munculnya fenomena glokalisasi di dalam masyarakat membuka pertarungan antara budaya lokal dan budaya global (kapitalis)

Glokalisasi menantang gagasan *imperialisme* budaya karena istilah menunjukkan proses negosiasi yang tampaknya mulai dari dalam ke luar yaitu, sebuah proses yang dimulai dengan menjunjung tinggi lokal (Maynard, 2003). Istilah “*glocal*” mengacu pada orang-orang, kelompok, divisi, unit, organisasi, dan masyarakat yang mau dan mampu “berpikir secara global dan bertindak secara lokal (Tien dan Talley, 2012). “Glokalisasi” diyakini pertama-tama muncul di akhir 1980-an, dalam sebuah artikel Harvard Business Review yang dilakukan oleh para sarjana Jepang, berasal dari kata Jepang “*dochakuka*” dan mengacu pada antarmuka dari global dan lokal (Matusitz, 2009 dalam Grigorescu dan Alexandra, 2017).

Glokalisasi juga dapat didefinisikan sebagai penggabungan dari kedua *Univerzalitation* dan *particularizing* kecenderungan (Eric, 2007 dalam Grigorescu dan Alexandra, 2017), dinamika antara homogenisasi budaya dan heterogenisasi

(Eric, 2007 dalam Grigorescu dan Alexandra, 2017) dan kooptasi dari global serta lokal (de Nuve, 2007 dalam Grigorescu dan Alexandra, 2017). Glokalisasi menekankan pada kekhususan dan rincian dari ide global, sedangkan globalisasi didasarkan pada kemahadiran proses perusahaan dan standarisasi di seluruh dunia (Kraidy, 2002 dalam Grigorescu dan Alexandra, 2017)

Kraidy (2002) Grigorescu dan Alexandra (2017), percaya bahwa glokalisasi perubahan norma dan praktek, menyesuaikan dengan pola pikir lokal, menyeimbangkan homogenisasi budaya dan heterogenisasi, standarisasi dan penyesuaian, konvergensi dan divergensi, universalisme dan partikularisme (Robertson, 1996 dalam Grigorescu dan Alexandra, 2017), menentang konsep globalisasi, yang *aims* menuju homogenizatio penuh; glokalisasi memadukan unsur lokal menjadi tema global, produk atau jasa.

Menurut John Stanley, direktur IBM-Eropa pemasaran dan layanan, seperti dikutip Peak dalam Maynard (2003), “glokalisasi” adalah di mana Anda melakukan bisnis, tapi bagaimana Anda melakukan bisnis. Dan “bagaimana” sering dianggap sebagai meshing antara perusahaan multinasional tamu dan tuan rumah perusahaan lokal. Glokalisasi memaksa masyarakat untuk mengevaluasi konsekuensi mereka untuk pembangunan daerah dan reposisi komunitas mereka dalam konteks global (Suutarinen, 2015).

Glokalisasi kadang-kadang dilaporkan reaksi terhadap globalisasi, atau penguatan identitas budaya di tingkat masyarakat setempat (Maynard, 2003). Robertson (1995) dalam Maynard (2003) melihat glokalisasi atau interpenetrasi global dan lokal, sebagai ciri masyarakat global. Konsep glokalisasi menawarkan cara untuk menghubungkan skala besar (makro) dan skala kecil (mikro) aspek dunia sosial. Mendekati interpenetrasi budaya dari perspektif glokalisasi memfasilitasi koneksi yang sering dikaburkan oleh asosiasi globalisasi semata-mata dengan makro-proses, seperti pasar dunia dan perusahaan multinasional.

Glokalisasi memberdayakan dan mendorong semua stakeholder untuk bekerja secara harmonis menuju masa depan yang berkelanjutan. Menurut Dumitrescu dan Vinerean (2010) dalam Grigorescu dan Alexandra (2017),

perbedaan globalisasi, lokalisasi dan glocalisasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Perbedaan Globalisasi, Lokalisasi dan Glocalisasi

Globalisasi	Lokalisasi	Glocalisasi
<p>Definisi: “kecenderungan ke arah integrasi internasional barang, teknologi, informasi, tenaga kerja, modal, atau proses pembutaan integrasi ini”</p>	<p>Definisi: “proses dari mengadaptasi produk atau layanan budaya, bahasa, dan mengembangkan daya tarik lokal dan memuaskan kebutuhan lokal”</p>	<p>Definisi: “memberikan tawaran global (merek, ide, produk, layanan, dan lain-lain), saat mengambil isu-isu yang berkaitan lokal.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan diferensiasi dan konvergensi dalam preferensi pelanggan dan pendapatan di negara-negara target dengan pembangunan ekonomi dan perdagangan</li> <li>• Memperhitungkan permintaan massa akun</li> <li>• Globalisme</li> <li>• Kuantitas</li> <li>• Kesadaran merek internasional</li> <li>• Manfaat biaya dari standarisasi</li> <li>• Penurunan biaya perdagangan dengan globalisasi yang lebih besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan diferensiasi dalam preferensi pelanggan dan pendapatan di negara-negara sasaran</li> <li>• Memperhitungkan permintaan khusus</li> <li>• Kepentingan daerah</li> <li>• Kualitas dan nilai-nilai</li> <li>• Pengenalan merek lokal</li> <li>• Persaingan dari kedua sukses</li> <li>• Produk dalam negeri dan merek internasional</li> <li>• Biaya tinggi perdagangan menciptakan pasar yang terpisah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan pengalaman global atau nama merek global dan membedakan tawaran dalam rangka untuk menarik pasar lokal</li> <li>• Beroperasi dalam pasar global dan ceruk pasar lokal</li> <li>• Mengintegrasikan kedua globalisme dan lokalisme</li> <li>• Mengintegrasikan kualitas dan nilai-nilai dalam suatu produk yang akan dijual dalam jumlah besar</li> <li>• Ketenaran tinggi dari merek</li> <li>• Sebuah produk atau layanan dapat menghadapi persaingan dari kedua merek lokal dan internasional dalam cara yang baik karena memenuhi kebutuhan lokal tertentu atau preferensi, dengan biaya lebih rendah karena tepi gobal perusahaan</li> </ul>

Sumber data: Dumitrescu dan Vinerean (2010) dalam Grigorescu dan Alexandra (2017),



Boyd (2006) dalam Patel dan Hayley (2013) menyatakan bahwa glocalisasi adalah penjelasan yang baik dari pencampuran dan menghubungkan konteks lokal dan global dengan tetap menjaga kontribusi signifikan dari komunitas budaya yang berbeda dan konteks. Istilah glocal dan glocalisasi tidak baru dan telah terutama dikaitkan dengan disiplin bisnis, teknologi, dan sosiologi. Glocalisasi terdiri dari dua proses: globalisasi dan lokalisasi. Sementara lokalisasi mengacu pada manusia, subyek individu, organisasi, masyarakat atau daerah, globalisasi mencakup proses planet. Glocalisasi sering diartikan sebagai 'berpikir secara global dan bertindak lokal', yang dianggap sebagai kemungkinan strategi yang tepat untuk masa depan pembangunan berkelanjutan dari seluruh planet.

#### (a) Glocalisasi Ekonomi

Glocalisasi telah digambarkan sebagai proses: “penciptaan produk atau jasa yang ditujukan untuk pasar global, namun disesuaikan dengan budaya lokal” (Firman Spy, 2002 dalam Maynard, 2003). Dari perspektif ekonomi, kita dapat mendengar hampir setiap hari tentang karakter bergolak dan bergejolak proses global; pada saat yang sama, mata pelajaran ekonomi konstitutif globalisasi dapat ditemukan di daerah tertentu. Perusahaan secara bersamaan sangat lokal dan intens global. Penurunan sisik peraturan kerja dan reproduksi sosial bertepatan dengan skala peningkatan dalam organisasi ekonomi dan kekuatan-kekuatan produksi (Swyngedouw, 1996 dalam Suchá ek, 2011). Glocalisasi juga cukup sering dianggap sebagai konsep yang sedang diadopsi oleh entitas ekonomi yang besar. Ini berarti menyesuaikan produk dan jasa perusahaan dalam rangka memenuhi kepentingan pasar lokal sangat dibedakan di seluruh dunia. Jadi, kepentingan berupa uang yang pasti salah satu kekuatan pendorong dari glocalisasi (Suchá ek, 2011).

Dalam arti pemasaran, glocalisasi berarti bahwa perusahaan harus berurusan tidak hanya dengan pertimbangan seluruh dunia, tetapi juga, sangat tegas, dengan aturan tertentu dan kondisi masing-masing negara di mana mereka beroperasi. Glocalisasi merupakan kebutuhan untuk perusahaan multinasional untuk menjadi global dan lokal pada saat yang sama. Sederhananya, sedangkan

globalisasi adalah langkah ke arah sentralisasi, glocalisasi adalah langkah menuju desentralisasi (Maynard, 2003).

(b) Glocalisasi Budaya

Maynard dan Tian (2004) dalam Grigoreescu dan Alexandra (2017) mendefinisikan glocalisasi sebagai “kemampuan suatu budaya, ketika bertemu budaya kuat lainnya, untuk menyerap pengaruh yang cocok alami ke dalam dan dapat memperkaya budaya, untuk menolak untuk hal-hal yang benar-benar asing, dan untuk kotakkan hal-hal yang, sementara yang berbeda, dapat tetap dinikmati dan dirayakan sebagai yang berbeda”.

Glocalisasi yang berlangsung dampak pedagogis belajar di luar *relativisme* budaya dan bergerak dialog menuju tingkat yang lebih dalam keterlibatan menghormati antar budaya. Glocalisasi juga menolak *sukuisme* yang telah lama dipromosikan pandangan dunia dominan menilai komunitas budaya lain melalui paroki, lensa berwarna dari sudut pandang budaya sendiri (Park, 2011 dalam Patel dan Hayley, 2013). Glocalisasi mengakui, menghargai, dan merangkul keaslian budaya berdasarkan apa yang dapat diterima dan dihargai dalam budaya (Patel dan Hayley, 2013).

*Etnosentrisme* didefinisikan sebagai kecenderungan yang kuat untuk menggunakan standar kelompok sendiri seseorang sebagai standar saat melihat kelompok lain, untuk menempatkan satu kelompok di puncak hirarki dan untuk peringkat semua orang lain sebagai lebih rendah (Berry *et al*, 2002 dalam Patel dan Hayley, 2013). Berbeda dengan norma-norma *etnosentris* yang mendukung pandangan dunia yang dominan, glocalisasi merangkul pandangan dunia Multiperspektif yang berfokus pada kontribusi positif dan atribut menguntungkan budaya yang berpartisipasi, tanpa pengenaan dan ancaman terhadap nilai-nilai dan keyakinan budaya. Glocalisasi mengakui, menghargai, dan merangkul keaslian budaya berdasarkan apa yang dapat diterima dan dihargai dalam budaya (Patel dan Hayley, 2013).

## 8. Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Berawal dari *Earth Summit di Rio de Janeiro* Brazilia tahun 1992 dan program ekonomi berkelanjutan di Yohannesburg tahun 2002, hubungan perusahaan dengan obyek diluar industri mulai mengalami pergeseran, dimulai dengan *Corporate Relation* yang berkembang menjadi *Community Development* dan *Corporate Social Responsibility*. Program *Corporate Social Responsibility*, selain bermanfaat untuk masyarakat juga bermanfaat dalam membentuk citra perusahaan di dalam membangun kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan.

Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan, bila dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya, yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disingkat CSR. CSR juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup (*triple bottom line*) (Ambadar, 2008:32).

Secara etimologis, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi. Istilah lainnya, yaitu *Business Social Responsibility* dan *Corporate Citizenship*. Pada istilah *Corporate Citizenship*, perseroan dipersamakan sebagaimana layaknya manusia yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Abstraksi nilai-nilai inilah yang kemudian diangkat pada tingkat korporasi. Dengan demikian, perseroan dihadapkan juga pada berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, agar kehidupan perusahaan/korporasi dan manusia-manusia yang terkait dan terlibat di dalamnya dapat terus berlanjut (Widjaja dan Pratama, 2008:7-8).

*The World Business Council for sustainable Development* (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara memberikan definisi CSR

sebagai *"continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large"*. Maksudnya adalah komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan.

Secara umum CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan, maksudnya adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain) (Rudito dan Famiola, 2007:207).

Terdapat suatu hal yang menarik yang berkembang di kalangan dunia usaha, yakni di dalam melaksanakan berbagai aktivitas tidak semata-mata diorientasikan kepada upaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung, tetapi juga diorientasikan dalam rangka kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial. Bahkan dalam batas tertentu, usaha yang berorientasi pada kepedulian dan tanggung jawab sosial tersebut dirasakan sebagai bagian dari implementasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk dunia usaha. Namun, banyak juga perusahaan yang baru tergerak untuk melakukan aktivitas yang berorientasi kepedulian sosial ini setelah mendapat tekanan dari berbagai elemen masyarakat (Soetomo, 2006:115-116).

CSR menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan, bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga komunitas yang berada di sekelilingnya. Artinya, telah terjadi pergeseran

hubungan antar korporat dan komunitas. Korporat yang sebelumnya memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *phylanthropy*, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat (Rahman, 2009:5).

Peningkatan peran serta komunitas dalam kegiatan perusahaan atau paling tidak untuk menjaga kemunculan ketidaksetaraan sosial ekonomi komunitas dengan perusahaan atau dengan pendaatang lainnya, diperlukan suatu cara untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah program yang berguna untuk menciptakan kemandirian komunitas lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri, maka diciptakan suatu wadah yang berbasis pada komunitas yang sering disebut sebagai *community development*. Tujuannya untuk pemberdayaan komunitas (*empowerment*), bagaimana anggota komunitas dapat mengaktualisasikan diri mereka dalam pengelolaan lingkungan yang ada di sekitarnya dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian, pranata sosial yang sudah ada sebelumnya, dapat berjalan tanpa adanya ketergantungan dari pihak perusahaan dan sekaligus perusahaan dapat menjadi bagian dari komunitas yang bersangkutan dimana perusahaan tersebut berada (Rudito dan Famiola, 2007:236).

Meskipun belum dapat ditemukan keseragaman menyeluruh mengenai perwujudan pelaksanaan CSR, arah dan tujuan CSR sudah memperoleh bentuknya. Tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri. CSR terkait dengan *sustainability* dan *acceptability*. Hal ini sebagai keinginan sebuah perusahaan supaya usahanya dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. CSR juga dilihat dalam lingkup *stakeholders* atau lingkungan dimana suatu usaha berada. Walaupun keberhasilan implementasi CSR kebanyakan diukur dari sudut seberapa besar uang yang dikeluarkan, namun disisi lain ada nilai *intangible* yang sangat penting. tidak dapat dinilai dengan uang. Nilai *intangible*, yaitu sampai sejauh mana perusahaan aktif dan proaktif dengan lingkungan (Untung, 2008:9-10).



CSR terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang dikaitkan dengan masalah keterbukaan (*disclosure*), transparansi dan akuntabilitas, masalah hak asasi manusia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, perlindungan terhadap hak-hak konsumen, isu mengenai lingkungan hidup yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya, serta keterlibatan masyarakat secara langsung bagi jalannya usaha perusahaan (*community development and involvement*) (Widjaja dan Pratama, 2008:41-42).

CSR dipahami sebagai upaya untuk tunduk dan memenuhi hukum dan aturan main yang ada. Dunia usaha tidak bertanggung jawab untuk memahami “apa yang ada” disekitar aturan tersebut. Dalam pengertian luas, CSR dipahami sebagai konsep yang lebih “manusiawi” dimana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral (Nursahid, 2006). Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis harus menjunjung tinggi moralitas. Filsafat moral itu penting, bahwa cara orang bertindak dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai apa yang baik dan yang jahat (Teichan, 1998:3)

Saidi dan Abidin (2004), menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda dalam melihat CSR. Pertama adalah *corporate charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan. Tahap kedua adalah *corporate philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk mendorong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

Walaupun tidak ada unsur eksploitasi, pemberian bantuan suatu perusahaan kepada masyarakat dalam rangka program CSR dengan pendekatan yang bersifat karikatif, tidak dapat disebut pemberdayaan. Hal itu disebabkan karena dapat menimbulkan kesan memanjakan masyarakat, sehingga kurang mendidik dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ironisnya, pendekatan seperti itu sering dianggap sebagai cara yang lebih baik dan tidak merepotkan bagi perusahaan yang melakukan program CSR dan bagi masyarakat penerima. Bagi perusahaan cara seperti itu dianggap lebih mudah dan tidak membutuhkan petugas

yang profesional di bidang pembangunan masyarakat. Sementara bagi masyarakat justru lebih memberikan kesan bahwa perusahaan tidak mempersulit pemberian bantuan, karena baik masyarakat maupun perusahaan kurang berorientasi pada upaya yang bersifat pengembangan kapasitas yang menjadi salah satu unsur penting dari pemberdayaan. Pengembangan kapasitas membutuhkan proses yang lebih panjang, serta tenaga pendamping profesional, sehingga bagi pengusaha terkesan menambah beban dan bagi masyarakat terkesan mempersulit pemberian bantuan (Soetomo, 2009:420-421).

Tahap kedua adalah *corporate philanthropy*, hal ini dapat dilihat bagaimana dunia usaha melakukan berbagai kegiatan misalnya pemberian beasiswa pada anak tidak mampu, memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sekitar perusahaan secara gratis, memberikan sumbangan pembangunan sarana jalan, air bersih, untuk memperbaiki infrastruktur di sekitar perusahaan serta memberikan bingkisan hadiah pada momen-momen tertentu sesuai dengan konteks di wilayah setempat. Ini semua dilakukan oleh dunia usaha sekedar menjalin hubungan kemasyarakatan. Semua ini di dorong atas azas kepatutan bukan didorong atas *profit sharing*. Dengan kata lain perusahaan memberikan sumbangan/dana ke masyarakat sekitar bukan didasarkan atas pembagian keuntungan namun berdasarkan prinsip-prinsip hidup bertetangga.

Tujuan kegiatan *philanthropy* adalah kegiatan yang bersifat amal (*charity*). Sebuah kegiatan amal tidak memerlukan komitmen berkelanjutan dari perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap sebuah kegiatan *philanthropy* berakhir bersamaan dengan berakhirnya kegiatan amal yang dilakukan perusahaan tersebut. Apabila dalam kegiatan *philanthropy*, setelah sejumlah uang disumbangkan atau suatu kegiatan dilakukan perusahaan tidak memiliki tanggung jawab lagi, maka dalam melakukan CSR, komitmen dan tanggung jawab perusahaan dibuktikan dengan adanya keterlibatan langsung dan kontinuitas perusahaan dalam setiap kegiatan CSR yang dilakukan. Keterlibatan langsung dan kegiatan kontinuitas inilah yang menjadi ciri dari CSR (Widjaja dan Pratama, 2008:20-21).

Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, Menurut Hopkins (Hasan, 2015:69) *corporate citizenship* menyiratkan adanya strategi yang mengubah fokus

transaksi jangka pendek menjadi jangka panjang, berbasis nilai dengan menjamin hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari peran perusahaan atau dunia usaha ikut bertanggung jawab dalam mensejahterakan bangsa, dengan memberikan berbagai fasilitas dalam pelatihan-pelatihan, memberikan pembinaan, akses modal maupun akses pasar kepada usaha kecil, membuka kemitraan dengan usaha kecil serta memfasilitasi *capacity building* usaha kecil. Hal ini berarti perusahaan sudah mengalokasikan dana secara terprogram dalam setiap periode penyusunan anggaran. Selain itu, juga dicirikan adanya divisi khusus yang menangani masalah tersebut, karena hal tersebut sudah menyatu dengan visi dan misi perusahaan. Perusahaan sadar bahwa, berkembangnya perusahaan atas kehadiran masyarakat, oleh karenanya mereka harus peduli terhadap masyarakat.

*Corporate citizenship* dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha agar lebih etis dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya yang mencakup hak dan kewajiban korporasi sebagai bagian dari warga negara yang baik (Hasan, dan Devy, 2015:71). Oleh karena itu supaya perusahaan menerapkan program CSR yang didasarkan kesadaran dari pihak perusahaan sendiri diperlukan adanya partisipasi dari *stakeholder*. Partisipasi tersebut dapat ditunjukkan dalam berbagai hal sesuai dengan institusinya.

Sebagai strategi bisnis, pelaksanaan CSR bertujuan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik dan meminimalisir risiko yang muncul dari komunitas sekitar maupun dari lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan bisnisnya. Strategi bisnis ini dilaksanakan dengan memperhatikan *sustainability* dari perusahaan, lingkungan dan sosial. Artinya, dalam pelaksanaan CSR ada tiga hal yang harus sama-sama untung yaitu perusahaan, lingkungan dan sosial. *Sustainability* ketiga hal ini akan sangat berpengaruh pada eksistensi perusahaan dan oleh karena itu diperlukan tanggung jawab sosial perusahaan agar baik perusahaan, lingkungan maupun sosial dapat berjalan secara sinergis (Widjaja dan Pratama, 2008:88).

Alasan penting sebuah korporat melakukan program *community development*, yakni izin lokal, mengatur dan menciptakan strategi ke depan, serta

sebagai cara untuk mencapai tujuan bersama. Izin lokal adalah adanya usaha untuk melibatkan komunitas lokal dalam cakupan usaha dan perusahaan sebagai bagian dari komunitas bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menghasilkan keuntungan bersama-sama. Komunitas lokal dapat mendukung usaha perusahaan melalui aktivitas yang terencana yang terdapat dalam program *community development (CD)*. Sejumlah program *CD* yang diselenggarakan, diintegrasikan dengan model kebudayaan nasional. Pembangunan sebagai program nasional diinterpretasikan komunitas lokal sebagai usaha tujuan bersama (Rahman, 2009:9).

Salah satu kategori perusahaan berdasarkan sejumlah tanggung jawab yang dilakukannya adalah karakteristik korporat pada lapisan *blue*. Perusahaan pada lapisan ini memandang CSR sebagai sebuah investasi jangka panjang, bukan sebagai sebuah beban biaya tertentu. Sebagai sebuah investasi sosial, CSR akan memberikan keuntungan dua arah, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Investasi sosial dilakukan melalui program sosial secara tepat sasaran, dilengkapi dengan tujuan yang terukur dan dijalankan secara berkesinambungan (Rahman, 2009:41-42).

Saat ini berkembang beberapa pendapat mengenai CSR. Perbedaan ini bermuara pada tiga ideologi yang saling memperjuangkan dan mendominasi definisi dan praktik CSR di arena publik. Ketiga ideologi ini adalah (1) *the business of business is business*, (2) *corporate voluntarism* dan (3) *corporate involuntarism* (Achwan, 2006). Paradigma pertama mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan institusi pencipta kesejahteraan masyarakat. Setiap perusahaan memiliki tujuan tunggal yaitu memaksimalkan keuntungan untuk pemiliknya dan keberadaannya dipercaya dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pendukung aliran ini berpendapat bahwa CSR bukan saja bertentangan dengan hakekat perusahaan, namun juga tidak etis dilakukan oleh perusahaan, karena dapat disebut pencurian uang milik pemegang saham oleh direktur perusahaan tersebut. Mereka juga berpendapat aktivitas CSR merupakan domain negara dan tidak pantas diambil alih perusahaan.

Paradigma kedua, bahwa bahwa setiap perusahaan dengan sukarela sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya dapat mengembangkan dan menjalankan CSR. Penyokong aliran ini menolak campur tangan negara dalam mengatur CSR di perusahaan. Mereka juga beranggapan bahwa kepedulian kepada masyarakat atau konsumen dapat meningkatkan ekonomi suatu perusahaan. Terdapat kontrak sosial tak tertulis antara perusahaan dan masyarakat. Paradigma ketiga (Pendekatan *Corporate Involuntarism*) berangkat dari asumsi bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Kewajiban ini harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Menurut mereka, saat ini ketika MNC jauh lebih berpengaruh dibanding negara bangsa, *self regulation* dan *voluntarism* tidaklah mencukupi.

Kegiatan CSR diusahakan dalam posisi saling menguntungkan secara proporsional bagi kedua belah pihak, baik bagi masyarakat maupun bagi dunia usaha. Pada umumnya *community development* dianggap sebagai sarana yang tepat untuk melaksanakan aktivitas CSR yang proporsional tersebut. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, sesuai dengan karakteristiknya melalui program *community development* dapat dikembangkan dan dimanfaatkan unsur modal sosial yang dimiliki oleh dunia usaha maupun masyarakat. Bagi dunia usaha, dapat membangun citra dan selanjutnya dapat berdampak pada perluasan jaringan dan peningkatan *trust*. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal, dapat dikembangkan dan dimanfaatkan unsur solidaritas sosial, kesadaran kolektif, *mutual trust* dan *reciprocal* dalam masyarakat untuk mendorong tindakan bersama guna meningkatkan kondisi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Pertimbangan kedua, dapat diharapkan adanya hubungan sinergis antara kekuatan dunia usaha melalui berbagai bentuk bantuannya dengan potensi yang ada dalam masyarakat yang merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan kapasitas masyarakat. Hal ini diharapkan program CSR akan mendorong usaha pembangunan oleh masyarakat lokal secara berkesinambungan dan terlembagakan. Pertimbangan ketiga, aktivitas bersama antara dunia usaha dengan masyarakat, terutama masyarakat lokal melalui *community development* dapat difungsikan sebagai



sarana membangun jalinan komunikasi. Berbagai persoalan dalam hubungan dunia usaha dengan masyarakat dapat dibicarakan melalui proses dialog yang elegan dan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak (Soetomo, 2006:118-119).

Kompleksitas permasalahan sosial (*social problem*) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan CSR sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Era desentralisasi merupakan momentum yang relevan bagi realisasi program CSR sebagai wujud keterlibatan sektor privat dalam pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mereka terbebas dari permasalahan sosial yang dihadapi. Namun demikian, CSR belum dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan, terlihat bahwa program CSR masih terbatas pada realisasi program *charity* yang belum mampu memberdayakan masyarakat miskin. Keterbatasan kontribusi tersebut disebabkan motif realisasi program CSR untuk meredam konflik dengan masyarakat sekitar dan karena program tersebut belum melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan program (Untung, 2008:1-2).

*Corporate citizenship* adalah cara perusahaan bersikap atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan para pihak lain sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Prinsip ini memperhatikan pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia. *Global corporate citizenship* menekankan bahwa bagi perusahaan multinasional hak dan kewajibannya harus disesuaikan dengan konteks global yang merupakan “masyarakat” bagi perusahaan tersebut. Konsep *global corporate citizenship* mengusulkan bahwa perusahaan multinasional tidak hanya merupakan *legal citizens* pada setiap negara yang menjadi tempat usaha mereka, tidak hanya bertanggung jawab pada masalah-masalah sosial masyarakat dan lainnya (Widjaja dan Pratama, 2008:26-27).

## 9. Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Modal Sosial

### a) Nilai-nilai Budaya Lokal

Pada dasarnya kekuatan masyarakat sipil terletak pada kebiasaan, adat dan etika masyarakatnya beserta segenap atribut-atribut yang biasa dibentuk secara tidak langsung melalui tindakan politik yang sadar dan dipupuk melalui kesadaran dan penghormatan yang tinggi terhadap kebudayaan. Samuel Huntington (Fukuyama, 1995), menyatakan bahwa dunia tengah bergerak menuju periode “benturan budaya”, dimana identifikasi utama masyarakat bukan lagi pada ideologi, seperti yang terjadi selama perang dingin, tetapi budaya.

Menurut Hegel, hakikatnya manusia pada akhirnya merupakan suatu fungsi dari hasrat untuk memperoleh “pengakuan”. Hegel memahami manusia sebagai suatu agen moral yang mempunyai martabat khusus yang berhubungan dengan kemerdekaan terdalem dari ketentuan fisik atau alam. Ini adalah dimensi moral dan berjuang untuk diakuhi, yaitu motor yang menggerakkan proses sejarah (Fukuyama, 1992).

James Scott (1976), melihat manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku pada masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat. Menurutnya, manusia bagaikan robot yang patuh dan tunduk kepada aturan-aturan sosial budaya yang telah diprogramkan masyarakat kepadanya. Lebih lanjut, Scott menemukan moral ekonomi dalam kelompok masyarakat petani sebagai sesuatu yang statis. Ia tidak lapuk oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur hubungan sosial yang berkembang. Tindakan ekonomi merupakan refleksi langsung dari moral ekonomi yaitu manusia bertindak sebatas tidak keluar dari etika subsistensi. Petani hanya bertindak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh aturan moral yang ada, di luar dari itu merupakan sesuatu yang asing dan dihindari.

Sedangkan Evers (Damsar, 2002), memandang manusia sebagai makhluk yang relatif kreatif. Norma-norma moral, adat, hukum dan seterusnya dipandang sebagai sesuatu yang mengganjal dalam mencapai kepentingan pribadi, tetapi

sebagai manusia yang kreatif, ia mencoba mencari jalan keluar (solusi) antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Jalan keluar tersebut ditemukan dalam proses interaksi antara individu dan individu, antara individu (pedagang) dan kelompok masyarakat (petani) serta antara kelompok pedagang dengan kelompok petani. Lebih lanjut, Evers melihat tindakan ekonomi merupakan sintesis dari moral ekonomi, yaitu kewajiban moral untuk membantu teman-teman dan kerabat-kerabat yang ada dan kepentingan ekonomi yang dimiliki yaitu akumulasi modal dalam bentuk barang dan uang. Kedua perspektif moral ekonomi tadi, akan digunakan sebagai pisau analisis oleh peneliti untuk menganalisis nilai-nilai modal sosial, kearifan lokal dan masyarakat penerima program CSR sebagai setting penelitian.

Capra (2000), untuk memahami hakikat manusia tidak hanya meneliti dimensi-dimensi fisik dan psikologis tetapi juga manifestasi-manifestasi sosial dan budayanya. Dengan demikian evolusi manusia bergerak maju melalui suatu hubungan timbal balik antara dunia batin dengan dunia lahir, individu dengan masyarakat dan alam dengan kebudayaan.

Dalam membahas unsur-unsur kultural, Smelser (1987) mengajukan dua pertanyaan mengenai kepercayaan *cultural*. Pertama adalah evaluasi, apakah aktivitas ekonomi itu menduduki tempat terpenting dalam sistem nilai kebudayaan?, apakah ia dinilai tinggi atau rendah?, apakah ia dianggap sebagai tujuan atautkah hanya alat untuk mengejar kekuasaan?. Kedua adalah eksistensi, apakah orang dianggap sebagai makhluk bermotif ekonomi atau tidak? bagaimana sifat masyarakat itu? adakah ia memberikan kesempatan untuk aktivitas ekonomi atautkah dianggap tidak mungkin dalam masyarakat yang baik?

Weber dalam (Smelser, 1987), menganalisis pengaruh agama terhadap aktivitas ekonomi, dimana kepertapaan duniawi (*worldly-ascenisme*) yang berkembang dalam protestanisme telah mendorong untuk menilai tinggi penguasaan rasional dan metodikal terhadap lingkungan sosial, lingkungan budaya dan terutama lingkungan ekonomi. Dalam menganalisis kode tingkah laku yang dianggap membawa keselamatan, ia mengembangkan dua dimensi : (1) apakah keselamatan itu membutuhkan mode yang pasif dan kontemplatif

(*mysticism*) ataukah model yang aktif dan menguasai (*asceticism*); (2) apakah keselamatan itu memerlukan pemusatan perhatian pada dunia ini, dunia lain, atau dunia batin (*inner world*).

Menurut Weber, etika kerja dari Calvinisme yang berkombinasi dengan semangat kapitalisme membawa masyarakat Barat kepada perkembangan masyarakat kapitalis modern. Jadi, doktrin Calvinisme tentang takdir memberikan daya dorong psikologis bagi rasionalisasi. Banyaknya pemodal yang menjalankan aktivitas di sekitar masyarakat penerima program CSR tentu akan mendorong rasionalisasi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Buku berjudul "*Economy and Society*" (1922), Weber telah menetapkan garis pemisah antara ekonomi dan sosiologi dengan mengajukan 3 unsur, yakni : tindakan ekonomi adalah sosial, tindakan ekonomi selalu melibatkan makna, dan tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan (Damsar, 2002:15).

Pandangan Durkheim terhadap integrasi ekonomi dalam bukunya "*The Division of Labor in Society*" bahwa bentuk integrasi yang kuat terdapat pada masyarakat berdifferentiasi (solidaritas organis). Bagi Durkheim, pembagian kerja mempunyai fungsi yang lebih luas. Pembagian kerja merupakan sarana utama bagi penciptaan kohesi dan solidaritas dalam masyarakat modern. Tingginya tingkat pembagian kerja dan peranan yang berbeda antar setiap orang menyebabkan orang menggantikan basis ikatan (penyatuan) atas dasar kesamaan (solidaritas mekanis) dengan dasar ketidaksamaan (solidaritas organis). Mereka tergantung satu sama lain karena mereka mempunyai tugas yang berbeda, dan oleh sebab itu mereka saling membutuhkan untuk kesejahteraan mereka sendiri (Damsar, 2002).

Manusia, masyarakat dan kebudayaan memang mempunyai kemampuan-kemampuan yang menakjubkan termasuk pengetahuan-pengetahuan lokal yang dimilikinya. Salah satu dari kemampuan itu adalah untuk meneruskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini, tidak hanya pengetahuan yang dikonservasikan, akan tetapi juga dasar bagi kehidupan bersama dalam masyarakat setempat. Kesemuanya yang diteruskan

dari satu generasi ke generasi-generasi berikutnya, oleh para antropolog dinamakan “*culture*” atau kebudayaan.

Kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

Ada tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1979: 186-187). Pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, atau norma. Kedua wujud kebudayaan sebagai aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud pertama berbentuk absarak, sehingga tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan. Wujud ini terdapat di dalam pikiran masyarakat. Ide atau gagasan banyak hidup bersama dengan masyarakat. Gagasan itu selalu berkaitan dan tidak dapat lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Keterkaitan antara setiap gagasan ini disebut sistem. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kata ‘adat’ dalam bahasa Indonesia adalah kata yang sepadan untuk menggambarkan wujud kebudayaan pertama yang berupa ide atau gagasan ini. Sedangkan untuk bentuk jamaknya disebut dengan adat istiadat (1979:187).

Wujud kebudayaan yang kedua disebut dengan sistem sosial (Koentjaraningrat, 1979:187). Sistem sosial dijelaskan Koentjaraningrat sebagai keseluruhan aktifitas manusia atau segala bentuk tindakan manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Aktifitas ini dilakukan setiap waktu dan membentuk pola-pola tertentu berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tindakan-tindakan yang memiliki pola tersebut disebut sebagai sistem sosial oleh Koentjaraningrat. Sistem sosial berbentuk kongkrit karena dapat dilihat pola-pola tindakannya dengan indra penglihatan.

Kemudian wujud ketiga kebudayaan disebut dengan kebudayaan fisik (Koentjaraningrat, 1979:188). Wujud kebudayaan ini bersifat konkret karena merupakan benda-benda dari segala hasil ciptaan, karya, tindakan, aktivitas, atau



perbuatan manusia dalam masyarakat. Pada dasarnya budaya merupakan keseluruhan nilai-nilai, norma, sikap, harapan-harapan dan tujuan. Dengan demikian sistem nilai budaya berfungsi sebagai pengatur perilaku individu dalam sistem sosial sesuai dengan lingkungannya, karena pada dasarnya sistem nilai budaya mengandung unsur-unsur simbolik pengetahuan, ide dan kepercayaan yang mengarahkan dan memberi makna kepada setiap tindakan manusia (Legawa, 1999).

Sistem nilai budaya, sebagaimana sistem kepercayaan yang ditampilkan dalam aktivitas upacara yang berakar pada agama merupakan sistem simbol ekspresif yang digunakan untuk mengintensifkan perasaan dan motivasi secara kuat, menyeluruh serta bertahan lama pada diri manusia. Dengan demikian upacara adat dipersepsikan sebagai wahana perantara simbolik antara kebudayaan dengan individu (Koentjaraningrat, 1984). Buku ini masih bersifat abstrak dan masih bersifat sangat umum, belum mendeskripsikan secara jelas khususnya budaya lokal dalam suatu masyarakat tertentu. Penelitian ini nanti diharapkan akan mengupas secara konkret tentang budaya lokal di wilayah penerima program CSR.

Menurut Redfield (1985), pada dasarnya kebudayaan masyarakat petani adalah otonom. Dilihat dari segi sejarah kebudayaan digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu: kebudayaan tinggi dan kebudayaan rendah. Untuk dapat bertahan, kebudayaan rendah memerlukan adanya kebudayaan tinggi. Buku ini hanya mengungkap kebudayaan dari perspektif kesejarahan, belum mengungkap sebuah kasus kekinian yang sedang terjadi dalam suatu masyarakat. Namun demikian buku ini juga menginspirasi peneliti untuk menganalisis budaya lokal pada masyarakat pelaku usaha ekonomi rumah tangga produktif skala kecil di pedesaan.

Sumner dalam Soerjono Soekanto (1984) mengkonsepsikan bahwa istilah yang menunjuk pada perilaku yang khusus dan distandarisasi yang merupakan kebiasaan bagi penganut-penganut suatu kebudayaan tertentu dinamakan "*folkways*" atau kebiasaan, dan sebagian para ahli menyebutnya sebagai "*custom*" atau adat-istiadat. Sejalan dengan itu, sistem pengetahuan lokal

petani berhubungan erat dengan situasi di mana petani itu hidup dan menggantungkan hidupnya. Pemahaman akan situasi itu akan membentuk kebudayaan petani tersebut. Dalam memahami hal itu, ada suatu teori yang menjelaskan bahwa bentuk kebudayaan terutama ditentukan oleh faktor alam sehingga kalau alamnya berbeda maka kebudayaan berbeda pula (Harsojo dalam Wibowo, 1996). Teori ini sangat penting sebagai alat untuk menganalisis bagaimana keterkaitan atau hubungan antara penduduk lokal dengan keberadaan perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Pemahaman ini penting dilakukan untuk pemetaan relasi antara kelembagaan lokal dengan perusahaan.

Selanjutnya suatu sistem nilai budaya tradisional tidak bersifat statis, tetapi selalu mengalami perubahan dan tidak bertentangan dengan proses pembangunan (Dove, 1985). Sistem nilai budaya tersebut terperinci dalam norma-norma yang akan menjadi suatu pedoman dan tata kelakuan tindakan-tindakan manusia dalam bermasyarakat (Sajogya dan Pudjiwati Sajogyo, 1999). Penelitian ini akan mengungkap secara jelas apakah kebudayaan petani di wilayah penerima manfaat CSR cukup dinamis dan apa indikator untuk melihat hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.

Sistem nilai budaya tersebut tercermin dalam sistem pengetahuan lokal, ketrampilan dan teknologi yang bersifat adaptif terhadap lingkungan alam. Sekalipun sistem ini tidak utuh lagi, tetapi masih digunakan, dipertahankan dan diadaptasikan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Sistem pengetahuan lokal yang merupakan refleksi dari sistem budaya, memberikan pemahaman tentang struktur pengetahuan, pengambilan keputusan dan struktur organisasi yang dikembangkan oleh masyarakat tertentu (Adimihardja, 1999). Teori ini penting sebagai alat untuk membedah bagaimana petani tetap bersandar pada moralitas dan bagaimana petani juga beradaptasi dengan budaya global yang selalu menyelimuti setiap langkah petani.

Masyarakat petani tradisional di Indonesia, sebagaimana di negara-negara berkembang lebih dinamis dalam menghadapi perubahan lingkungan sosial dan alamnya. Norma masyarakat tradisional Indonesia tidak statis di dalam menanggapi tekanan dari dalam maupun dari luar, melainkan merupakan suatu

penyesuaian dan perubahan terus menerus. Salah satu implikasi penting dari hal itu adalah bahwa masyarakat tersebut tidak mengenal penolakan terhadap perubahan (Dove, 1985). Teori ini sangat penting untuk melihat apakah kondisi tersebut terjadi pada masyarakat penerima program CSR.

Terdapat banyak adat dan kultur yang masih terpelihara erat sampai saat ini, budaya tersebut diakui tidak semua bersifat demokratis, ada juga budaya-budaya dalam masyarakat yang terkadang sangat feodal bahkan sangat tidak demokratis. Namun dalam perjalanan sejarah masyarakat saat ini, banyak sekali nilai dan budaya lokal yang dapat kita junjung tinggi sebagai suatu modal yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama dan hubungan sosial dalam masyarakat. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa ada tujuh unsur kebudayaan yaitu bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan (Koentjaraningrat, 1979: 203-204). Ketujuh unsur kebudayaan ini disebut Koentjaraningrat sebagai unsur kebudayaan universal karena selalu ada pada setiap masyarakat.

Aspek-aspek budaya lokal harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan. Dalam hal ini, budaya lokal haruslah dipandang sebagai modal pembangunan dan bukannya sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai modernisasi yang menjadi inti dari sebuah proses pembangunan (Suparjan dan Hemprisuyatno, 2003). Kajian yang dilakukan oleh Susmanto (2002) pada masyarakat Toraja masih kuat menganut sistem pelapisan berdasar keturunan walaupun tidak tertulis. Berangkat dari strata sosial tersebut, turut berpengaruh terhadap pola kepemimpinan yang berkembang di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa nilai dan budaya lokal sangat mempengaruhi sistem kepemimpinan dan manajemen sosial pada masyarakat setempat.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja (Peursen, 1988:11). Menurut Endraswara (2005), Tradisi lisan hampir disamakan dengan foklor, karena hampir seluruh tradisi lisan

memenuhi kriteria folklor. Tradisi lisan adalah sebuah wadah budaya lisan yang mampu menampung segala aspek warisan kolektif. Sebagai contoh misalnya sejarah tradisi lisan masyarakat Samin diajarkan oleh para nenek moyang yang bermula dari Suro Sentiko Samin. Nenek moyang tersebut menyusun buku yang menjadi pegangan para pengikutnya. Buku tersebut berisi ajaran dan ramalan untuk masa mendatang, tetapi tidak setiap orang dapat mempelajarinya hanya para “Sedulur Sikep” yang mendapatkan ajaran dari buku tersebut melalui tradisi lisan antar para sedulur.

Wujud budaya yang diturunkan dan atau diwariskan secara turun-temurun secara lisan (*oral*) yaitu folklor. Folklor yang sering diteliti yaitu cerita prosa rakyat. Menurut Bascom di buku Danandjaja (2007), cerita prosa rakyat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu mite (*myth*), legenda (*legend*), dongeng (*folktale*). Mitos (*mite*), yaitu cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh empunya yang cerita. Sedangkan berdasarkan definisi folklor dari beberapa pendapat tersebut mendasari pada cerita rakyat dalam penyebarannya dari mulut ke mulut dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat pendukungnya.

Keberadaan suatu mitos tidak terlepas dari fungsinya terhadap masyarakat pendukungnya. Fungsi mitos dalam Van Peursen (1978) adalah (1) untuk menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan ajaib yang ada dalam dongeng maupun upacara mistis, (2) memberikan pengetahuan tentang dunia misalnya tentang “*kosmogoni and theogoni*”, (3) memberikan jaminan pada masa kini arti peristiwa semula, yang seolah-olah dapat ditampilkan kembali, baik dalam bentuk cerita, maupun gerakan (tarian) dalam suatu konteks tertentu.

Mitos berbeda dengan legenda. Legenda sering kali dipadani dengan sejarah kolektif (*folk history*), legenda biasanya bersifat berpindah-pindah, sehingga dikenal luas di pengelompokan yang disebut siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu (Danandjaya, 2002). Legenda adalah cerita yang dianggap benar benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Berbeda dengan mite, legenda ditokohi oleh manusia biasa walaupun ada kalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa, atau sering dibantu oleh

makhluk-makhluk gaib (halus). Tempat terjadinya legenda adalah dunia seperti yang kita kenal sekarang. Waktu terjadinya belum begitu lampau. Para pelaku legenda dibayangkan sebagai pelaku yang betul-betul pernah hidup pada masyarakat masa lalu (Rusyana, 1984). Sedangkan dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal (Nurgiantoro, 2005). Dalam penelitian ini mitos dan legenda menjadi bahan kajian untuk memperkaya budaya local yang ada.

Ciri-ciri pengenal utama folklor menurut Danandjaja (1991) adalah: (1) penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut dari satu (atau dengan suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat) dari satu generasi ke generasi berikutnya; (2) Folklor bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk yang relatif tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi); (3) Folklor ada (*exist*) dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya yang secara lisan dari mulut ke mulut, dan biasanya bukan melalui catatan atau rekaman, sehingga folklor dengan mudah dapat mengalami perubahan, walaupun demikian perbedaannya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya tetap bertahan; (4) Folklor biasanya bersifat *anonim*, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi (5) Folklor biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola (6) Folklor mempunyai kegunaan (*function*) dalam kehidupan bersama suatu kolektif (7) Folklor bersifat *pralogis*, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi folklor lisan dan sebagian lisan (8) Folklor menjadi milik bersama (*collective*) dari kolektif tertentu. Hal ini sudah tentu diakibatkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya (9) Folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa banyak folklor merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya.



Berdasarkan ciri-ciri di atas, mitos di dataran tinggi dieng dan sekitarnya memiliki ciri-ciri folklor diantaranya adalah disebarkan secara lisan, bersifat tradisional. Folklor biasanya bersifat *anonim*, mempunyai kegunaan (*function*) dalam kehidupan bersama suatu kolektif, bersifat *pralogis*, menjadi milik bersama. Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi disebut modal sosial. Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian paling kecil dalam masyarakat. Modal sosial dapat dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang paling kecil ataupun dalam kelompok masyarakat yang besar seperti negara.

#### b) Modal Sosial

Modal sosial sebagai sumberdaya sosial dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru di masyarakat. Sehingga modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakan kebersamaan, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut Putman, *et al* (dalam Suharto, 2007) juga menjabarkan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti kepercayaan, norma-norma (hal timbal balik), dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat) yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama.

James Coleman (1990), mendefinisikan modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya. Selanjutnya Vipriyanti (2011), merumuskan modal sosial sebagai rasa percaya dan kemampuan seseorang dalam membangun jaringan kerja serta kepatuhannya terhadap norma yang berlaku dalam kelompok maupun masyarakat di sekitarnya yang mana modal tersebut memberi keuntungan untuk mengakses modal lainya serta memfasilitasi kerjasama inter dan antar kelompok masyarakat.

Eva Cok (1996) mengkonsepsikan “*Social Capital is the trust, reciprocity and mutuality that inheres to social relationship*” Modal sosial adalah sebagai suatu rangkaian hubungan antar manusia yang ditopang oleh rasa saling percaya dan kerja sama untuk kebajikan bersama (Carroll, 2001). Pierre Bourdieu (1986), mengkonsepsikan yang sedikit berbeda, yang banyak dipengaruhi oleh *marxist sociology*, menurutnya modal sosial memiliki tiga bentuk. *Pertama*, modal ekonomi yang dapat dikaitkan dengan uang atau kepemilikan benda-benda, barang dan sejenisnya yang dapat dipandang dan digunakan bagi keperluan investasi. *Kedua*, modal kultural yang teristitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan. *Ketiga*, modal sosial yang terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial dan diantaranya teristitusionalisasikan dalam bentuk kehormatan dan kebangsawanan (Jousairi Hasbullah, 2006).

Francis Fukuyama (1995), menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat (World Bank, 2002).

Inti modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan (*reciprocity*), dan dibangun diatas kepercayaan (*trust*) yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat (Jousairi Hasbullah, 2006).

Secara lebih komprehensif Burt (1992) mendefinisikan, modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Pada umumnya, masyarakat yang mampu membangun dan memelihara modal sosial akan memiliki kemudahan membangun dan menjaga modal-modal lainnya.

Bersama dengan sumberdaya lain, modal sosial meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Tanpa modal sosial, aktivitas ekonomi akan mengalami kemunduran dan sumberdaya alam akan menghadapi ancaman kerusakan. Sebaliknya, tanpa pertumbuhan ekonomi modal sosial akan terganggu (Mitcel, *et al*, 1999 ).

Modal sosial (*social capital*) berbeda definisi dan terminologinya dengan *human capital* (Fukuyama, 1995). Bentuk *human capital* adalah ‘pengetahuan’ dan ‘ketrampilan’ manusia. Investasi *human capital* konvensional adalah dalam bentuk seperti halnya pendidikan universitas, pelatihan menjadi seorang mekanik atau *computer programmer*, atau menyelenggarakan pendidikan yang tepat lainnya. Sedangkan modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial dapat dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial paling kecil atau paling mendasar dan juga kelompok-kelompok masyarakat paling besar seperti halnya negara (bangsa).

Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme - mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah (Fukuyama, 2000). Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak dapat diperoleh seperti dalam kasus bentuk-bentuk *human capital*. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebijakan-kebijakan.

Menurut Burt (1992), kemampuan berasosiasi ini sangat tergantung pada suatu kondisi dimana komunitas itu mau saling berbagi untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama. Apabila titik temu etis-normatif ini diketemukan, maka pada gilirannya kepentingan-kepentingan individual akan tunduk pada kepentingan-kepentingan komunitas kelompok, seperti kesetiaan, kejujuran, dan *dependability*. Modal sosial lebih didasarkan pada kebijakan-kebijakan sosial umum.

Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya (Woolcock dan Narayan, 2000). Oleh karena itu Adler dan Kwon (2000) menyatakan, dimensi modal sosial adalah merupakan gambaran dari

keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesivitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dimensi modal sosial juga menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin, 1999). Dimensi modal sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Coleman, 1999).

Namun demikian Fukuyama (1995) dengan tegas menyatakan, belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*). Dimana *trust* ini adalah merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. Norma-norma tersebut dapat berisi pernyataan-pernyataan yang berkisar pada nilai-nilai luhur (kebajikan) dan keadilan.

Bain dan Hicks (dalam Krishna dan Shradder, 2000) mengajukan dua dimensi modal sosial sebagai kerangka konseptual untuk mengembangkan alat pengukur tingkat keberadaan modal sosial. Dimensi pertama yang disebutnya dimensi kognitif, berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Setiap kelompok etnik sebenarnya memiliki dimensi kognitif – atau dapat juga disebut sebagai dimensi kultural - ini, sekalipun dalam kadar yang berbeda. Ada yang kaya dengan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial yang memungkinkan terpeliharanya hubungan yang harmonis, baik sesama warga masyarakat secara internal maupun dengan orang-orang dari kelompok sukubangsa atau etnik yang berbeda. Sementara kelompok etnik tertentu lebih menekankan nilai-nilai

solidaritas dan kerjasama dalam kelompok sendiri dan secara tradisional tidak memiliki pedoman untuk berinteraksi secara baik dengan kelompok lain.

Setidaknya dengan mendasarkan pada konsepsi-konsepsi sebelumnya, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dimensi dari modal sosial adalah memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya, dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku, serta berhubungan atau membangun jaringan dengan pihak lain di dalam proses perubahan dan upaya mencapai tujuan tersebut.

Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh modal sosial antara lain: sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peranan penting adalah kemauan masyarakat untuk secara terus menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Inilah jati diri modal sosial yang sebenarnya.

Oleh karena itu menurut Hasbullah (2006), dimensi inti telaah dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola inter relasi yang imbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.

Modal sosial penting untuk dibangun karena merupakan kemampuan komunitas atau kelompok-kelompok untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan baik di antara anggota-anggotanya maupun dengan pihak luar yang menjadi kekuatan besar untuk bekerjasama dan menumbuhkan kepercayaan pihak



lain. Apabila warga masyarakat saling bekerjasama dan saling percaya yang didasarkan kepada nilai-nilai universal yang ada, maka tidak akan ada sikap saling curiga, saling jegal, saling menindas dan sebagainya sehingga ketimpangan-ketimpangan antara kelompok yang miskin dengan yang kaya akan dapat diminimalkan. Di pihak lain komunitas kelurahan yang kuat dan mempunyai modal yang layak dipercaya akan memudahkan jaringan kerjasama dengan pihak luar.

Woolcock (2001) membuat tipologi modal sosial. *Pertama*, modal sosial terikat (*bonding sosial capital*), yaitu tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Contohnya, kebanyakan keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga yang lain yang masih mungkin dalam satu etnis. *Kedua*, modal sosial yang menjembatani (*bridging sosial capital*) yaitu merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. kemunculannya dikarenakan adanya berbagai macam kelemahan yang ada disekitarnya, sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada. Contohnya: Asosiasi Masyarakat Adat Indonesia. *Ketiga*, *sosial linking* (hubungan /jaringan sosial) yaitu hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya, hubungan elit politik dengan masyarakat.

Paul Bullen dan Jenny Onix yang dikutip oleh Hasbullah (2006:7) terkait modal sosial mengatakan bahwa:

*“Yang sangat penting dari modal sosial adalah kemampuannya sebagai basis sosial untuk membangun masyarakat sipil yang sebenarnya. Tanpa basis sosial yang kuat seperti yang terkandung dalam Modal Sosial sebetulnya kehidupan itu sendiri bukanlah kehidupan yang berdimensi kemanusiaan”.*

Penjelasan Paul Bullen dan Jenny Onix mengenai modal sosial ini dapat dilihat bahwa modal sosial merupakan modal yang menjadi basis sosial pembangunan masyarakat. Modal sosial yang ditopang oleh jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan memungkinkan adanya koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan

masyarakat. Jaringan sosial merupakan aset penting modal sosial dan jaringan sosial memberikan dasar kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang dikenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik (Field, 2010). Dengan begitu, modal sosial menjadi landasan penting dalam pembangunan masyarakat yang berdimensi kemanusiaan.

Selanjutnya, Putnam (2000) membedakan tipologi modal sosial sebagai berikut.

Tabel 2.3. Tipologi Modal Sosial

<i><b>Bonding Sosial Capital</b></i>	<i><b>Bridging Sosial Capital</b></i>
1. Terikat/ketat, jaringan yang eksklusif	1. Terbuka
2. Pembedaan yang kuat antara "orang kami" dan orang luar.	2. Memiliki jaringan yang lebih fleksibel
3. Hanya ada satu alternatif jawaban	3. Memungkinkan banyak alternatif jawaban
4. Sulit menerima arus perubahan	4. Akomodatif dalam menerima perubahan
5. Kurang akomodatif terhadap pihak luar	5. Cenderung memiliki sikap yang <i>altruistic</i> , <i>humanitarianistic</i> dan universal.
6. Mengutamakan kepentingan kelompok	

Sumber: Putnam (2000)

Fukuyama (2002) mengemukakan modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial merupakan hal yang esensial bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas demokrasi. Tingkat modal sosial yang rendah dalam suatu masyarakat akan meredupkan semangat gotong-royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, dan angka kriminalitas serta akan menghalangi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara modal sosial dengan pengembangan masyarakat, Ife dan Tesoriero (2008) menegaskan bahwa:

*“semua pengembangan masyarakat seharusnya bertujuan membangun masyarakat. Pengembangan masyarakat melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan mereka dan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mengarah pada dialog yang sejati, pemahaman, dan aksi sosial”.*

Menurut Ife dan Tesoriero, pengembangan masyarakat juga melibatkan pengembangan modal sosial. Modal sosial sebagai penggerak dalam pengembangan masyarakat itu sendiri. Modal sosial mendorong masyarakat untuk melakukan interaksi sosial dan membantu masyarakat melakukan komunikasi timbal balik, sehingga menimbulkan aksi sosial di masyarakat.

Peranan modal sosial tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur ekonomi lainnya, sehingga upaya untuk membangun modal sosial perlu diprioritaskan. Pembentukan modal sosial dapat menyumbang pada pembangunan ekonomi karena adanya jaringan (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) di dalamnya yang menjadi kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Aspek kepercayaan merupakan unsur yang sangat esensial dalam membentuk modal sosial karena merupakan inti dari modal sosial (*core of capital sosial*) (Zubaedi, 2007).

Munculnya modal sosial dalam kehidupan masyarakat masih mungkin dibangun dan dirasakan adanya sesuatu yang dianggap sebagai kepentingan bersama. Hal ini akan mendorong tindakan bersama, baik untuk hal-hal yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup maupun tindakan bersama untuk membangun berbagai prasarana dan fasilitas umum. Salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya sosial adalah nilai. Nilai yang dianut oleh masyarakat akan menjadi orientasi tindakan dan perilaku masyarakatnya, termasuk perilaku dan tindakan bersama untuk membangun (Soetomo, 2009). Penggunaan modal sosial akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dalam suatu kegiatan, seperti program pembangunan (Badaruddin, 2005).

Kaitannya dengan pengembangan masyarakat, maka wujud nyata dari modal sosial dapat dilihat dari (1) hubungan sosial, yaitu bentuk komunikasi bersama lewat hidup berdampingan sebagai interaksi antarindividu, (2) adat dan

nilai budaya lokal, (3) toleransi, dalam artian, menghargai pendapat orang lain dan salah satu prinsip demokrasi. Toleransi bukan berarti tidak boleh berbeda, bukan pula berarti diam tidak berpendapat, namun toleransi bermakna sebagai penghargaan terhadap orang lain memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara serta menyadari bahwa pada dasarnya orang mempunyai kepentingan yang berbeda, (4) kesediaan untuk mendengar, dalam artian, mendengar suara rakyat merupakan salah satu bentuk penghargaan negara terhadap masyarakat, (5) kejujuran, (6) kearifan lokal dan pengetahuan lokal merupakan pengeahuan yang berkembang sebagai pendukung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, (7) jaringan sosial dan kepemimpinan sosial, jaringan sosial terbentuk berdasarkan kepentingan atau ketertarikan individu secara prinsip atau pemikiran, (8) kepercayaan, hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama, (9) kebersamaan dan kesetiaan, perasaan ikut memiliki dan menjadi bagian dari sebuah komunitas, (10) tanggung jawab sosial, rasa empati masyarakat terhadap perkembangan lingkungan masyarakat dan berusaha untuk selalu meningkatkan ke arah kemajuan, (11) partisipasi masyarakat, yaitu kesadaran dalam diri seseorang untuk ikut terlibat dalam berbagai hal berkaitan dengan diri dan lingkungannya; dan (12) kemandirian, yakni keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan sebagai rasa empati dan rasa kebersamaan yang mereka miliki bersama.

Sebaliknya, penguatan modal sosial akan berpengaruh pada hal, seperti: (1) penguatan otonomi, modal sosial menjadi kekuatan bagi masyarakat supaya tidak tergantung dan dapat mengelola kepentingannya sendiri, (2) penguatan dalam hal kerja sama, modal sosial membantu masyarakat mampu mengelola resiko sosial dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah atau merespon goncangan, (3) menguatkan jaringan sosial dengan modal sosial elemen-elemen masyarakat saling membantu dan mengelola resiko yang didasarkan atas hubungan informal, (4) membangun keterampilan berdemokrasi dari aspek politik modal sosial bermanfaat untuk membangun budaya demokratis karena tidak ada kelompok yang mendominasi, (5) menerima *pluralisme*, modal sosial dapat menjadi lem perekat yang dimaknai sebagai koherensi internal sosial budaya

dalam masyarakat. Berdasarkan pengalaman masa lalu, "encer"-nya (memudarnya) modal sosial yang terdapat di daerah-daerah disebabkan adanya perbedaan kepentingan yang tajam, sehingga memudahkan pelaku-pelaku yang berposisi selaku provokator masuk ke dalam sistem sosial masyarakat bersangkutan dan melakukan adu domba.

Kemudian, Honadle dan VanSant (1885) menyebutkan sejumlah kriteria agar suatu program dari luar dapat melahirkan institusi yang menjadi sarana tumbuhnya keberlanjutan, yaitu dapat menjadi saluran yang meningkatkan arus komunikasi dua arah, mampu mereduksi faktor resiko sampai minimal, mampu mengadaptasikan aktivitas program dengan kondisi lokal, mampu mengembangkan sumber daya lokal, mampu mendorong indepedensi keputusan ekonomi dan politik masyarakat lokal, serta dapat mengoordinasikan dan mendistribusikan keuntungan maupun kemanfaatan berbagai bentuk bantuan dari luar.

Sejalan dengan itu, Putnam (1993) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi secara positif dengan kehadiran modal sosial. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik, bila masyarakat memiliki ciri-ciri: hadirnya hubungan yang erat antaranggota masyarakat, adanya para pemimpin yang jujur dan *egaliter* yang memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, bukan sebagai penguasa serta adanya rasa saling percaya dan kerja sama di antara unsur masyarakat.

Membangun modal sosial yang dilakukan melalui: (1) pendidikan (pada lembaga keluarga dan sekolah), mengkombinasikan *knowledge* dan *skill*; (2) melalui pelatihan kelompok, *learning group* dapat meningkatkan hasil kerja kelompok dan perasaan menyatu; dan (3) melalui hubungan kemasyarakatan, modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam keanggotaan entitas sosial tertentu (misal: paguyuban, kelompok arisan dan sejenisnya).

Kegiatan sosial dapat dikategorikan sebagai pembangunan kapasitas, bila di dalamnya menekankan sejumlah indikator antara lain: memperkuat kemampuan masyarakat untuk mewujudkan penghidupan yang berkelanjutan,



adanya pendekatan multidisiplin lintas sektor dalam merancang dan melaksanakan program, menekankan perubahan dan inovasi kelembagaan maupun teknologi, menekankan pada perlunya pembangunan modal sosial serta menekankan pengembangan keterampilan dan kinerja dari individu maupun lembaga.

### 10. Kelembagaan Sosial Ekonomi Lokal

Korten (1988:375), menyatakan bahwa pembangunan yang berpusat pada rakyat mengutamakan bentuk-bentuk swadaya yang menonjolkan peranan individu dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah kelembagaan. Berpijak dari teori yang dikemukakan oleh Korten ini, maka penelitian ini akan menjelaskan peran individu dalam pengambilan keputusan sebuah kelembagaan, bagaimana kelembagaan lokal berperan penting di dalam penerapan CSR, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa dengan cara memanfaatkan kemampuan dan potensi sumberdaya yang ada melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan prakarsa masyarakat.

Menurut sektornya, Uphoff (1986:164-166) memetakan kelembagaan lokal merupakan suatu kontinum antara sektor publik (*public sector*) dan sektor privat (*privat sector*). Di tengah-tengahnya terdapat sektor antara yang bersifat sukarela (*voluntary sector*) yakni dicirikan oleh ciri-ciri publik dan privat. Urutan kontinum itu adalah administrasi lokal (*local administration*); pemerintahan lokal (*local government*); organisasi sosial berbasis keanggotaan (*membership organizations*) meliputi organisasi dengan tugas jamak, tugas spesifik, dan sesuai kebutuhan anggota; koperasi (*cooperatives*); organisasi bergerak di bidang jasa (*services organizations*); dan bisnis privat (*private business*). Urutan pertama dan kedua adalah kelembagaan sektor publik, urutan ketiga dan keempat sektor sukarela, sedangkan urutan kelima dan keenam adalah sektor privat.

Menurut Soetomo (2011:116), media yang paling tepat untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam pembangunan adalah kelembagaan lokal yang asli, hal ini karena ada beberapa kelebihan: (1) tumbuh dan berkembang melalui proses kehidupan keseharian; institusi lokal mengakar kuat di masyarakat; eksistensinya lebih kuat dan mapan dan mendapat dukungan luas dari masyarakat;

(2) kelembagaan lokal sudah teruji karena diperoleh melalui proses belajar dalam merespon pembangunan; (3) kelembagaan lokal lebih menjamin keberlanjutan pada aktivitas bersama. Berpijak dari apa yang dikonsepsikan oleh Soetomo ini, maka dalam penelitian ini akan menelusuri lebih jauh tentang peran dan kontribusi kelembagaan lokal dalam penerapan program CSR.

Kelembagaan lokal akan memiliki fungsi dan peran yang optimal dalam penerapan CSR, apabila meningkatkan kontribusi dan perannya dalam pengelolaan program CSR. Pengelolaan program CSR memberikan peluang besar bagi masyarakat termasuk kelembagaan lokal dalam pengambilan keputusan dan mendayagunakan keswadayaan guna mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih baik secara transformatif.

Uphoff (1986:32-34) menjelaskan argumentasi pentingnya kelembagaan lokal untuk mengelola sumberdaya alam dan membangun pedesaan. Rasionalisasi bagi kelembagaan lokal itu adalah: (1) kelembagaan di level lokal penting untuk memobilisasi sumberdaya dan mengatur penggunaannya dengan suatu pandangan jangka panjang terhadap pemeliharaan dan aktivitas produktif; (2) sumberdaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara paling efisien dan berkelanjutan karena menggunakan sistem pengetahuan spesifik lokal; (3) perubahan status sumberdaya dapat dipantau secara lebih cepat dengan biaya rendah; (4) bila kelembagaan lokal tidak mampu menyelesaikan konflik manajemen sumberdaya maka penyelesaiannya dapat diserahkan pada level yang lebih tinggi; (5) perilaku orang-orang dikondisikan oleh norma-norma dan konsensus komunitas; dan (6) institusi menodorong orang-orang untuk menggunakan cara pandang jangka panjang melalui harapan-harapan dan basis kerjasama antar individu yang berkepentingan.

Teori Norman Uphoff (1986:2-3) mengenai kelembagaan digunakan sebagai pijakan dalam membangun sinergisitas kelembagaan lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan dalam penerapan CSR. Dalam konteks pembangunan pedesaan, aktivitas pembangunan merupakan upaya mengintegrasikan antara sumberdaya alam (*natural resources management*), infrastruktur (*rural*

*infrastructure*), sumberdaya manusia (*human resources development*), sektor pertanian (*agricultural improvement*) dan non pertanian (*non agricultural enterprise*) dan ekonomi lingkungan.

Selanjutnya di dalam proses pelembagaan, dibangun di atas tiga pilar sebagai elemen pokok, yang secara fundamental ketiganya sangat berbeda. Masing-masing memiliki paradigma, ideologi, nilai, norma, *rules of the game* dan bentuk keorganisasiannya sendiri. Tiga pilar dimaksud adalah: pemerintah, komunitas dan pasar. Ketiganya dipresentasikan menjadi kekuatan politik, sosial dan ekonomi. Masing-masing memiliki peran yang harus dijalankan secara ideal. Konfigurasi kekuatan antara ketiganya merupakan dasar pembentuk sistem sosial. Hal ini berarti bahwa antara komunitas, pemerintah dan pasar memiliki perbedaan (Uphoff, 1986). Ketiga pilar tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Perbedaan Karakteristik Antara Komunitas, Pemerintah Dan Pasar

Aspek	Komunitas	Pemerintah	Pasar
Orientasi utama	Pemenuhan kebutuhan hidup komunal	Melayani penguasa dan masyarakat	Keuntungan ( <i>profit oriented</i> )
Sifat kerja sistem sosial	Demokratis, berdasarkan kesetaraan	Monopolis	Kompetitif
Sandaran kontrol sosial	Kultural ( <i>cultural compliance</i> )	Pemaksaan ( <i>coersif compliance</i> )	Penuh perhitungan ( <i>renumeration compliance</i> )
Bentuk simbol yang diterapkan	Mistis	Pseudorealis	Realis
Bentuk norma utama	Komunal dan kepatuhan	Modifikasi perilaku	Individualistis

Sumber : Uphoff (1986)

Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan membangun sistem jejaring kerja sama dan sinergy. Pola-pola interaksi dan kelembagaan dibentuk oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh keuntungan. Pertimbangan-pertimbangan kepentingan akan menentukan tindakan ekonomi. Dalam penelitian ini, analisa level kepentingan dimulai dengan penempatan kepentingan-kepentingan manusia (sosial, ekonomi,

politik) dan mengkaji kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi kepentingan-kepentingan tersebut yang diekspresikan melalui relasi sosial serta konsekuensinya.

*Dualistic problem* dalam kegiatan pertanian sebagaimana di preposisikan Boeke tetap menjadi masalah penting bagi pembangunan pertanian. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang sangat kritis untuk meluruskan atau menjernihkan kesalah-pengertian tersebut, jika tidak ingin dijumpai potret masa depan petani dan pertanian yang semakin memprihatinkan pada bangsa ini ke depan. Bagian terbesar pelaku pertanian membutuhkan hekat kebijakan yang sangat berbeda dibandingkan dengan sebagian kecil lainnya, yang justru “menguasai” berbagai sumberdaya produktif yang dibutuhkan bagi suatu pembangunan pertanian yang berdaya saing seperti lahan, modal, teknologi dan informasi serta manajemen. Tanpa menyentuh aspek utama tersebut pembangunan pertanian diyakini tidak akan mampu mengatasi masalah dasar dan struktural dalam pertanian.

Oleh karena itu untuk membangun dan mengembangkan pertanian yang sangat dualistik saat ini, hal utama yang sangat dibutuhkan adalah penguatan kelembagaan (*institutional building*) yang akan memungkinkan dan memberikan landasan kondusif (*enabling*) bagi berkembangnya kehidupan petani dan pertanian masa depan. Upaya kelembagaan tersebut harus dipandang sebagai suatu prasyarat keharusan (*necessary condition*) bagi suatu rekonstruksi dan restrukturisasi pertanian secara menyeluruh. Di samping itu juga harus ada prasyarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan kapasitas manajemen (Subiyono dan Rudi Wibowo, 2005:247-248).

Lembaga (*institution*) adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal ataupun non formal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama (Mubyarto, 1995). Secara kultural Indonesia memiliki sejarah panjang dalam kehidupan sosial ekonomi, meskipun bentuknya masih merupakan kearifan lokal untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat pada zamannya. Secara umum “gotong royong”, sebagai salah satu ciri lembaga masyarakat yang mengurus ekonomi bersama dalam suatu masyarakat.

Menurut Selo Soemartjan (1964), istilah lembaga kemasyarakatan sebagai terjemahan dari *Social Institution*, istilah lembaga kecuali menunjukkan kepada suatu bentuk juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari lembaga kemasyarakatan itu. Sedangkan Soerjono Soekanto (1990) lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit satu fungsional. Norma-norma yang abadi dalam kemasyarakatan, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. Pada yang terakhir umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya.

Selanjutnya Soerjono Soekanto (1990) mengkategorikan empat pengertian secara sosiologis, (dimana dasar norma tersebut sama, yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat), yakni: cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat-istiadat (*custom*). Masing-masing pengertian tersebut mempunyai dasar yang sama yaitu masing-masing merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk pada perilaku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Seperti pengertian diatas, mempunyai kekuatan yang berbeda karena setiap tingkatan menunjukkan pada kekuatan memaksa yang lebih besar supaya mentaati norma.

Pertama, adalah cara (*usage*). Hal ini menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan. Norma ini mempunyai kekuatan yang sangat lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan. Cara ini lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya itu tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang di hubungi. Misalnya, orang mempunyai cara masing-masing untuk minum pada waktu bertemu. Terdapat orang yang minum tanpa mengeluarkan suara ada pula yang minum sambil mengeluarkan suara sebagai tanda kepuasan dalam menghilangkan kehausan. Cara terakhir biasanya dianggap sebagai perbuatan



yang tidak sopan. Apabila cara tersebut diperlakukan juga, maka paling banyak orang yang diajak minum bersamaan merasa tersinggung dan mecela cara minum yang demikian.

Kedua, adalah kebiasaan (*folkways*). Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dari pada cara. Kebiasaan yang di artikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang menyukai perbuatan tersebut. Sebagai contoh, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua. Apabila perbuatan tadi tidak dilakukan, maka akan disebut suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum masyarakat.

Ketiga adalah tata kelakuan (*mores*), mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar dan tidak sadar oleh masyarakat dan anggota-anggotanya. Tata kelakuan sangatlah penting karena alasan-alasan berikut: (1) tata kelakuan memberikan batasan-batasan pada perilaku individu. Tata kelakuan juga merupakan alat yang memerintahkan dan sekaligus melarang seorang anggota masyarakat melakukan suatu perbuatan. Setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing yang seringkali berbeda satu dengan yang lainnya karena tata kelakuan timbul dari pengamalan masyarakat yang berbeda-beda dari masyarakat-masyarakat yang bersangkutan; (2) tata kelakuan mengidentifikasikan individu dengan kelompoknya. Di satu pihak tata kelakuan memaksa orang agar menyesuaikan tindakan-tindakan dengan tata kelakuan kemasyarakatan yang berlaku. Di lain pihak mengusahakan agar masyarakat menerima seseorang karena kesanggupannya untuk menyesuaikan diri. Suatu contoh adalah tindakan-tindakan yang menyimpan, misalnya melakukan kejahatan. Masyarakat akan menghukum orang tersebut agar mereka menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya akan dijumpai keadaan-keadaan dimana orang-orang yang memberi teladan pada suatu waktu diberi tanda terima kasih masyarakat yang bersangkutan; (3) tata cara menjaga solidaritas antara anggota masyarakat seperti telah diuraikan di atas, setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan, misalnya perihal antara hubungan pria dan wanita, yang berlaku bagi semua orang, dengan semua usia, untuk segala

golongan masyarakat, dan selanjutnya. Tata kelakuan menjaga keutuhan dan kerjasama antara anggot-anggota masyarakat itu.

Keempat adalah adat istiadat (*custom*), yakni tata kelakuan yang telah berlangsung lama dan terintegrasi secara kuat dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan normatifnya menjadi adat istiadatnya. Selanjutnya menurut Mosher kelembagaan merupakan syarat pokok yang diperlukan agar struktur pembangunan pedesaan dapat dikatakan maju. Menurut Mosher ada tiga dari lima syarat pokok yang harus ada yang dikategorikan sebagai aspek kelembagaan dalam “Struktur Pedesaan Maju”, yaitu: (1) adanya pasar (kelembagaan ekonomi); (2) adanya pelayanan penyuluhan (kelembagaan Penyuluhan); dan (3) adanya lembaga perkreditan/kelembagaan perkreditan (Soekartawi, 2002). Selanjutnya Koentjaraningrat (1974) mengkategorikan kelembagaan ke dalam delapan golongan: (1) kelembagaan kekerabatan/domestik; (2) kelembagaan ekonomi; (3) kelembagaan pendidikan; (4) kelembagaan ilmiah; (5) kelembagaan estetika dan rekreasi; (6) kelembagaan keagamaan; (7) kelembagaan politik; dan (8) kelembagaan somatik. Berpijak dari dua pandangan tersebut, penelitian ini akan menjelaskan kelembagaan sosial ekonomi lokal pada dua subkelembagaan sosial ekonomi lokal, yakni: (1) kelembagaan ekonomi-perkreditan dan (2) kelembagaan sosial-keagamaan.

#### **a. Kelembagaan Ekonomi-Perkreditan**

Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, Bung Hatta (Sritua Arif, 1999:129) memberikan pandangan dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai untuk rakyat, Bung Hatta menggunakan peralatan dialektika hubungan ekonomi antar berbagai aktor ekonomi di dalam masyarakat yakni :

*“yang hendak kita persoalkan disini ialah kedudukan, soal usaha ekonomi dalam masyarakat kita. Kaum produsen sebagian yang terbesar terdiri daripada bangsa kita. Kaum konsumen demikian pula. Akan tetapi kaum distributor terdiri daripada bangsa asing. Dan inilah satu pokok yang penting yang menjadi sebab kelemahan ekonomi rakyat kita.”*

Pemikiran Hatta tersebut nampaknya masih relevan seperti yang terjadi saat ini. Hal ini dapat dilihat ketika petani mau panen harga dasar gabah jatuh, selain itu petani tidak mempunyai *bargaining position* dalam menentukan harga apalagi rakyat tidak berdaya menghadapi melambungnya harga saprodi.

Kelembagaan ekonomi yang perlu dikembangkan untuk mendorong pembangunan pertanian adalah lembaga keuangan mikro pedesaan, pasar, lelang, asuransi, pegadaian dan lain-lain. Lembaga keuangan mikro pedesaan yang ada di wilayah penerima manfaat program CSR adalah: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Badan Perkreditan Rakyat (BPR), Unit Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PNPM) dan koperasi. Kelembagaan ekonomi lain yang perlu dikembangkan adalah kelembagaan asosiasi atau komoditas. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang peran kelembagaan lokal dalam penerapan program CSR. Menurut Iskandar Andi Nuhung (2006:109), kelembagaan komoditas memiliki fungsi promosi, advokasi atau pembinaan dalam rangka pengembangan komoditas.

Beberapa lembaga ekonomi dan pengembangan teknologi yang lazim ada di pedesaan antara lain: (1) lembaga kemasyarakatan Desa: seperti LMD, LKMD, PKK, BKM, KPD dan lainnya yang berbasis pada ikatan sosial dan hubungan ekonomi. Namun lembaga tersebut belum memberikan peran yang optimal dalam manajemen perekonomian desa; (2) Kelembagaan pasar seperti KUD yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baru dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baru dapat dinikmati oleh sebagian petani kecil; (3) Kelembagaan permodalan/perkreditan seperti Bank Desa belum mampu sepenuhnya menjadi lokomotif masuknya modal ke desa, bahkan sebaliknya menambah aliran yang kuat modal masuk ke kota dari desa; (4) Kelembagaan kelompok tani, ternak atau ikan yang sebenarnya hanya didominasi oleh petani-petani maju, sehingga petani lainnya hanya sekedar sebagai pelengkap (Murdiyanto, 2010:69-77)

Mahendra Wijaya (2017:15), menyatakan bahwa industri di pedesaan (misalnya industri kerajinan, industri pengolahan produk lokal dll) dapat

berkembang apabila didukung adanya kelembagaan ekonomi di pedesaan. Kelembagaan ekonomi lokal dapat berbentuk sebagai asosiasi seperti koperasi dan dapat berbentuk dari perilaku yang diulang-ulang hingga menjadi pola perilaku yang melembaga seperti “*bawon*” yaitu pembagian upah menuai padi didasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong. Berangkat dari apa yang dikonsepkan oleh Wijaya tadi, penelitian ini nanti akan mendeskripsikan lebih jauh kelembagaan ekonomi yang berperan penting terhadap implementasi program CSR.

Kelembagaan Perkreditan, lembaga ini harus dapat terjangkau oleh petani, bukan saja tersedia pada waktu petani memerlukan, tetapi juga murah. Kredit diperlukan oleh petani untuk membeli faktor produksi guna pengetrapan teknologi baru. Selain dana perbankan, sumber dana program diversifikasi pertanian dapat menggunakan dana reboisasi sebagai bagian dari program rehabilitasi hutan.

Bukan rahasia lagi bahwa kredit-kredit yang disediakan oleh perbankan, seperti Bank Rakyat Indonesia, atau bank-bank komersial lainnya untuk sektor-sektor pertanian sering gagal ketimbang keberhasilannya. Sutrisno (1990), yakin bahwa kegagalan dari penyediaan kredit oleh bank komersial yang dirancang oleh perbankan pusat disebabkan jarang yang menyesuaikan dengan karakteristik target masyarakat desa terhadap seluk beluk perkreditan lebih berperan dan menyebabkan seringnya perkreditan untuk masyarakat miskin menjadi tidak lancar jalannya.

Tuntutan pengelolaan integral vertikal agribisnis pada dasarnya untuk menghilangkan (meminimalkan) ketimpangan margin, pada berbagai sektor hulu, budidaya dan hilirnya. Agribisnis yang dikelola tidak secara integratif akan memberi dampak masalah ketimpangan margin dan biasanya sektor budidaya menjadi korban karena struktur ekonomi yang dualistik.

#### **b. Kelembagaan Sosial-Keagamaan**

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan

yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (*behaviour*). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya. Pendekatan ilmu biologi, ekologi atau lingkungan melihat institusi dari sudut analisis sistem lingkungan (*ecosystem*) atau sistem produksi dengan menekankan struktur dan fungsi sistem produksi atau sistem lingkungan kemudian dapat dianalisis keluaran serta kinerja dari sistem tersebut dalam beberapa karakteristik atau kinerja (*system performance* atau *system properties*) seperti produktivitas, stabilitas, sustainabilitas, penyebaran dan kemerataanya (Djogo, dkk., 2003).

Masyarakat umum juga memahami kelembagaan sosial sebagai organisasi sosial yang muncul dari kebutuhan sosial dan situasi para anggota. Kebutuhan sosial, bahwa setiap manusia di kodratkan tidak dapat hidup tanpa memerlukan bantuan orang lain. Situasi para anggota, setiap orang pasti membutuhkan pertolongan sehingga manusia hidup juga harus saling tolong menolong. Liliweri (2014:171), menyatakan bahwa sebuah kelembagaan sosial merupakan struktur atau mekanisme tatanan sosial yang mengatur perilaku individu sebagaimana telah ditetapkan oleh dan dalam suatu masyarakat. Kelembagaan sosial tersebut berperan untuk mengidentifikasi tatanan sosial yang mengatur pola-pola interaksi dan relasi antar manusia yang teratur yang melampaui niat dan kepentingan individu melalui norma-norma yang mengatur perilaku hidup bersama.

Sejalan dengan upaya pemerintah di dalam pengembangan kelembagaan petani, Sumardjo (2012:688) mengidentifikasi Sembilan kelompok yang dapat mengembangkan dinamika kelompok dan kelembagaan, yakni: (1) daya tarik dan intensitas interaksi; (2) persamaan antar anggota; (3) kejelasan dan ketepatan tujuan kelompok; (4) kesalingtergantungan antar anggota kelompok; (5) aktivitas



kelompok yang mengarah pada tercapainya tujuan kelompok; (6) ketepatan dalam kepemimpinan kelompok; (7) kejelasan status dan peran dalam kelompok; (8) iklim kelompok dan (9) ukuran kelompok yang memungkinkan terjadi komunikasi yang efektif dalam kehidupan kelompok atau organisasi petani.

Ahmad (2016:366-368) menjelaskan keberadaan pesantren sebagai bentuk kelembagaan sosial memainkan peran yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Menurutny ada tiga peran utama keberadaan pesantren: (1) sebagai pengkaderan pemikir-pemikir agama; (2) sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia; (3) sebagai lembaga yang memainkan peran sebagai *agen of change*. Berangkat dari apa yang dikonsepsikan oleh Ahmad tersebut, maka dalam penelitian ini akan melihat lebih jauh bagaimana keberadaan kelembagaan lokal (pesantren) yang ada di wilayah penerima program CSR nanti memberikan kontribusi dalam penerapan program CSR oleh perusahaan Aqua.

Selanjutnya Ahmad Faozan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam mencetak kader-kader pemberdayaan masyarakat, adalah: (1) menumbuhkembangkan jiwa wirausaha di kalangan pondok pesantren dan masyarakat; (2) menumbuhkembangkan sentra dan unit usaha yang berdaya saing tinggi; (3) membentuk lembaga ekonomi mikro berbasis nilai Islam; dan (4) mengembangkan jaringan ekonomi dan pendanaan di pesantren baik horizontal maupun vertical (Ahmad, 2016:367-368). Berpijak dari tujuan yang dikemukakan oleh Faozan tersebut, maka penelitian ini akan mendeskripsikan lebih jauh keempat point tersebut dalam kontek masyarakat dan pesantren yang merupakan wilayah penerima program CSR.

## 11. Kearifan Lokal di Bidang Lingkungan

Secara etimologis, kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Pada KBBI, lokal berarti setempat, sedangkan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Sehingga jika dilihat secara etimologis, kearifan lokal (*local wisdom*) dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Warren *et al* (1995:426) mendefinisikan tentang kearifan lokal atau pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) sebagai berikut: “*Indigenous knowledge is local knowledge that is unique to a given culture or society. That is important as it forms the information base for a society which facilitates communication and decision-making*”. (Pengetahuan lokal merupakan pengetahuan setempat yang unik yang ada pada masyarakat atau masyarakat tertentu. Pengetahuan lokal ini penting karena merupakan basis informasi bagi masyarakat tersebut dalam melakukan komunikasi dan pengambilan keputusan). Hal ini berarti pengetahuan lokal selalu berada di dalam proses adaptasi dalam lingkup dunia yang terus berubah. Perubahan-perubahan ekologi, sosial dan ekonomi merupakan hal yang wajar, bahkan kini berlangsung dalam dinamika yang meningkat secara cepat.

Sistem pengetahuan lokal yang merupakan refleksi dari sistem budaya, memberikan pemahaman tentang struktur pengetahuan, pengambilan keputusan dan struktur organisasi yang dikembangkan oleh masyarakat tertentu (Adimihardja, 1999). Teori ini penting sebagai alat untuk membedah bagaimana petani tetap bersandar pada moralitas dan bagaimana petani juga beradaptasi dengan budaya global yang selalu menyelimuti setiap langkah petani. Keunggulan pengetahuan rakyat desa adalah kemampuannya untuk mempertahankan, meluaskan dan membetulkannya. Pengetahuan rakyat desa, dapat ditopang dan ditingkatkan oleh kekayaan dan ketajaman pengamatan yang tidak ditemui dalam ilmu pengetahuan “*orang luar*” (Chambers, 1988).

Menurut Atmodjo (1986) kearifan lokal merupakan kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif, artinya disesuaikan dengan suasana dan kondisi setempat. Kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif tentu memerlukan pengalaman langsung dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan budaya masyarakat adat sebagai sumber belajar. Sementara itu Ridwan (2007) mengemukakan bahwa kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang

tertentu. Pengertian tersebut disusun secara etimologi, dimana *wisdom*/kearifan dipahami sebagai kemampuan seseorang dengan menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi.

Hikmat (2010) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan sebuah nilai penting yang dimiliki masyarakat adat dalam aktivitas yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi alam. Nilai budaya yang berupa kearifan manusia dalam mengelola alam tersebutlah yang kemudian diyakini merupakan cara yang paling ampuh dalam mengelola alam. Dengan demikian segenap potensi yang dimiliki oleh sebuah bangsa harus dioptimalkan, termasuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat. “Sistem budaya lokal merupakan modal sosial (*social capital*) yang besar, telah tumbuh-berkembang secara turun-temurun yang hingga kini kuat berurat-berakar di masyarakat”.

Berbagai studi yang dilakukan para ilmuwan menunjukkan, bahwa pengetahuan penduduk setempat tidak hanya kaya, rinci dan adaptif terhadap kondisi lingkungan hidupnya, melainkan dinamis dan selalu berubah-ubah di sepanjang waktu (Conklin 1957; Howes dan Chambers 1979 ; Brokensha *et al.* 1980 ; Chambers *et al.* 1989 ; Scoones and Thompson 1994 ; Warren *et al* 1995).

Bertahannya pengetahuan lokal petani akan terus teruji kehandalannya ketika revolusi hijau mengakibatkan hasil panen berangsur-angsur menjadi sedikit karena tanah tidak memiliki humus lagi dan tanah menjadi padat. Binatang-binatang yang berguna seperti belut, cacing, kodok, ular mulai langka karena ikut terbunuh juga. Akhirnya beberapa serangga menjadi resisten terhadap “*pentung kimiawi*” seperti wereng (Dahler dan Eka Budianta, 2000). Pertanian harus mampu lebih peka terhadap budaya dan kearifan lokal atau pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Hal itu berarti setiap upaya pembangunan pertanian harus sensitif terhadap budaya masyarakat pertanian, dengan menjadikan pengetahuan dan budaya lokal sebagai variabel utama dalam proses pembangunan pertanian (Soetrisno, 2002). Untuk bergerak kearah hubungan yang berkelanjutan dengan lingkungan, maka masyarakat belajar hidup dalam batas kemampuan lingkungannya sendiri (Korten, 2002).

Secara singkat kearifan lokal petani merupakan pengetahuan unik yang ada dalam suatu masyarakat yang ditransfer dari nenek moyangnya yang tercermin dalam ketrampilan-ketrampilan dan keahlian di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kearifan lokal tersebut adaptif dan dinamis terhadap lingkungan hidupnya, hal ini terlihat pada ketajaman pengamatan yang tidak ditemui dalam ilmu pengetahuan “orang luar”.

Belajar dari kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Lombok Barat, Saragi, dkk (2002:63) merangkum beberapa strategi berdemokrasi di desa, yakni: (1) menghimpun seluruh sumber daya manusia yang pro demokrasi; (2) mengontrol agar kebijakan pemerintah selalu aspiratif; (3) sosialisasi program secara sinergis; (4) umpan balik dari masyarakat; (5) pelaksanaan secara menyeluruh, (6) partisipatif dan (7) terbuka. Ketujuh elemen elemen ini akan dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melihat kearifan-kearifan lokal masyarakat di dalam menerapkan program CSR.

Masyarakat Samin juga memiliki kearifan lokal dalam menjalin sinergisitas, seperti yang ditulis oleh Wahono, dkk (2002:131) bahwa masyarakat Samin percaya bahwa komunikasi dan dialog merupakan kekuatan penting untuk mendukung kehidupan sosial. *'Nanduro gedang sobo sing kerep lan jagong'*, artinya saling mengunjungi antar mereka dan diskusi.

Belajar dari kearifan lokal masyarakat Samin di bidang lingkungan, Wibowo, dkk (2013:177-178) mendeskripsikan kearifan lokal masyarakat Samin dalam memandang alam. Masyarakat Samin memandang alam bukan sebagai faktor produksi (komoditas) melainkan sebagai sebuah sumberdaya; yang berarti alam mempunyai potensi yang perlu dijaga, dikembangkan, dan dilestarikan untuk kemaslahatan umat. Dalam posisi sebagai faktor produksi (komoditas), maka yang ada dibenak pikiran manusia selalu dikedepankan nilai ekonomis sebagai panglima. Maka terjadilah eksploitasi sumber daya alam, yang bertolak-belakang dengan pola pikir berbasis ajaran Samin, khususnya perihal kegiatan berdagang. Orang Samin tidak suka berdagang, karena orang yang berdagang dinilai berkecenderungan melakukan tindakan negatif, yaitu berbohong dalam mencari keuntungan. Maka dari itu orang Samin cenderung menghindarinya.

Masyarakat Samin menjadi cemas apabila alam diposisikan sebagai komoditas. Terdapat beberapa hal yang mendasari: pertama, tidak semua manusia yang hidup di dunia ini dapat menikmati kekayaan alam yang melimpah. Masyarakat Samin yakin bahwa hanya orang kaya yang memiliki kapital yang dapat menikmati kekayaan alam tersebut. Kedua, masyarakat Samin khawatir apabila alam menjadi suatu komoditas, maka akan terjadi ketidakrukunan antar manusia. Akan terjadi usaha memperebutkan kekayaan alam di antara kelompok-kelompok yang berkepentingan. Sebagai konsekuensi upaya untuk menguasai sumberdaya alam itu adalah timbulnya perkelahian dan saling menyerang. Implikasi selanjutnya dari itu adalah 'yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin'. Ketiga, masyarakat Samin juga khawatir manusia akan terpisah dengan alam sebagai akibat menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Dalam pandangan dunianya (*world view*), menurunnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan bukan disebabkan oleh masyarakat setempat melainkan lebih disebabkan oleh supra sistem yang ada diluar masyarakat tersebut. Oleh karenanya kalau kita ingin menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam, semestinya merubah dulu paradigma hubungan alam dengan manusia. Keempat, alam dan kekayaan yang melimpah tersebut tidak lestari dan tidak *sustainable*. Manusia sibuk mengeksploitasi dan terlenu untuk menjaga dan melestarikannya. Semestinya manusia sadar bahwa kekayaan alam yang melimpah yang diberikan oleh Tuhan semestinya digunakan untuk kemaslahatan umat bukan untuk segelintir manusia. Bencana alam yang selalu datang di negeri ini merupakan sebuah bentuk peringatan Tuhan. Ini berarti manusia harus menyadari akan ketidakbenaran dalam memposisikan alam ini dan semestinya tidak hanya sadar tapi harus mau merubah ketidakbenaran tadi.

Masyarakat Badui juga menyimpan banyak kearifan lokal di bidang lingkungan. Seperti yang ditulis oleh Erwinantu (2012:49), masyarakat Badui menganggap bahwa mereka merupakan bagian dari alam semesta. Mereka harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal inilah yang mendasari masyarakat Badui tidak menggunakan sabun, sampo, pasta gigi,



pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya. Pengganti dari bahan-bahan tersebut mereka mengambil dari alam.

Belajar dari berbagai kearifan lokal masyarakat adat tersebut, maka penelitian ini nanti akan menggali dan mendeskripsikan lebih jauh kearifan lokal-kearifan lokal yang ada pada masyarakat penerima program CSR. Hal ini dilakukan mengingat kearifan lokal yang dimiliki masyarakat menjadi modal utama dalam mensukseskan program CSR.

## 12. Kelestarian Lingkungan

Berbagai kegagalan dalam pembangunan negara di dunia ketiga, misalnya kerusakan lingkungan dan kemiskinan, menunjukkan adanya kesalahan dalam strategi pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Pembangunan yang bersifat *top down*, di mana kekuasaan pemerintah pusat sangat mendominasi dalam pembangunan di daerah, cenderung mengabaikan potensi sumber daya lokal (budaya lokal, modal sosial, pengetahuan lokal atau kearifan lokal) yang disebut energi sosial. Padahal sumber daya lokal inilah yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi masalah kemiskinan mereka sendiri.

Manusia berasal dari tanah dan hidup dari dan di atas tanah. Hubungan antara manusia dan tanah sangat erat. Kelangsungan hidup manusia diantaranya tergantung dari tanah dan sebaliknya, tanahpun memerlukan perlindungan manusia untuk eksistensinya sebagai tanah yang memiliki fungsi. Allah SWT berfirman :“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.” (QS. Asy-Syu'ara: 7-8).

Al-Qur'an sebagai sumber moral manusia dengan tegas telah menjelaskan posisi manusia-ekologi. Allah SWT menasbihkan manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi (*khalifatullah fil ardi*) (Q.S. Albaqarah: 30) yang berkewajiban memakmurkan dan membudidayakannya (Q.S. Hud: 61), sekaligus melestarikan dan menjaga keseimbangan (*equilibrium*) lingkungan" (Q.S. Arrahman: 6-9).

Agar peran mulia kekhalfahan dapat berfungsi optimal, dapat mencapai dimensi kualitatifnya yang tinggi, maka manusia (kita) niscaya dengan ikhlas pada saat yang bersamaan harus melibatkan dimensi kesediaan diri untuk menegakkan ibadah. Di antaranya dengan sikap dan perilaku yang memperlakukan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Karena dalam pandangan Ilahi, alam memiliki hak yang sama dengan manusia (Q.S. Al-Hijr: 86).

Zuhud (2012), memetakan tiga pendekatan dalam membangun sikap prakonservasi terhadap alam dan lingkungan: (1) membangun sikap tristimulus AMAR (Alamiah, Manfaat dan Religius) prakonservasi; (2) mengembangkan pengetahuan tradisional menjadi pengetahuan modern yang adaptif terhadap perubahan; dan (3) mengaktifkan nilai-nilai religius sebagai stimulus.

Menurut Zsoka Nemcsicsne (2007:129-130) perilaku lingkungan dapat digambarkan sebagai komponen kesadaran lingkungan, yang menyoroti saling ketergantungan di antara keduanya. Setiap komponen kesadaran berperan dalam membentuk perilaku organisasi. Nilai lingkungan tampaknya sangat penting, karena berkaitan dengan perilaku yang konsisten mengenai pengetahuan ekologi, sikap lingkungan, kemauan untuk bertindak dan perilaku aktual. Nilai lingkungan perusahaan tercermin dengan baik dalam fitur budaya organisasinya.

Sejalan dengan pembangunan berwawasan lingkungan hidup, Sony Keraf (2010:166-184) memaparkan sembilan prinsip-prinsip etika lingkungan hidup, yakni: (1) prinsip sikap hormat terhadap alam; (2) prinsip tanggung jawab; (3) prinsip solidaritas kosmis; (4) prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam; (5) prinsip '*no harm*'; (6) prinsip hidup sederhana dan selaras alam; (7) prinsip keadilan; (8) prinsip demokrasi; dan (9) prinsip integritas moral. Kesembilan prinsip-prinsip etika ini menjadi pisau analisis dalam memahami masyarakat penerima program CSR ketika berinteraksi dengan alam dan lingkungan.

Pada dasarnya ekologi manusia melihat hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Ekologi manusia dilihat sebagai hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesamanya dan dengan lingkungan (alam dan buatan) di sekitarnya. Manusia memiliki dua sifat yang melandasi hubungannya dengan lingkungannya: pertama, sifat biologis dan

nalurinya sebagai makhluk hidup biologis; membutuhkan makanan, melakukan reproduksi, membuang kotoran, membutuhkan udara dan ruang gerak. Kedua, mempunyai tata nilai, norma, akal, budi, sikap dan persepsi mengenai dunia sekeliling dan tempat dirinya di dalamnya (Poerbo, 1999:13).

Teori etika lingkungan yang dipakai sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah *Deep Ecology* yang dikemukakan oleh Naess (1995: 64-69). Teori ini menekankan bahwa pada dasarnya manusia hidup selaras dengan lingkungan sekitarnya. Ini adalah suatu paradigma tentang alam dan seluruh isinya, perhatian bukan hanya berpusat pada manusia melainkan pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Manusia bukan lagi pusat dari dunia moral. *Deep Ecology* memusatkan perhatian kepada semua kehidupan di bumi ini, bukan hanya kepentingan seluruh komunitas ekologi.

Naess (1995:79-81) bahkan juga menggunakan istilah *ecosophy* untuk memberikan justifikasi filosofi atas *deep ecology*. “*Eco*” berarti rumah tangga dan “*sophy*” berarti kearifan atau kebijaksanaan. Maka *ecosophy* berarti kearifan dalam mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas. Kearifan ini menjelma sebagai suatu pola hidup atau gaya hidup (*way of life*). Dalam pandangan *ecosophy* terlihat adanya suatu pergeseran dari sekedar sebuah ilmu (*science*) menjadi sebuah kearifan (*wisdom*). Artinya, lingkungan hidup tidak hanya sekedar sebuah ilmu melainkan sebuah kearifan, sebuah cara hidup, sebuah pola hidup selaras dengan alam. Hal tersebut adalah cara untuk menjaga dan memelihara lingkungannya secara arif.

Terdapat berbagai pendekatan untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup khususnya terhadap masalah-masalah ekologis. Penelitian ini akan diketengahkan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan linear, berupaya memecahkan masalah-masalah spesifik dengan solusi-solusi yang diskrit. Misalnya masalah berkurangnya sumber daya diatasi dengan teknologi alternatif, masalah populasi diatasi dengan program keluarga berencana dan seterusnya. Jadi, setiap masalah terisolasi, dan sebuah solusi spesifik dicarikan untuk itu (Ife dan Tesoriero, 2008:54). *Kedua*, pendekatan yang

lebih mendasar atau radikal. Pendekatan ini melihat masalah-masalah lingkungan hidup sebagai sekedar gejala-gejala dari masalah mendasar yang lebih penting. Hal tersebut adalah konsekuensi dari suatu orde sosial, ekonomi dan politik yang secara mencolok tidak berkelanjutan, dan karena itu ada orde sosial, ekonomi dan politik inilah yang harus diubah (Ife dan Tesoriero, 2008:54-55).

Menurut Mangunjaya (2006:252-253), ada dua langkah penting pendekatan ekologis yang diperlukan, yakni: (1) perencanaan dan pengelolaan pemukiman penduduk untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan kebutuhan lain dengan cara mempertahankan keseimbangan antara pemukiman dan ekosistem. (2) berusaha mempertahankan kombinasi yang selaras antara unsur-unsur buatan manusia dan yang telah ada secara alami untuk mempertahankan habitatnya.

Dilihat dari perspektif ekologis, penelitian ini berlandaskan pada 4 prinsip ekologi, yakni: *holisme*, keberlanjutan, keanekaragaman dan keseimbangan. Prinsip *holisme* mensyaratkan bahwa setiap kejadian atau fenomena harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan, dan bahwa hal itu hanya dapat dimengerti secara benar dengan mengacu kepada setiap bagian dari sistem yang lebih besar. Prinsip *holisme* menilai tinggi pendekatan kepada masalah dan pemecahannya secara generalis dibandingkan spesialis. Prinsip keberlanjutan, berarti bahwa sistem-sistem harus mampu dipertahankan dalam jangka panjang, bahwa sumber daya seharusnya digunakan hanya pada laju yang ia dapat dipulihkan, bahwa sumber-sumber energi terbaru harus dimanfaatkan, bahwa akibat kepada lingkungan seharusnya dibatasi pada tingkat yang menyerap akibat secara memadai dan bahwa konsumsi harus diminimumkan. Prinsip keanekaragaman, suatu gangguan yang terjadi pada sebuah sistem atau organisme tidak mesti membawa kehancuran pada keseluruhannya. Jika keanekaragaman dihargai, maka orang seharusnya diperbolehkan dan di dorong untuk menemukan solusi-solusi. Prinsip keseimbangan, menekankan pentingnya hubungan antara sistem-sistem dan kebutuhan untuk menjaga suatu kesetimbangan diantara sistem-sistem tersebut. Di alam, hal ini terjadi melalui keseimbangan yang dinamis, dimana perubahan-

perubahan secara alamiah dan alterasi-alterasi dibuat sehingga kesetimbangan tersebut terpelihara (Ife dan Tesoriero, 2008:91-99)

Dilihat dari perspektif hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Poerbo (1999:13-14) memetakan ke dalam tiga hal, yakni:

1. Manusia mempunyai dua sifat yang melandasi hubungannya dengan lingkungan, yakni: (a) sifat biologis dan nalurinya sebagai makhluk biologis: membutuhkan makan, melakukan reproduksi, membuang kotoran, membutuhkan udara dan ruang gerak; (b) mempunyai tata nilai, norma, akal, budi, sikap dan persepsi mengenai dunia sekelilingnya.
2. Manusia hidup bermasyarakat (hubungan antar manusia), Ia membentuk struktur-struktur (sosial-ekonomi-politik) yang mengatur kehidupan bersamanya dan hubungan dengan sumber daya alam untuk dimanfaatkan bagi kehidupannya.
3. Lingkungan biofisik, merupakan suatu lingkungan yang mempunyai struktur dan proses-proses tersendiri. Sebagian lingkungan biofisik ini diubah oleh manusia melalui budidya menjadi lingkungan buatan seperti persawahan, perkebunan, pemukiman dll).

Menurut Poerbo (1999:19), kelestarian lingkungan akan tercapai bilamana penggunaan sumber daya yang ada tidak terkuras keluar tanpa imbalan yang memadai. Disamping itu, masyarakat juga harus siap untuk memanfaatkan sumber daya secara arif. Sedangkan menurut Sutanto (2005:76) terkait dengan pemanfaatan sumber daya, perlunya program-program yang berbasis pada kearifan lokal: (1) mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan dengan memanfaatkan sumber daya lokal (seperti jenis tanaman potensial, bibit unggul lokal, pupuk hijau, kompos dan pupuk hayati); (2) meningkatkan diversifikasi tanaman pangan; (3) optimalisasi usahatani terpadu (*integrated farming system*) melalui sistem ternak tanaman, perikanan-tanaman yang dipadukan dengan usaha peningkatan produksi tanaman; (4) mengolah dan menanam lahan pekarangan dengan jenis tanaman yang bermanfaat (seperti tanaman obat keluarga) dan diadaptasikan dengan kondisi lokal, serta memanfaatkan teknologi yang mudah diadopsi dan dilaksanakan oleh petani; (5) meningkatkan pendampingan,

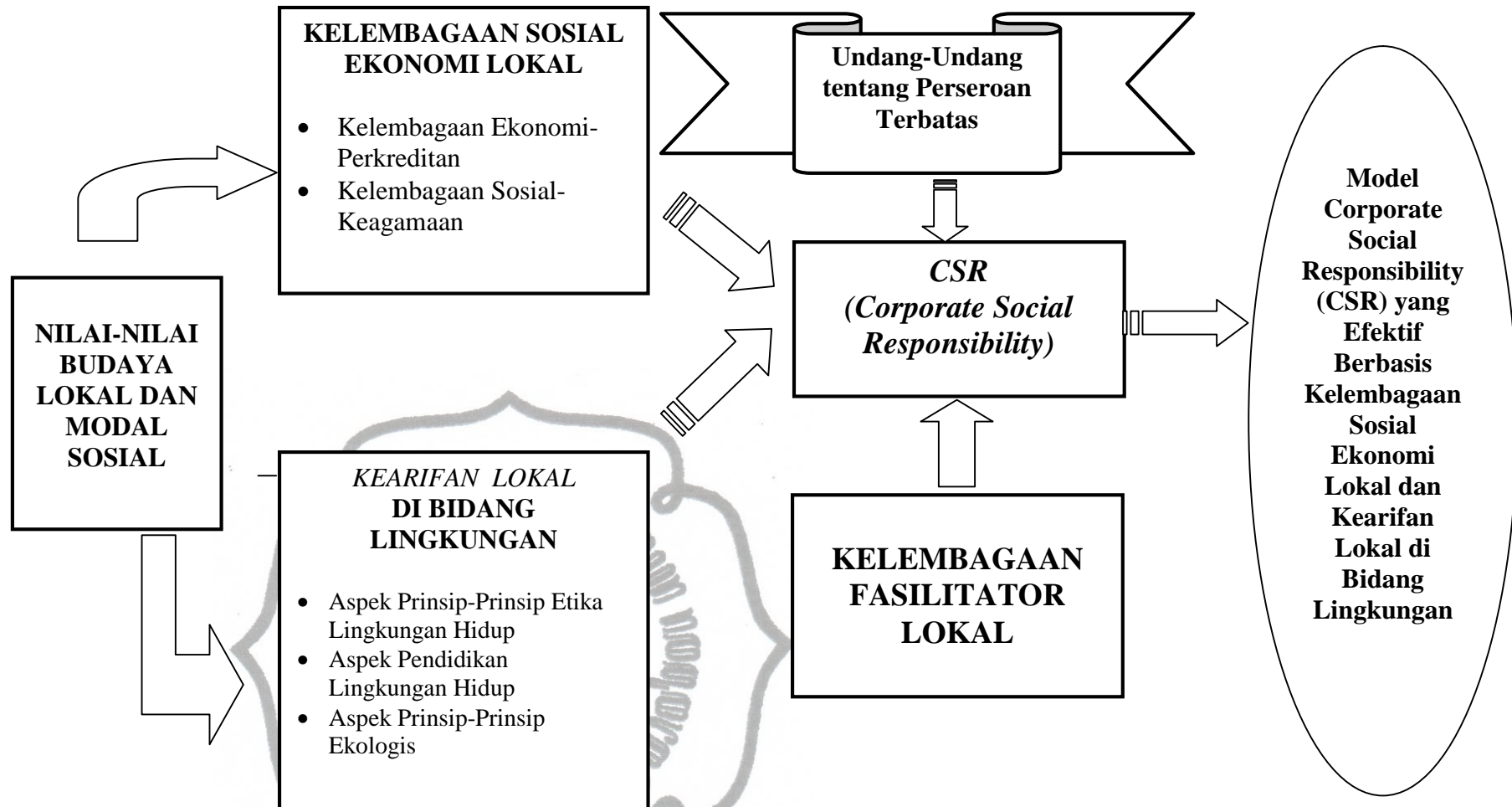


pemanduan serta pelatihan bagi petani dan kelompok tani guna mendorong dan meningkatkan kemandirian petani; (6) meningkatkan peran wanita dalam usahatani; (7) melaksanakan survei dan pemetaan ketersediaan dan kerawanan pangan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap kondisi pangan di Indonesia.

Melestarikan keanekaragaman hayati berarti menjamin kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Terdapat empat hal yang menonjol bahwa keanekaragaman hayati mempunyai prospek penting dari segi ekonomi; (1) keanekaragaman hayati adalah sumber potensial kekayaan genetik; (2) keanekaragaman hayati di hutan merupakan satu-satunya harapan hidup manusia karena di sana terdapat obat-obatan ilmiah; (3) memiliki keanekaragaman hayati berarti memiliki pilihan yang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) memiliki keanekaragaman hayati mempunyai kekayaan jenis yang bervariasi (Mangunjaya, 2006: 11-12). Berpijak dari konsepsi tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan CSR berbasis kearifan lokal dalam bidang lingkungan. Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan jalan memahami strategi-strategi petani dalam mempertahankan kelestarian lingkungan, diharapkan akan menjadi *best practise* untuk direplikasi pada wilayah lain yang memiliki kesamaan karakteristik.

## **B. Kerangka Pikir Penelitian**

Berdasarkan studi-studi sebelumnya di atas kerangka penelitian dari studi ini dibagi dalam tiga tahap. Pertama adalah tahap mengidentifikasi berbagai hal yang mendorong perusahaan menerapkan CSR. Di sini dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara dengan pihak perusahaan. Kedua, dilakukan pengamatan terhadap penerapan CSR oleh perusahaan pada masyarakat sasaran penerima manfaat. Ketiga, berdasarkan kedua tahap diatas akan disusun model penerapan CSR. Model ini akan disusun secara komprehensif yang didasarkan atas kelembagaan lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan. Secara skematik terlihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1  
Kerangka Pikir Kelembagaan Sosial Ekonomi Lokal dan Kearifan Lokal di Bidang Lingkungan dalam Penerapan *Corporate Social Responsibility*

### C. Dimensi Penelitian

Dimensi dan kerangka logis penelitian digunakan sebagai panduan peneliti agar penelitian lebih fokus tanpa mengurangi kelenturan penelitian. Peneliti membatasi penelitian dalam sebuah dimensi-dimensi penelitian dan dikembangkan dalam sebuah matrik kerangka logis penelitian (secara rinci disajikan dalam lampiran). Berpijak dari permasalahan dalam penelitian ini, maka dikembangkan dimensi dimensi penelitian sebagai berikut.

1. Nilai-nilai budaya lokal adalah pikiran masyarakat, ide atau gagasan banyak yang hidup bersama dengan masyarakat. Gagasan itu selalu berkaitan dan tidak dapat lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Keterkaitan antara setiap gagasan ini disebut sistem. Sistem nilai budaya tersebut tercermin dalam sistem pengetahuan lokal, ketrampilan dan teknologi yang bersifat adaptif terhadap lingkungan alam. Sekalipun sistem ini tidak utuh lagi, tetapi masih digunakan, dipertahankan dan diadaptasikan untuk kelangsungan hidup masyarakat.
2. Nilai-nilai modal sosial adalah sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peranan penting adalah kemauan masyarakat untuk secara terus menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Inilah jati diri modal sosial yang sebenarnya.
3. Kelembagaan sosial ekonomi lokal adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit satu fungsional. Norma-norma yang abadi dalam kemasyarakatan, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. Pada yang terakhir umumnya anggota-anggota masyarakat pada tidak berani melanggarnya.

4. Kearifan lokal di bidang lingkungan adalah pengetahuan unik yang ada dalam suatu masyarakat yang ditransfer dari nenek moyangnya yang tercermin dalam ketrampilan-ketrampilan dan keahlian di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kearifan lokal tersebut adaptif dan dinamis terhadap lingkungan hidupnya, hal ini terlihat pada ketajaman pengamatan yang tidak ditemui dalam ilmu pengetahuan “orang luar”. Kontribusi kearifan lokal di bidang lingkungan dalam penerapan CSR. Gejala yang diamati adalah kearifan lokal di bidang lingkungan dalam penerapan CSR, yang dilihat dalam dimensi: aspek prinsip-prinsip etika lingkungan hidup, aspek pendidikan lingkungan hidup dan aspek prinsip-prinsip ekologis.
5. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang dikaitkan dengan masalah keterbukaan (*disclosure*), transparansi dan akuntabilitas, masalah hak asasi manusia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, perlindungan terhadap hak-hak konsumen, isu mengenai lingkungan hidup yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya, serta keterlibatan masyarakat secara langsung bagi jalannya usaha perusahaan
6. Kelembagaan fasilitator lokal adalah lembaga sosial masyarakat yang berperan sebagai pelaksana penerapan program CSR dalam penelitian ini adalah LPTP (Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan).
7. Karakteristik dan peran kelembagaan sosial ekonomi lokal dalam penerapan program CSR oleh perusahaan. Gejala yang diteliti meliputi: *Pertama*, karakteristik kelembagaan yang meliputi dimensi: orientasi utama, sifat kerja sistem sosialnya, sandaran kontrol sosial, bentuk symbol yang diterapkan dan bentuk norma utama. Kedua adalah Peran kelembagaan yang meliputi dimensi: identifikasi perubahan yang terjadi pada lingkungan dan modifikasi yang dilakukan kelembagaan sebagai respon terhadap perubahan.
8. Penerapan CSR oleh perusahaan dalam memberdayakan masyarakat. Gejala yang diamati dalam permasalahan penelitian ini difokuskan pada dimensi: sektor industri rumah tangga, sektor konservasi, sektor pertanian berkelanjutan serta sektor sanitasi dan kesehatan lingkungan.

9. Nilai-nilai modal sosial , bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan dampak pemberdayaan melalui program CSR di bidang lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Gejala yang diamati meliputi: pertama, sumber utama modal sosial yakni meliputi dimensi agama. Kedua, sumber pendukung modal sosial yakni tradisi memelihara pelestarian lingkungan. Ketiga adalah entitas modal sosial dan perannya dalam mengatasi kerusakan lingkungan, yang meliputi dimensi: penggunaan jaringan dalam mengatasi kerusakan lingkungan, peran *resiprocity* dalam mengatasi kerusakan lingkungan, peran trust dalam mengatasi kerusakan lingkungan, peran norma sosial dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan peran solidaritas sosial dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Keempat adalah partisipasi masyarakat dalam implementasi CSR, yang meliputi dimensi pemahaman partisipasi dan kearifan lokal pada partisipasi masyarakat dalam program CSR.
10. Sinergisitas dan integrasi dalam penerapan CSR. Gejala yang diamati meliputi: pertama, budaya sosial masyarakat di wilayah penerima program CSR. Kedua, budaya ekonomi masyarakat di wilayah penerima program CSR. Ketiga, kendala sosial budaya dalam pemberdayaan ekonomi produktif. Keempat sinergisitas budaya lokal dalam pemberdayaan ekonomi produktif. Kelima strategi integrasi budaya sosial dan budaya ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi produktif. Keenam strategi pengembangan usaha ekonomi produktif. Ketujuh dampak pemberdayaan melalui program CSR. Kedelapan fenomena glocalisasi budaya dan glocalisasi ekonomi.
11. Model penerapan CSR berbasis kelembagaan sosial ekonomi dan kearifan lokal di bidang lingkungan merupakan hubungan dari berbagai subsistem-subsistem yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program CSR.